



ISSN : 1412-582X

Multikulturalisme, Separatisme dan Pembentukan Negara Bangsa di Philipina

Editor: Erni Budiwanti

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jakarta
2003

Begitu banyak pihak yang telah membantu tim peneliti PSDR selama penelitian ini berlangsung hingga terwujudnya naskah laporan ini. Kami sangat berterima kasih kepada Prof. Dr. Miriam Ferrer Coronel selaku Direktur The Third World Studies Centre, University of Philippines-Manila beserta stafnya, Prof. Carmencita T. Aquillar, Dr. Asiri J. Abubakar, Dr. Carmen Abubakar, Dr. Julkipli Wadi, Prof. Nestor Castro, Gunaranao Musor, Ayesa Sadain, dan pihak-pihak terkait lainnya yang telah memberikan kemudahan dan informasi yang sangat bernilai selama penelitian di Filipina.

Laporan awal penelitian ini telah dibahas melalui beberapa pertemuan dan seminar yang diadakan di Pusat Penelitian Sumberdaya Regional. Berdasarkan kritik dan saran-saran yang diberikan, laporan ini kemudian disempurnakan dan akhirnya menjadi laporan akhir seperti sekarang ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras para peneliti dan juga staf administrasi PSDR-LIPI, serta para peneliti lain di luar PSDR-LIPI yang terlibat dan memberikan andil yang besar dalam penelitian ini. Meskipun demikian, kami juga menyadari bahwa laporan ini tidak lepas dari berbagai kelemahan dan kekurangan. Penelitian di luar negeri, dengan berbagai keterbatasan waktu dan bahasa, tentunya juga memberikan pengaruh terhadap informasi yang diperoleh. Oleh karena itu, kami menghargai jika ada saran dan kritik demi penyempurnaan laporan ini di masa depan.

Jakarta, 16 Desember 2003
Kepala Pusat Penelitian Sumberdaya Regional-LIPI

Dr. Yekti Maunati, MA

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
Oleh : Erni Budiwanti dan Cahyo Pamungkas	
A. Latar Belakang Masalah	1
- Kolonisasi : Penyatuan Paksa dan Politik Migrasi	1
- Gerakan Pembebasan Moro	3
- Internasionalisme Gerakan Separatisme	8
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kerangka Analisis	12
E. Metodologi Penelitian	14
- Pendekatan	14
- Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II DEMOGRAFI SEJARAH DAN SEJARAH KOLONISASI DI FILIPINA	
Oleh : Lamijo dan Syafuan Rozi	
A. Pendahuluan	17
B. Keadaan Geografi dan Demografi	18
1. Keadaan Geografi	18
2. Demografi	20
C. Sejarah Kolonisasi Filipina	27
1. Sejarah Masuknya Islam di Filipina	27
2. Penjajahan Spanyol (1521-1898)	29
3. Penjajahan Amerika (1898-1946)	31
4. Pasca Kemerdekaan	34
Identitas dan Perlawanan Bangsa Moro	36
Kesimpulan	45
BAB III PERKEMBANGAN GERAKAN SEPARATISME BANGSA MORO	
Oleh : Cahyo Pamungkas	
A. Pendahuluan	49
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Gerakan Separatis	50
1. Politik Integrasi Kolonial	51
2. Represi Terhadap Identitas Sosial Budaya	55
3. Pembagian Sumberdaya di Mindanao	58
4. Ethnic Cleansing Terhadap Bangsa Moro	65

C. Gerakan Separatis Bangsa Moro	68
D. Kesimpulan	87
BAB IV GERAKAN PEMBEBASAN MORO DAN PERJANJIAN DAMAI	
Oleh : Erni Budiwanti	
A. Pendahuluan	91
B. Perlawanan Moro dan Perjanjian Tripoli	92
C. ARMM (Autonomous Region for Muslim Mindanao)	103
D. Perjanjian Damai 1996 (1996 Peace Agreement)	106
D. Posisi MILF Dalam Konteks Perundingan Damai	111
E. Kesimpulan	115
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	121
Oleh Erni Budiwanti dan Cahyo Pamungkas	
DAFTAR PUSTAKA	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Jumlah Penduduk Filipina Menurut Beberapa Sensus	22
Tabel 2	: Penduduk Muslim Filipina Berdasarkan Sensus Tahun 1980	23
Tabel 3	: Distribusi Penduduk Muslim Berdasarkan Suku dan Region	24
Tabel 3.1	: Daftar Undang-Undang Kepemilikan Tanah di Mindanao pada Masa Kolonial	59
Tabel 3.2	: Jumlah dan Komposisi Penduduk di Mindanao, 1918-1980	60
Tabel 3.3	: Perkembangan Kepemilikan Tanah untuk Perusahaan-perusahaan di Mindanao	62
Tabel 3.4	: Daftar 10 Propinsi Termiskin di Filipina pada Tahun 2000	63
Tabel 3.5	: Karakteristik Gerakan Separatis Bangsa Moro	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Sultan Sulu, Muhammad	47
Gambar 2 : Haji Murad, Pimpinan MILF yang baru setelah Hashim Salamat Meninggal	90
Gambar 3 : Perjanjian Damai 1996 yang ditandatangani oleh Presiden Fidel V. Ramos dan Nur Misuari (Pimpinan MNLF)	119

BAB I PENDAHULUAN

Oleh
Erni Budiwanti dan Cahyo Pamungkas

A. Latar Belakang Masalah

Kolonisasi: Penyatuan Paksa dan Politik Migrasi

Wilayah Mindanao dahulunya adalah sebuah kerajaan Islam yang merdeka penuh yang penduduknya terdiri dari berbagai suku. Islam pertama kali masuk di kepulauan ini melalui perantara para pedagang Arab di abad ke 13. Lebih kurang seabad kemudian mereka yang memeluk agama Islam mendirikan suatu kerajaan. Perkembangan Islam mencapai puncaknya ketika Islam menjadi agama resmi pada abad ke-14. Islam adalah simbol identitas kolektif bangsa Moro. Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan (menyatu) di dalam kehidupan Moro. Tahun 1565 Spanyol tiba di wilayah kesultanan Muslim Mindanao dan kepulauan Sulu yang terletak di Selatan Filipina. Serangan terhadap kedua wilayah ini berlanjut tiga ratus lima puluh tahun kemudian. Meskipun gagal menduduki kedua wilayah kesultanan tersebut, mereka menempatkan *garrison* di area sekitar kedua kesultanan tersebut. Spanyol berhasil menaklukkan wilayah Filipina lainnya dan menjadikan mereka sebagai pemeluk Katolik.

Sejak pendudukan Spanyol, pemerintah kolonial melakukan dominasi politik, ekonomi, maupun keagamaan, memaksa orang-orang Moro untuk berpindah agama. Hegemoni ini berlanjut di masa pemerintahan kolonial Amerika melalui penerapan politik migrasi. Pemerintah kolonial melakukan pemindahan secara besar-besaran penduduk Katolik Filipino ke Mindanao untuk menandingi komposisi jumlah orang-orang Moro sebagai penduduk asli Mindanao.

Tahun 1898, kemenangan Amerika atas Spanyol menandai perpindahan (penyerahan) kekuasaan atas Filipina ke tangan Amerika. Meskipun status Sulu dan Mindanao sendiri

belum sepenuhnya berada di bawah kontrol penuh Spanyol, namun keduanya secara paksa dimasukkan dalam perjanjian penyerahan tersebut. Muslim di kedua kepulauan bertempur melawan penduduk Amerika atas wilayah mereka. 20 Agustus 1902 Sultan Sulu dan Mindanao menandatangani perjanjian *The Bates Treaty*, dimana Amerika mengakui pemerintahan Sultan atas penduduk setempat, dan Amerika juga memberikan otoritas lokal. Namun perjanjian ini ternyata tidak bertahan lama karena Amerika menghapuskannya di tahun 1902. Amerika memaksakan pemerintahan langsung yang terpusat, akibatnya propinsi Moro di kedua kepulauan tersebut berada di bawah kontrol langsung dari pemerintah kolonial Amerika di Manila. Kemudian pemerintah kolonial memperkenalkan pendidikan sekuler dengan guru-guru non-Muslim. Bagi Muslim Moro pendidikan sekuler mengancam pendidikan agama dan mengikis otoritas dari para guru agama. Rata-rata penduduk Muslim Moro waktu itu menolak pendidikan sekuler yang berakibat tingginya angka buta huruf.

Guna mengintegrasikan masyarakat Muslim Moro di kedua kepulauan tersebut kedalam masyarakat Filipina, pemerintah kolonial Amerika kemudian menerapkan kebijakan memindahkan penduduk Filipina ke propinsi Moro. Pemerintah kolonial memberikan pinjaman lunak bagi mereka yang tak memiliki dana untuk pindah ke propinsi Moro. Antara tahun 1903 dan 1906 pemerintah juga memperluas pemilikan tanah bagi para migran (pendatang Katolik-Filipino) dari 40 menjadi 200 hektar. Di tahun 1902 pemerintah mencanangkan undang-undang registrasi pemilikan tanah yang menentukan tentang luas tanah yang boleh dimiliki secara individual. Peraturan ini kemudian diikuti dengan undang-undang tanah publik (*Public Land Acts*) di tahun 1905, 1913, 1914, dan 1919.

Semua peraturan ini secara perlahan-lahan mengalihkan pemilikan tanah dari bangsa Moro menjadi tanah negara, meskipun beberapa orang bisa memiliki tanah pribadi. Semua peraturan ini pada prinsipnya membuat bangsa Moro kehilangan tanah warisan leluhur mereka. Menurut Undang-undang 1919, seorang Katolik Filipino bisa memiliki lebih dari 24 hektar tanah sedang yang non-Katolik hanya boleh memiliki 10 hektar tanah. Peraturan ini membuat banyak terjadi penjarahan tanah yang disahkan oleh pemerintah. Pada akhirnya pemerintah juga mendorong masuknya investasi asing di Mindanao. Ini membawa peningkatan proyek-proyek industri di sektor agro bisnis yang dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multi-nasional. Semua program pemerintah ini mendatangkan kekecewaan dan frustrasi mendalam di kalangan Muslim Mindanao maupun Sulu.

Gelombang migrasi besar-besaran sebagaimana disebutkan di atas bukan hanya mengakibatkan secara demografi jumlah Filipino melebihi Moro sehingga Moro menjadi minoritas di tanah airnya sendiri, tetapi juga menyebabkan banyaknya tanah Moro yang jatuh ke tangan Filipino. Bangsa Moro hanya meliputi 22 persen dari jumlah keseluruhan penduduk di tanah airnya sendiri.

Sekarang kekayaan di Mindanao dimiliki oleh pendatang Filipino yang beragama Katolik dan penanam modal asing. Perampasan pemilikan tanah di kalangan Moro yang disyahkan pemerintah melalui serentetan undang-undang merupakan salah satu faktor pendorong berkobarnya perlawanan yang gigih di kalangan Moro. Bagi bangsa Moro tanah bukan hanya merupakan aset material tetapi juga mengandung nilai kultural dan politis. Pemilikan tanah secara simbolik menyiratkan ikatan tradisi dan emosional dengan leluhur yang mewariskannya pada generasi kemudian. Tanah juga merupakan salah satu sumber *power*. Kehilangan tanah berarti pula kehilangan harkat dan martabat hidup, dan pihak yang menguasai tanah yang akhirnya mendominasi seluruh tatanan politik, ekonomi dan sosial alias menjadi penguasa lokal.

Bagi Moro, pemerintah Filipina tak ubahnya seperti penjajah Spanyol dan Amerika. Pemerintah Filipina melanjutkan kebijakan kolonialis pendahulunya dalam migrasi dan pemindahan tanah mereka pada Filipino.

Sebelum kemerdekaan Filipina, pemimpin Moro membuat pernyataan pada pemerintah kolonial Amerika, bahwa “mereka tidak ingin menjadi bagian Filipina. Bila tuntutan ini tidak dipenuhi, begitu kemerdekaan Filipina dideklarasikan pasti terjadi masalah antara Moro yang Islam dengan bangsa Filipina yang beragama Katolik karena sejak lama mereka memang tidak bisa hidup berdampingan secara damai. Oleh karenanya tidaklah tepat bila antara Moro dan Filipino hidup bersama dalam satu bendera”. Pemerintah kolonial Amerika menolak usulan ini. Konsekuensinya ketika kemerdekaan Filipina diumumkan di tahun 1946, negara yang baru merdeka ini memiliki komunitas Islam di wilayah Mindanao dan Sulu yang jumlahnya meliputi 6 persen dari keseluruhan penduduk Filipina

Gerakan Pembebasan Moro

Setelah kemerdekaan Filipina dari Amerika, bangsa Moro tetap melanjutkan perjuangannya bagi kemerdekaan Moro. Alih-alih menerima tuntutan Muslim Moro, pemerintahan

Filipina yang baru tetap melanjutkan kebijakan masa kolonial yakni melakukan tindakan-tindakan represif kepada gerakan separatis Moro. Pemerintah makin meningkatkan pemindahan masyarakat Katolik Filipino ke Mindanao. Menjelang tahun 1960an para pendatang/pemukim baru yang berasal dari Filipina Utara dan Tengah ini telah melebihi jumlah bangsa Moro. Bangsa Moro menjadi minoritas di wilayah tinggalnya sendiri, Filipina Selatan. Mengalirnya dana investasi dari dalam maupun luar negeri merupakan salah satu faktor penyebab berpindahnya kekayaan penduduk Mindanao ke bagian lain dari Filipina.

Pemerintah Filipina, seperti halnya pemerintah kolonial Amerika, juga mengeluarkan sejumlah undang-undang yang mensahkan pengambilan tanah yang secara turun-temurun dimiliki oleh penduduk Muslim Moro guna mengembangkan proyek pemukiman dan perkebunan. Banyak tanah milik masyarakat asli Mindanao yang kemudian jatuh ke tangan Katolik-Filipino atas intervensi pemerintah. Sebagai akibatnya sering terjadi bentrok kekerasan antara Katolik Filipino dan Muslim Moro.

Mindanao merupakan wilayah yang terkaya di Filipina dalam hasil tambang maupun sumber daya alam lainnya. Banyak usaha dari pemerintah Filipina untuk mengeksploitasi hasil tambang ini untuk keuntungan berbagai proyek industri di Utara Filipina. Tingginya investasi atau penanaman modal untuk menggali sumber-sumber tambang di Mindanao ini makin mempertinggi disparitas atau kesenjangan di antara minoritas Muslim Moro dan mayoritas Katolik. Setelah kemerdekaan Filipina, pemerintah bahkan menarik lebih banyak investor asing dari berbagai perusahaan multinasional untuk mendirikan industri-industri besar di Mindanao guna memenuhi harapan pemerintah akan peningkatan ekspor Filipina, namun tidak memenuhi kebutuhan lokal masyarakat Muslim Moro di Mindanao. Mindanao menjadi sumber devisa luar negeri bagi pemerintah Filipina. Sebaliknya dengan berdirinya industri besar telah mengubah pola ekonomi di Mindanao dari pertanian subsisten ke produk industri yang berorientasi ekspor. Ini membuat Moro yang mayoritas hidupnya sangat bergantung pada pertanian subsisten menjadi masyarakat pinggiran (*peripheral*) yang termarginalisasikan oleh proses industrialisasi.

Banyak proyek eksploitasi alam yang dikembangkan pemerintah tanpa diimbangi dengan adanya peningkatan kesejahteraan hidup di kalangan minoritas. Minoritas hidup dalam kondisi sosial-ekonomi yang lebih rendah dibanding mayoritas, memendam kecemburuan sosial, dan menanggung frustrasi dan kekecewaan yang berlarut-larut akibat sikap pemerintah yang diskriminatif, tidak adil, dan mengesampingkan hak-hak mereka.

Ketidakadilan ekonomi menjadi faktor pemicu atau pendorong untuk melawan semua kebijakan pemerintah. Gerakan pemberontakan pada intinya hendak memulihkan hak-hak minoritas atas tanah air yang pengelolaannya secara ketat dikontrol oleh penguasa.

Pemerintah Filipina waktu itu meyakini bahwa dengan makin menurunnya standar kesejahteraan masyarakat Moro, gerakan nasionalis Moro dalam jangka panjang juga akan terpengaruh dan menyusut karenanya. Standar hidup masyarakat Moro semakin menurun akibat kebijaksanaan pemerintah yang tidak mendukung pola ekonomi mereka. Namun turunnya standar hidup mereka justru makin membuat mereka geram terhadap penguasa dan karenanya makin membuat gerakan pembebasan Moro bertambah agresif melawan penguasa.

Kondisi perekonomian yang makin menurun di kalangan penduduk Islam Moro ditambah lagi dengan pembunuhan di Jabaidah telah memicu lahirnya gerakan Mindanao Merdeka – MIM (*Mindanao Independence Movement*) di tahun 1968. Gerakan ini mengumumkan kemerdekaan bagi Mindanao. Pendiri MIM dengan para elit Muslim lainnya di Mindanao, sesudah insiden pembunuhan di Jabaidah, berusaha memobilisasi dukungan di kalangan Muslim dan menyeru agar seluruh Muslim bersatu dan menuntut otonomi. Sebagai reaksi atas MIM, pendatang Katolik-Filipino mendirikan gerakan anti Moro (*Anti-Moro Ilaga Movement*) – sebuah kelompok yang bertanggung-jawab atas pembunuhan sekitar 70 orang Muslim di mesjid Baria Manila yang terletak di Utara Cotabato pada 19 Juni 1971.

Sementara itu pemerintah sendiri berusaha mengkooptasi pimpinan MIM dengan menawarinya posisi tinggi di pemerintahan. Kooptasi yang berhasil ini sangat mengecewakan banyak kader-kader muda MIM yang akhirnya meninggalkan organisasi ini. Di bawah kepemimpinan seorang lulusan perguruan tinggi, Nur Misuari, mereka membentuk front pembebasan nasional Moro (*MNLF-Moro National Liberation Front*) – sebuah organisasi yang dikenal sangat militan. Tujuan utama pendirian organisasi perlawanan ini adalah memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi tanah Moro. MIM merupakan tempat yang aman bagi para elit tradisional Moro yang mencoba memperoleh kembali kekuasaan dan prestise mereka yang hilang melalui perjuangan di dalam organisasi ini.

Berdirinya MNLF yang dirintis oleh kaum muda yang terdidik sekaligus merupakan tantangan bagi elit tradisional maupun pemerintah Filipina sendiri. Tidak diragukan lagi

bahwa MNLF merupakan sebuah organisasi pembebasan Moro yang sangat kuat yang dipimpin oleh orang-orang muda terdidik yang memahami berbagai taktik dan strategi politik. MNLF mendapat banyak sekali dukungan khususnya dari orang-orang Muslim Filipina yang menganggap bahwa gerakan ini sebagai jihad untuk melawan rejim Marcos. MNLF juga memiliki sayap militer, BMA (*Bangsa Moro Army*), yang anggota-anggotanya terdiri dari pemuda-pemuda Muslim militan dan mereka sering terlibat bentrokan bersenjata dengan tentara Filipina. Ribuan nyawa melayang selama terjadi bentrokan bersenjata diantara keduanya.

Di samping mendapat dukungan domestik, MNLF juga mencari dukungan internasional dan mereka sering melaporkan penderitaan maupun kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi pada OIC (*Organisation of the Islamic Conference*). Ketika Presiden Marcos mengumumkan darurat perang di tahun 1972, MNLF tetap melanjutkan gerakannya di bawah tanah.

Banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh bentrokan bersenjata sangat memprihatinkan negara-negara anggota OIC atas kondisi kaum Muslim di Filipina. Sebuah delegasi yang terdiri dari 4 menteri luar negeri dari Lybia, Saudi Arabia, Senegal, dan Somalia mengunjungi Filipina untuk membahas situasi Muslim dengan pemerintah Marcos. Keterlibatan dari negara-negara Islam dalam kasus Moro membuahkan perjanjian Tripoli pada 23 Desember 1976 yang ditandatangani di Tripoli, Lybia. Perjanjian ini memberikan peluang bagi pembentukan Mindanao sebagai suatu wilayah otonom yang meliputi 13 propinsi dan 9 kota. Sebagai akibatnya MNLF dipaksa untuk mengurangi tuntutan yang semula, dari merdeka penuh ke otonomi lokal. Perjanjian ini diharapkan dapat menciptakan perdamaian, yang mempertahankan tanah bangsa Moro sebagai bagian dari Republik Filipina.

Marcos menginterpretasikan otonomi sebagai urusan di dalam yang harus dipecahkan didalam kerangka kedaulatan nasional dan integritas teritorial Filipina. Marcos berkeras bahwa otonomi harus tunduk di bawah konstitusi Filipina. Ini berarti sebuah referendum perlu diadakan untuk menetapkan yang mana diantara 13 propinsi dan 9 kota yang ditentukan dalam perjanjian Tripoli dapat digolongkan sebagai wilayah otonom. MNLF dengan keras menolak usulan Marcos. Akibatnya gencatan senjata yang sudah dideklarasikan sebelumnya berakhir. Pertempuran berlanjut lagi di akhir tahun 1977 yang pada akhirnya membuat pemimpin MNLF, Nur Misuari, melarikan diri ke Timur Tengah.

Gagalnya perjanjian Tripoli merusak kredibilitas Nur Misuari, sebagai pimpinan MNLF. Nur Misuari ditantang oleh ketua MNLF untuk urusan luar Negeri, Hashim Salamat. Dia menuduh Nur Misuari sebagai orang yang gagal, korup, dan pendukung komunis. Tidak lama setelah pengasingan Nur Misuari, Hashim Salamat memisahkan diri dari MNLF dan mendirikan Front Pembebasan Islam Moro (*Moro Islamic Liberation Front/MILF*). Salamat mengklaim: "Kita menginginkan sistem politik Islam dan jalan hidup yang bisa dicapai melalui dakwah, tarbiyah, dan jihad". Baik MNLF dan MILF keduanya menempuh perang gerilya melawan rejim Marcos. Meskipun MNLF terpecah dengan terbentuknya MILF, tidak ada catatan tentang terjadinya bentrokan fisik antara MNLF dan MILF.

Di tahun 1980 kedua organisasi ini sama-sama mendukung Corazon Aquino ketika dia menggalang dukungan massa menuntut pemerintahan demokratis. Sebagai balasannya, Aquino menjanjikan untuk memberikan otonomi penuh bagi wilayah Mindanao bila dia terpilih sebagai Presiden. Ketika dia menjadi presiden di tahun 1986, Presiden Aquino mengeluarkan undang-undang baru yang mendeklarasikan berdirinya wilayah otonom bagi Muslim Mindanao. Namun MNLF tidak puas dengan keputusan ini karena undang-undang tersebut hanya menjamin otonomi bagi 5 provinsi dari 13 propinsi dan 9 kota yang tercantum dalam perjanjian Tripoli. Misuari akhirnya memanggil semua kelompok yang terpecah-pecah dalam berbagai faksi untuk bersatu dan memperbaharui perjuangan bersenjata mereka demi berdirinya Republik Bangsa Moro yang berdaulat.

Pengangkatan Fidel Ramos sebagai presiden Filipina di tahun 1992 memberikan harapan baru bagi Nur Misuari untuk meraih kembali prestisenya yang runtuh. Presiden Ramos membuka negosiasi dengan MNLF di tahun 1996. Persetujuan yang ditandatangani dengan MNLF menyatakan bahwa MNLF menjadi badan pengawas atas semua proyek pembangunan ekonomi di seluruh propinsi di Mindanao untuk tiga tahun. Dewan Perdamaian dan Pembangunan untuk Filipina Selatan didirikan dengan Nur Misuari sebagai gubernur wilayah. Perjanjian Ramos-MNLF membawa perdamaian karena terbukti berhasil mengakhiri perlawanan bersenjata di Mindanao.

Lain halnya Salamat, pimpinan MILF ini menyatakan bahwa otonomi yang diberikan pada bangsa Moro sangat bergantung pada otonomi macam apa yang diberikan pemerintah Filipina, dan juga figur atau pribadi yang mengelola otonomi dalam wilayah Mindanao. Salamat tetap bertahan dengan pendirian bahwa pemecahan yang paling jitu atas problem bangsa Moro adalah kemerdekaan penuh, lepas dari Filipina dan berdirinya negara Islam

Moro. Meskipun MNLF sudah melakukan terobosan dengan melakukan gencatan senjata, MILF tetap mempertahankan perjuangan bersenjata. MILF tetap tidak puas dengan pemberian otonomi. Organisasi ini tetap menuntut kemerdekaan penuh bagi Mindanao. Ini membuat Presiden Ramos mengadakan negosiasi dengannya. Meski belum berhasil merebut kemerdekaan, perjuangan Moro melalui MNLF berhasil mencapai otonomi sebagian, meski tidak mencakup seluruh propinsi dan kota sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Tripoli.

Internasionalisasi Gerakan Separatisme

Sebuah gerakan perlawanan sangat membutuhkan institusi yang stabil, kompleks, dan adaptabel. Muslim Moro memiliki organisasi yang mawadahi gerakan perlawanan mereka terhadap penguasa. Sebuah organisasi yang kuat juga tercermin dari potensinya untuk menggalang dukungan dari dalam maupun luar negeri. Organisasi pembebasan Moro menggalang dukungan domestik maupun internasional guna membantu meraih tujuan pergerakannya. Anggota-anggota gerakan pembebasan Moro di dalam wilayahnya sendiri menjalin kohesi sosial yang bersumber dari kesamaan identitas (bahasa, agama, dan suku) yang ditunjang pula oleh rasa senasib: sebagai minoritas yang tertindas oleh kebijakan-kebijakan penguasa.

Dalam skala regional, mereka berhasil menarik perhatian dari negara-negara tetangga mereka. Misalnya, MNLF berhasil menarik dukungan yang kuat dari Malaysia, terutama ketika pemerintah Filipina mengajukan tuntutan atas Sabah, pemerintah Malaysia menjawab tuntutan ini dengan memberikan dukungan terhadap MNLF, melihat potensi dari gerakan ini sebagai batu loncatan yang dapat menyelesaikan masalah Sabah. Semenjak berdirinya, MNLF memang telah menjalin hubungan hangat dengan Malaysia. Pemerintah Filipina telah menyadari hal ini. Tambahan pula, banyak pekerja Filipina yang bekerja di Malaysia. Pendapatan mereka merupakan salah satu sumber devisa Filipina. Oleh karenanya atas desakan pemerintah Malaysia, pemerintahan Presiden Ramos akhirnya menyetujui untuk mengadakan perjanjian damai dengan MNLF di tahun 1996.

Akhirnya perjuangan internasional dari gerakan Moro menghasilkan pula dukungan dari OIC, negara-negara barat, PBB, dan Amnesti Internasional untuk hak asasi manusia. Pada Konferensi Islam ke-enam yang diselenggarakan di Jedah Juli 1975, MNLF mendapat pengakuan dari OIC. Negara-negara Muslim yang tergabung dalam OIC mendesak pemerintah Filipina untuk bernegosiasi dengan wakil-wakil MNLF. Filipina tidak bisa

menolak tuntutan ini mengingat 80 persen minyak di Manila dan sejumlah besar perdagangan luar negerinya berasal dari negara-negara Timur Tengah. Penandatanganan Tripoli 1996 justru karena tekanan dari OIC, meskipun perjanjian ini hanya memuaskan sebagian dari bangsa Moro. Perjanjian Tripoli hanya menjamin otonomi. Sebagian dari pejuang Moro yang menghendaki kemerdekaan penuh, tidak puas hanya dengan pemberian otonomi.

Pembentukan Kelompok Abu Sayyaf merupakan contoh yang sangat tepat dari internasionalisasi gerakan-gerakan etnik setempat. Kelompok ini, meski pada mula berdirinya dan mode perjuangannya bersifat lokal, dalam episode selanjutnya bersekutu dengan gerakan terorisme internasional, Al-Qaeda.

Kelompok intelah mengirimkan tentaranya ke Afghanistan untuk latihan militer. Beberapa nalist militer mengidentifikasi kelompok ini sebagai *terrorist cells* dari Osama bin Laden yang menyebar dari Algeria ke Filipina (Elliot 2001: 35).

Sebagai akibat dari internasionalisasi ini, konflik etnik-politik di Filipina bukan hanya melibatkan dan menjadi obyek kepedulian bangsa Filipino saja. Korban-korban sipil yang berjatuh di tangan Abu Sayyaf, seperti penculikan, penyanderaan dan pembunuhan yang berasal dari Amerika, Jerman, Perancis, Afrika Selatan, Inggris, Malaysia, Cina, dll telah mengundang reaksi keras masyarakat internasional. Pemerintah Filipina sendiri telah menunjuk duta besar Libya, kelompok pebisnis dari Malaysia sebagai mediator untuk mengatasi masalah ini.

Gerakan-gerakan etnik lokal ternyata harus menjalin dengan gerakan-gerakan internasional lainnya agar kelompoknya tetap bisa hidup dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Ini lah cara satu-satunya untuk menggalang dana luar negeri, memperoleh dukungan dari para simpatisan di luar negeri, dan memicu intervensi dari negara (pihak) ketiga untuk secara bersama-sama menanggulangi permasalahan mereka. Peristiwa 11 September di New York dan pengeboman AS atas kekuatan-keuatan Taliban di Afghanistan makin memperkeruh situasi. Peristiwa ini membawa dilema bagi gerakan separatisme Moro. Di satu pihak MILF harus menjaga jarak dengan gerakan Islam radikal atau menghadapi sanksi dari negara-negara slam yang lebih moderat, di pihak lain Abu Sayyaf (bagian militan dari MILF) telah mengumandangkan jihad melawan baik pemerintah Filipina maupun AS. Dalam konteks globalisasi yang mempopulerkan penataan ruang

atau lingkup hidup yang semakin tak mengenal batas-batas geografis, penyebaran misi perjuangan separatisme etnik, baik yang berorientasi terorisme atau tidak, telah bergerak melampaui batas-batas wilayah kenegaraan maupun kebangsaan itu sendiri.

Sebetulnya di samping gerakan Bangsa Moro, suku-suku asli yang juga menuntut penentuan nasib sendiri di atas wilayah yang mereka tinggali, seperti mereka yang tinggal di wilayah pegunungan Cordillera, yang membentuk Cordillera People's Liberation Army (CPLA). Suku Manobo. Begitu pula dengan orang-orang Monobo yang tinggal di Timur Laut Mindanao. Mereka merupakan kelompok terbesar dari orang asli (Lumads) - yang meliputi 300.000 orang - dan siap membela wakil-wakil mereka yang membentuk Bagani Force Liberation Front. Untuk membatasi masalah dan cakupan penelitian, untuk sementara penelitian disini akan lebih difokuskan pada gerak-gerakan Bangsa Moro, dengan tidak melupakan gerakan etnik lain sebagai ilustrasi perbandingan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, beberapa pertanyaan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Sejauh mana kolonisasi membawa dampak terciptanya multi-kulturalisme di Filipina?
2. Sejauh mana rezim kolonial dan pasca kolonial (merdeka) menyumbang bagi terciptanya polarisasi politik, ekonomi, dan budaya di Filipina?
3. Sejauh mana politik migrasi yang disertai dengan asimilasi paksa di masa kolonial dan pasca kolonial menyumbang bagi perubahan komposisi etnis yang tidak berimbang di propinsi-propinsi di Filipina, khususnya Mindanao?
4. Sejauh mana penguasa kolonial dan pasca kolonial berperan dalam memainkan proporsi komposisi etnik yang berimbang di sektor-sektor lapangan kehidupan yang penting, seperti ekonomi, jabatan politik dan pemerintahan?
5. Sejauh mana negara berperan dalam konflik mayoritas Katolik-Filipino dengan minoritas Muslim Moro?
6. Bagaimana masing-masing rezim pasca kolonial (Marcos, Aquino, Ramos, Arroyo) mengatasi (kooptasi, rekonsiliasi, dan negosiasi) kekuatan-kekuatan separatisme di Mindanao? Apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara mereka?
7. Sejauh mana masyarakat dan organisasi-organisasi internasional (PBB, OKI, ASEAN) membantu penyelesaian masalah Moro? Apakah terdapat perbedaan gradasi dalam penyelesaian masalah?

- 8 Bagaimana karakteristik kelompok garis keras pimpinan Abu Sayyaf dan bagaimana pemerintah Filipina menghadapinya? Sejauh mana peran komunitas dan organisasi internasional dalam merespon aktivitas kelompok ini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Melihat gambaran tentang pengaruh yang ditimbulkan oleh kolonisasi dalam perkembangan kehidupan politik, ekonomi, dan budaya di Filipina.
2. Melihat gambaran tentang peranan aktor-aktor dalam manajemen konflik di Filipina.

Secara khusus, penelitian ini juga dimaksudkan untuk:

- 1 Memaparkan secara komparatif-analitik tentang potensi konflik dari multikulturalisme (multi agama dan etnik) di tataran masyarakat, maupun dalam hubungan antara kelompok-kelompok masyarakat dengan negara.
- 2 Memberikan typology dan paradigma konflik etnik, konflik antar Pusat dan propinsi Mindanao, yang bersinergi dengan munculnya gerakan-gerakan separatisme
- 3 Memaparkan secara komparatif-analitik tentang bentuk-bentuk atau model hegemoni negara pra dan pasca kolonial terhadap kelompok Minoritas di Filipina
- 4 Menjelaskan korelasi antara hegemoni negara dengan separatisme
- 5 Menerangkan hubungan antara posisi mayoritas dan minoritas di dalam spektrum peran negara. Menjelaskan potensi negara dalam memperkecil atau memperbesar skala konflik
- 6 Memaparkan karakteristik dan intensitas konflik antara minoritas dengan penguasa yang merepresentasikan kepentingan mayoritas.
- 7 Menjelaskan secara komparatif karakteristik dan potensi (kemampuan) masing-masing gerakan Muslim Moro dalam mengorganisir gerakan perlawanan dalam wadah organisasi yang solid, memiliki kohesi (ikatan kelompok) yang kuat, dan potensi untuk mengundang dukungan internasional. Membandingkan target yang ingin dicapai oleh masing-masing organisasi pemberontakan, dan sejauh mana mereka dapat mencapai tujuannya.
- 9 Menjelaskan keterlibatan masyarakat, negara, dan organisasi internasional dalam penyelesaian masalah Moro.

D. Kerangka Analisis

Prof Ayabe memberi 3 tipologi model yang bisa dijadikan pilihan untuk menanggulangi permasalahan dikotomi maupun konflik antar etnik di dalam masyarakat multi-etnik. Pertama, etnik mayoritas memainkan peran kolonialistik, menempatkan dirinya sebagai dominan culture di atas budaya-budaya dari etnik minoritas. Dalam konteks ini budaya etnik minoritas diasimilasikan (dikorbankan) - secara paksa atau sukarela (*forced or voluntary asimilation*) untuk melebur ke dalam budaya mayoritas. Dan etnik minoritas menganggap budaya mayoritas sebagai identitas barunya. Proses asimilasi yang berlangsung disini bukan hanya bersifat kultural, tetapi juga politik dan ekonomi. Dalam kasus dimana mayoritas Kristen yang dominan, mereka yang mempunyai kecenderungan centrifugal akan melepaskan dirinya dan melebur kedalam sistem politik dan ekonomi dari masyarakat mayoritas, berakulturasi dan menjadi bagian dalam struktur masyarakat yang dominan.

Kedua, amalgamasi terjadi apabila tidak ada satu kelompok etnik pun yang dominan. Dengan kata lain masing-masing kelompok etnik yang berbeda memiliki posisi yang relatif setara (*no dominant culture*). Dalam situasi ini terjadi melti pot, dimana masing-masing kelompok etnik yang berbeda dalam interaksinya satu sama lain sama-sama mengalami proses win some and lose some. Disini akan timbul apa yang disebut budaya campuran (*hybrid culture*) yang sama-sama menjadi identitas baru bagi kelompok-kelompok etnik tersebut. Prinsip amalgamasi ini juga dapat diterapkan dalam lingkup ekonomi maupun politik, dimana proses take and give terus berlangsung sampai akhirnya tercapai pendekatan-pendekatan politik dan ekonomi yang baru sebagai hasil sinergi (amalgamasi) atau percampuran perbedaan pendapat, kepentingan, akses yang tersedia.

Ketiga adalah multi-kulturalisme dimana tak ada lagi dikotomi mayoritas dan minoritas. Tak ada lagi perbedaan fundamental anatara kelompok etnik. Ini berarti diskriminasi, marginalisasi yang menghasilkan underclasses dan under-pivilege tidak hidup didalam bangsa, karena setiap kelompok etnik diperlakukan relatif sejajar, sama rata di atas dasar penghormatan persamaan hak, dan toleransi. Interaksi antar etnik selalu diwarnai oleh prinsip equity dan equality. Prinsip kesamaan dan toleransi merupakan aturan main yang senantiasa hidup atau diberdayakan di dalam setiap model interaksi di setiap aspek kehidupan. Setiap kelompok etnik disadarkan sebagai anggota satu bangsa berdasarkan prinsip equality, oleh karenanya semuanya dituntut untuk menyumbangkan bagiannya

dalam pembangunan ekonomi dan menikmati bersama hasil-hasilnya. Dalam mode ini, toleransi terhadap pluralisme politik dengan berbagai latar belakang ideologi di dalamnya adalah keniscayaan. Akibatnya, di level nation-state akan sangat marak diwarnai oleh proses perdebatan politik, namun di tingkat bawah tidak merasakan bahwa satu kelompok lebih diistimewakan atau ditinggikan dibanding yang lain berdasarkan kriteria etnik.

Ketiga mode ini tidak lah berlaku secara *mutually exclusive*. Sebagaimana pergantian rezim yang bisa terjadi dalam berbagai episode, pilihan-pilihan yang dilontarkan diatas bisa berganti seiring dengan kurun waktu, perubahan sistem pemerintahan, perimbangan kekuatan antara yang memerintah dengan yang diperintah, penguatan civil society, dsb. Huntington¹ mungkin benar ketika dia menyatakan bahwa faktor historis (kolonisasi), politik, ekonomi dan sosial merupakan bibit-bibit potensial untuk membangkitkan gerakan separatis. Tetapi keberhasilan dari suatu gerakan sangat bergantung sejauh mana:

1. Pemerintah mampu mengakomodasikan tuntutan-tuntutan kelompok yang merasa terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah yang sangat diskriminatif dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial terhadap kelompok minoritas.
2. Persatuan (solidaritas) dan basis dukungan dari dalam dan luar yang menambah tingginya kekuatan perlawanan dalam kelompok. Semakin status dan hak-hak minoritas dipinggirkan, semakin kuat resistensi kelompok terhadap penguasa yang memojokkan mereka untuk memperjuangkan/memperoleh kembali hak-hak mereka yang hilang atau dirampas oleh penguasa

Kohesi yang didasarkan oleh identitas yang sama (agama, bahasa, etnisitas) bukan merupakan satu-satunya faktor penentu terbentuknya suatu gerakan dan keberhasilan gerakan tersebut untuk menggali dukungan dari dalam kelompok masyarakatnya sendiri. Tingginya intensitas dari pelanggaran hak-hak politik, kultural, dan ekonomi yang dilakukan negara (penguasa) dalam kelompok minoritas lebih merupakan faktor yang mengakumulasi resistensi dan dorongan separatisme bagi kelompok minoritas. Dalam kaitan ini pendapat Gurr² yang mengungkapkan bahwa sebuah gerakan separatis akan

¹ Samuel P. Huntington. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press. Dalam Syed Serajul Islam. 1998. "The Islamic Independence Movements in Patani of Thailand and Mindanao of the Philipines. *Asian Survey*.v 38. No 5.

² Ted Robert Gurr. 1993. *Minorities at Risks: A Global View of Ethno Political Conflicts*. Washington D.C.: United States Institute of Peace. Dalam Syed Serajul Islam. 1998. "The Islamic Independence Movements in Patani of Thailand and Mindanao of the Philipines. *Asian Survey*.v 38. No 5.

menjadi agresif apabila rasa tertindas dan terpojokkan dari hak-hak yang semestinya dapat mereka nikmati semakin besar, dengan demikian dapat dibenarkan

E. Metodologi Penelitian

Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-analitik untuk menjelaskan typologi dan paradigma konflik etnik; karakteristik dan intensitas konflik antara minoritas dengan penguasa; keterlibatan masyarakat, negara dan organisasi internasional dalam menyelesaikan masalah Moro; korelasi antara hegemoni negara dengan bibit-bibit separatisme; dan korelasi antara posisi mayoritas di dalam spektrum peran negara.

Untuk menjelaskan potensi konflik dari multikulturalisme di tataran masyarakat maupun dalam hubungan antar kelompok-kelompok masyarakat dengan negara, bentuk-bentuk atau model hegemoni negara pra dan pasca kolonial terhadap kelompok Minoritas, serta karakteristik dan potensi masing-masing gerakan Muslim Moro dalam mengorganisir gerakan perlawanan, digunakan metodologi komparatif-analitik. Metodologi tersebut di atas menggunakan pendekatan multidisipliner, yang meliputi ekonomi, hukum, politik, sejarah dan budaya. Data yang diperoleh, baik kuantitatif maupun kualitatif akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan Data dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua cara yaitu studi literatur dan wawancara mendalam. Studi literatur dilaksanakan di Indonesia dan Filipina untuk mengumpulkan data-data sekunder. Sementara wawancara mendalam dilakukan dpada tanggal 24 Juni – 5 Juli 2003 di Manila.

Penelitian lapangan hanya dilakukan di Manila mengingat situasi keamanan di Mindanao yang belum stabil. Pada waktu penelitian dilakukan, Angkatan Bersenjata sedang menggelar operasi Balikatan untuk memerangi kelompok Abu Sayyaf dan MILF. Namun demikian Tim Peneliti tetap melakukan wawancara dengan sejumlah mahasiswa dan cendekiawan yang berasal dari Mindanao untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.

F. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian merupakan deskripsi analitik dari permasalahan penelitian. Adapun intisari setiap bab dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Selain latar belakang dan perumusan masalah, bagian ini mendeskripsikan mengenai pendekatan dan kerangka teoritik yang digunakan. Kerangka teoritik yang akan dibahas berkaitan dengan multikulturalisme.

2. Demografi dan Sejarah Kolonisasi

Bagian ini menerangkan tentang gambaran umum negara dan masyarakat Filipina antara lain: kedudukan geografis, sejarah berdirinya negara, administrasi pemerintahan, kependudukan, perekonomian, dan kondisi sosial politik. Selain itu, bab ini menggambarkan sejarah Filipina yang mencakup antara lain masa sebelum kolonialisme, penyebaran agama islam, imperialisme spanyol, imperialisme Amerika Serikat, sampai perkembangan negara Filipina.

3. Perkembangan Gerakan Separatis

Bab ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya gerakan separatis antara lain yaitu faktor sejarah, sosial/ budaya, ekonomi, dan politik. Adapun bagian kedua menggambarkan perkembangan gerakan separatis yang dimulai dari MIM kemudian dilanjutkan oleh MNLF, MILF, dan Abu Sayaf.

4. Gerakan Pembebasan Moro dan Perjanjian Damai

Bagian ini mencoba menerangkan peranan-peranan stake holder dalam resolusi konflik. Selain itu, juga akan dideskripsikan mengenai keterkaitan kelompok-kelompok gerakan separatis dengan organisasi-organisasi internasional serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di samping itu juga akan dibahas mengenai peranan Amerika Serikat dalam merespon konflik ini terutama dalam perang melawan terorisme.

5. Agenda Multikulturalisme: Alternatif Resolusi Konflik dan Manajemen Politik Dalam Hubungan Manila-Moro

Bab ini membandingkan antara kerangka teori multikulturalisme dengan fakta-fakta di lapangan yang berkaitan dengan praksis masyarakat multikulturalisme. Juga akan dibandingkan antara praktek multikulturalisme dan fenomena separatisme dalam kaitanya dengan pembangunan negara bangsa.

6. Kesimpulan

Bagian ini mencoba menarik benang merah antara bab yang satu dengan bab lain serta megajukan *lesson learned* dan rekomendasi yang merupakan hasil studi.

BAB II

DEMOGRAFI DAN SEJARAH KOLONISASI DI FILIPINA

Oleh
Lamijo dan Syafuan Rozi

A. Pendahuluan

Tidak beda jauh dengan Indonesia, Filipina pun mengalami penjajahan beratus-ratus tahun lamanya sebelum memperoleh kemerdekaan di tahun 1946. Penjajahan Spanyol selama lebih dari tiga abad di Filipina berhasil mengkristenkan penduduk Filipina, kecuali penduduk Moro di wilayah selatan yang beragama Islam. Islam telah lebih dulu tumbuh berkembang dan mengakar kuat di Mindanao sebelum Spanyol datang. Beberapa kesultanan telah berdiri kokoh di Filipina selatan jauh sebelum Spanyol menginjakkan kakinya di Filipina. Selama masa penjajahannya di Filipina, Spanyol tidak bisa menguasai wilayah Moro karena orang-orang muslim melakukan perlawanan yang gigih terhadap Spanyol yang ingin menjajah dan meyebarakan agama Kristen.

Penjajahan Spanyol atas Filipina berakhir tahun 1898 ketika kalah perang melawan Amerika. Berdasarkan Perjanjian Paris tahun 1898, Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika Serikat, termasuk wilayah Moro. Pendekatan yang lebih persuasif dari Amerika Serikat terhadap orang-orang muslim Moro untuk mengintegrasikan mereka dengan orang-orang Filipina di utara menunjukkan kemanjuran. Perlahan namun pasti Amerika “berhasil” menaklukkan Moro.

Namun, penyatuan Bangsamoro ke Filipina secara tidak syah dan tanpa ada koordinasi dengan penduduk Moro menanamkan bibit-bibit separatisme. Bangsamoro berpendapat bahwa secara historis, kultural, dan agama berbeda dengan orang-orang Filipina di utara. Kondisi demikian diperburuk dengan adanya berbagai diskriminasi dan ketidakadilan

dalam berbagai bidang yang diterima oleh bangsamoro dari pemerintah. Selain itu, orang Filipino pun menganggap lebih rendah bangsamoro, tidak beradab, dan sebagai budak.³ Migrasi besar-besaran orang Kristen ke selatan dan pencaplokan tanah orang-orang muslim oleh orang Kristen yang didukung oleh pemerintah juga semakin menguatkan semangat untuk memisahkan diri dengan pusat.

Uraian ini berusaha untuk memberikan sedikit gambaran tentang kondisi geografis, demografi dan, sejarah kolonisasi Filipina. Analisis dan perspektif sejarah dalam hal ini diperlukan untuk mengetahui korelasi pengalaman historis Filipina, khususnya Bangsamoro dalam perjalanan konflik yang terjadi di Moro.

B. Keadaan Geografi dan Demografi

1. Keadaan Geografi

Filipina merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 7.107 pulau. Negara Filipina membentang sepanjang 1.851 km dari utara ke selatan dan 1.107 km dari timur ke barat. Secara keseluruhan, wilayah Filipina berada di utara equator, yaitu di antara 5^o LU sampai 20^o LU. Pulau paling utara adalah kepulauan Batanes, berjarak sekitar 161 km dari ujung selatan Taiwan, dan pulau paling selatan adalah kepulauan Tawi-Tawi yang berjarak sekitar 25 km dari Kalimantan. Wilayah Filipina di sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan, di sebelah utara berbatasan dengan Terusan Bashi, sebelah timur berbatasan dengan Laut Pasifik, serta di sebelah selatan berbatasan dengan laut Sulawesi dan laut Sulu⁴

Filipina memiliki luas wilayah sekitar 301.000 km persegi, sedikit lebih besar dari Arizona. Panjang pantai Filipina sekitar 36.289 km. Ada 11(sebelas) pulau besar di Filipina

³ Salah satu bukti sikap memandang rendah itu adalah bahwa perjuangan gigih orang-orang muslim Moro tidak pernah dianggap oleh orang-orang Filipina sebagai bagian dari perjuangan Filipina untuk merdeka, sebagaimana diungkapkan oleh Cesar Majul di tahun 1966: *"If the Philippine revolution is to be considered not just a movement of some Christian natives against Spanish colonialism, but by the Filipino people, then there is no reason why more than three centuries of Muslim struggle against Spain and America cannot be considered as significant part of the Filipino struggle for freedom"* (Cesar Majul, 1966)

⁴ William Larousse, *Walking Together Seeking Peace. The Local Church of Mindanao-Sulu Journeying in Dialogue with the Muslim Community (1965-2000)* (Quezon City: Claretian Publication Inc.. 2001), hlm. 9

yang merupakan 96% dari total wilayah Filipina. Pulau terbesar adalah Luzon dengan luas wilayah 75.710 km persegi. Berikutnya adalah pulau Mindanao (59.418 km persegi), Palawan (9.170 km persegi), Samar (8.547 km persegi), Panay (7.703 km persegi), Leyte (4.966 km persegi), Cebu (3.033 km persegi), Bohol (2.534 km persegi), dan Masbate (2.529 km persegi).⁵

Secara topografi, Filipina dibagi menjadi tiga daerah, yaitu Luzon, Visayas, dan Mindanao. Kondisi alam Filipina bergunung-gunung, yang membentuk rangkaian pegunungan di beberapa pulau besar, dengan gunung tertinggi adalah gunung Apo (2.909 m) di Mindanao. Gunung api di Filipina tercatat ada 50 buah, dan 12 buah di antaranya masih aktif. Gunung yang paling terkenal di Filipina adalah gunung Mayon, yaitu sebuah gunung yang terkenal di dunia karena bentuk kerucutnya yang sempurna. Sementara gunung api Taal merupakan yang terunik di dunia, dan dianggap sebagai gunung api yang terendah di dunia, karena puncaknya lebih rendah dari garis tinggi air danau Taal. Filipina tidak memiliki banyak sungai. Sungai terbesar di Filipina adalah sungai Mindanao, sedangkan yang terpanjang adalah sungai Cagayan (270 km) yang terdapat di Luzon bagian utara. Selain itu juga ada sungai Pasig yang membelah kota Manila, sungai Agno dan Pampangan yang mampu mengairi areal yang cukup luas di wilayah Luzon tengah.

Iklim di Filipina secara umum dibagi menjadi dua, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau terjadi dari bulan Desember hingga Mei dan musim hujan berlangsung dari Juni hingga Nopember. Curah hujan rata-rata berkisar dari 40-120 inchi. Sementara angin topan bertiup dari Juli hingga September. Angin topan, secara local disebut *bagyos*, yang terjadi setiap tahun di Filipina mengakibatkan kerusakan besar bagi pertanian, perkapalan, dan gedung-gedung. Hanya Mindanao bagian selatan dan kepulauan Jolo yang relatif terbebas dari angin topan ini.

Secara administratif, Filipina saat ini terbagi atas 12 Region, yang disebut Region I hingga Region XIII, ditambah dengan 4 daerah di luar ke-12 Region itu, yaitu National Capital Region (NCR), Cordillera Administrative Region (CAR), Caraga Region, dan Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM). Kedua belas Region itu adalah: Ilocos (I), Cagayan Valley (II), Central Luzon (III), Southern Tagalog (IV), Bicol (V), Western Visayas

⁵ Sumber: www.eecs.berkeley.edu/tito/philip.html.

(VI), Central Visayas (VII), Eastern Visayas (VIII), Western Mindanao (IX), Northern Mindanao (X), Southern Mindanao (XI), dan Central Mindanao (XII).

Filipina juga dibagi menjadi 77 propinsi, 1.524 kotamadya/kabupaten, dan 41.940 barangay. Sebanyak 37 propinsi terletak di Luzon, 16 propinsi di Visayas, dan 24 propinsi berada di Mindanao. Di antara dua belas region yang ada di Filipina, region IV (Southern Tagalog) memiliki wilayah paling luas, yaitu 46.924,2 km persegi, sedangkan region I (Ilocos) merupakan region terkecil dengan luas 12.840,2 km persegi. Sementara empat daerah lain di luar dua belas region itu, NCR merupakan wilayah yang paling kecil, sekitar 636 km persegi, tetapi penduduknya paling padat. Berdasar sensus tahun 2000 penduduk NCR berjumlah 9.932.560 jiwa.⁶

2. Demografi

Filipina, yang oleh Jose Rizal pernah dijuluki sebagai "*pearl of the orient seas*", merupakan negara yang memiliki tradisi besar, yaitu antara Islam dan Kristen (Katholik), yang memiliki dampak yang signifikan bagi pembangunan politik, sosial, budaya, dan ekonomi dalam lintasan sejarah Filipina (Samuel K. Tan, 1995:1). Filipina dihuni oleh lebih dari 75 kelompok etnis. Sebagian besar (95 %) penduduk Filipina merupakan keturunan Melayu, di mana saat ini sebanyak 91 % merupakan kelompok Melayu Kristen (91 %), dan 4 % Melayu Muslim. Selebihnya adalah Cina (1,5 %), dan kelompok etnis yang lain sebesar 3 %.⁷

Kelompok-kelompok etnis yang ada di Filipina adalah sebagai berikut:

1. Kelompok etnis yang berada di Pulau Luzon, antara lain:
Ivatan/Itbayat, Ilocano, Tinggian, Apayao, Kalinga, Balangao, Kankanaey, Kankanaey, Bago, Bontoc, Ifugao, Ibaloi, Ikalahan/Kalanguya, Iwak, Isinay, Pangasinan, Ga'dang, Ibanag, Itawit, Malaweg, Yogad, Ilongot, Kampapangan, Palanan, Tagalog, Bicol, Negrito, dan Sambal.

¹ Republic of the Philippine. General information. 2001.

² Sumber: www.student.gwhs.org.

2. Kelompok etnis yang berada di Kepulauan Visayas, antara lain:
Masbateno, Abaknon, Rombloanon, Bantoanon, Aklanon, Kiniray-a/Hamtikanon, Hiligaynon, Sulod, Bukidnon, Boholano, Cebuano, dan Waray.
3. Kelompok etnis yang berada di Pulau Mindanao antara lain: Manabo, Sangil/Sangir, Maranao, Ilanun, Magindanao, Tiruray, Tasaday, T'boli, B'laan, Kamiguin, Subanun, Mamanwa, Butuanon, Kamayo, Bagobo, Mandaya, Kalagan, dan Kalibugan.
4. Kelompok etnis yang mendiami Pulau Palawan antara lain:
Tagbanwa, Agutayanen, Kuyonen, Pala'wan, Molbog, Batak, dan Tau't Batu.
5. Kelompok etnis yang mendiami Pulau Sulu/Tawi-tawi antara lain:
Yakan, Sama, Sama Dilaut, Tausug, dan Jama Mapun

Selain kelompok-kelompok etnis tersebut, ada juga etnis Mangyan yang mendiami wilayah Mindoro⁸ dan etnis-etnis lain yang tersebar diberbagai penjuru Filipina.

Penduduk asli Filipina merupakan orang-orang yang telah mendiami wilayah Filipina sejak awal. Sampai kini, setidaknya ada tiga suku bangsa yang dianggap sebagai penduduk asli Filipina, yaitu.

1. Negrito :
Suku bangsa negrito ini mendiami wilayah sekitar laut Sulu. Mereka adalah suku bangsa pertama yang mendiami wilayah Filipina. Mereka mengembangkan pertanian dataran rendah, namun kemudian terdesak ke daerah pegunungan.
2. Melayu :
Suku bangsa Melayu merupakan kelompok penduduk kedua yang datang ke Filipina. Mereka datang dan kemudian melakukan kawin campur dengan orang negrito. Selanjutnya mereka terbagi ke dalam berbagai kelompok yang berbeda dan memencar ke berbagai penjuru Filipina.
3. Igorot dan Ifugao :
Orang-orang Igorot dan Ifugao mendiami wilayah pegunungan Cordillera di bagian utara Filipina. Mereka sejak beratus-ratus tahun silam terkenal sebagai petani terasiring di Banaue⁹. Daerah tersebut saat ini merupakan salah satu tempat wisata yang favorit.

⁸ Jesus T. Peralta. *Glimpses Peoples of the Philippines*. (Manila: National Commission for Culture and the Arts. 2000). hlm. 32-33.

⁹ Sumber: www.student.gwhs.org.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Filipina adalah 76.498.735 jiwa, atau naik sebesar 7.884.573 jiwa (11,5 %) dari sensus tahun 1995 yang berjumlah 68.614.162 jiwa. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk Filipina dari tahun 1995-2000 adalah 2,36 %. Kepadatan penduduk Filipina tahun 2000 adalah 77 per kilometer persegi.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Filipina Menurut Beberapa Sensus

Sensus	Jumlah (dalam ribuan)
1903	7.635
1918	10.314
1939	16.000
1948	19.234
1960	27.088
1970	36.684
1975	42.071
1980	48.098
1990	60.703
1995	68.614
2000	76.499

Sumber: Republic of the Philippines General Information

Mayoritas penduduk Filipina menganut agama Kristen Katolik (83 %), kemudian Kristen Protestan (9 %), Islam (5 %), Budha dan lain-lain sebanyak 3 %. Penduduk Muslim Filipina terkonsentrasi di wilayah Filipina selatan, terutama di Mindanao, Palawan, Sulu, dan Tawi-tawi.

Di Mindanao ada setidaknya 13 kelompok ethnolingustik Moro berbeda. Ada tiga kelompok ethnolingistik yang paling besar dan secara politik paling dominan, yaitu Maguindanao, Maranao, dan Tausug. Etnis Maguindanao sebagian besar mendiami wilayah

propinsi Cotabato (Maguindanao, Sultan Kudarat, Cotabato utara dan selatan). Etnis Maranao mendiami propinsi Lanao del Sur dan Lanao del Norte, sedangkan etnis Tausug mendiami kepulauan Sulu. Kelompok ethnolinguistik lainnya adalah Yakan, Samal, Badjau, Kalagan, Sangil, Iranum/Ilanun, Palawani, Melebugnon, Kalibogan, dan Jama Mapun.

Tabel 2
Penduduk Muslim Filipina Berdasarkan Sensus tahun 1980

Kelompok Etnolinguistik	Jumlah	Persentase
Maranao (Malanao)	742.962	29,7
Maguindanao	644.548	25,7
Tausug (Jolo, Sulu)	502.918	20,1
Sama (Sama'a, Samal)	244.160	9,7
Yakan	196.000	7,8
Sangil (Sangir)	77.000	3,2
Badjao (Samal Laut)	28.536	1,1
Kolibugan (Kalibugan)	15.417	0,6
Jama Mapun (Samal Cagayan)	14.347	0,6
Iranum (Ilanun)	12.542	0,5
Palawanon (Muslim Pinalawan)	10.500	0,4
Kalagan (Muslim Tagakaolo)	7.902	0,3
Molbog (Melebuganon)	7.500	0,3
Total	2.504.332	100

Sumber: Larousse, William. 2001. *Walking Together Seeking Peace. The Local Church of Mindanao-Sulu Journeying in Dialogue with the Muslim Community (1965-2000)*. Quezon City: Claretian Publication Inc.

Tabel 3
Distribusi Penduduk Muslim Berdasarkan Suku dan Region

Region	Maranao	Maguindanao	Tausug	Yakan	Iranon	Suku lain	Total
I	25733	9855	16098	18181	-	39635	109502
II	30743	21341	14551	3760	2910	23701	97006
III	33277	29821	15274	5455	6364	37093	127284
IV	66260	50859	39308	37008	26953	164654	385042
V	37700	19670	24587	11144	16391	54422	163914
VI	40098	25049	13121	7892	-	33121	119281
VII	69738	43909	30995	29075	23246	61327	258290
VIII	27702	41802	4436	39605	4402	54007	171954
IX	58065	182851	932249	354957	66527	350576	1945225
X	286473	61160	14673	4650	13441	17261	397658
XI	61076	141024	24378	27269	16557	224677	494981
XII	999724	902289	9135	6496	101495	10757	2029896
NCR	108096	60053	51045	33056	3603	44414	300267
Total	1844685	1589683	1189850	578548	281889	1115645	6600300

*Sumber: Survey yang dilakukan oleh OMA Regional Offices, 1992.

*Suku-suku lain adalah suku yang masuk Islam, seperti Samal, Sangil, Kalibungan, Molbog, dan sebagainya.

Penduduk Muslim di Filipina selatan mengklaim diri mereka sebagai bangsamoro, yang memiliki identitas tersendiri, baik dari segi sejarah maupun secara sosio kultural berbeda dengan orang Filipino di utara. Prof. Abu Bakar Asiri dari Asian Studies Center, University of Philippines menjelaskan bahwa konsep Bangsamoro muncul sejak tahun 70-an, saat Nur Misuari mulai menanjak kariernya di panggung politik. Namun, pemerintah Filipina sendiri menyebut orang selatan sebagai orang Mindanao, yaitu suatu identitas bagi orang-orang yang tinggal di Mindanao, baik itu Islam maupun non Islam. Konsep Bangsamoro dan Konsep Mindanao ini masih jadi pertentangan antara pemerintah dan orang-orang Islam Moro.

"Mindanaoan is a concept for whatever they are muslim or not. It's a identity of Muslim Mindanao. But, the people (muslim) refused to be called Mindanaoan. They prefer to be called Bangsamoro. If we accept Mindanaoan concept, we wouldnot like as a muslim. By using Bangsamoro concept, we could practice Islamic rule daily, Islamic lifestyle, etc."

Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila rasa nasionalisme Bangsamoro telah melekat didasar hati setiap orang Moro.

“Sense of Moro Nationalism has been embedded in the bottom of heart of every Bangsamoro”¹⁰

Adanya rasa nasionalisme yang tinggi di antara Bangsamoro mampu menghilangkan rasa kesukuan. Mereka merasa sebagai satu bangsamoro yang berada di Filipina, dan mereka sebenarnya tidak peduli dari suku mana mereka berasal¹¹. Memang diakui bahwa dalam hal-hal tertentu sampai sekarang masih tampak adanya persaingan di antara tiga suku bangsa terbesar di Mindanao, yaitu Tausug, Maranao, dan Maguindanao.

Pada masa dahulu di Mindanao memang ada tiga kelas dalam masyarakat, tapi sekarang mereka hanya dibedakan menjadi dua, yaitu orang kaya dan orang miskin. Sekarang tidak ada lagi perbudakan di Mindanao¹². Sistem sosial dalam masyarakat Moro dulu memang terbagi kedalam tiga kelas, yaitu kelas datu, orang bebas, dan kelas budak. Kelompok datu merupakan keturunan aristokrat, kaya, memiliki jabatan politik, dan status sosialnya tinggi. Orang bebas (*freeman*) merupakan orang yang tidak termasuk datu, tak memiliki kekayaan, tak punya prestise atau pengikut, tapi bukan budak. Sementara kelas budak merupakan kelas paling rendah, namun istilah budak di sini masih rancu dan tak selamanya menunjuk pada orang yang tak punya apa-apa, bisa diperjual belikan, dan sebagainya, sebab ada beberapa di antara mereka cukup kaya dan bahkan budak-budak dari Sulu sedikit lebih baik daripada orang bebas¹³ (Melvin Mednick, 1974:22). Walaupun begitu, sampai sekarang masih ada semacam tradisi tak tertulis dalam masyarakat Maranao, yang justru menjadi penghalang terciptanya penyatuan Bangsamoro, yaitu bahwa orang Maranao harus—sebesar mungkin—menikah dengan orang Maranao juga, dan tidak boleh menikah dengan orang Tausug, suku yang terkenal sebagai *warrior*.

¹⁰ Wawancara dengan Dr. Julkipli Wadi, dosen Institute of Islamic Studies, University of the Philippines, tanggal 27 Juni 2003.

¹¹ Wawancara dengan Gunaranao Musor, berasal dari suku Maranao, seorang mahasiswa pascasarjana University of the Philippines, tanggal 29 Juni 2003.

¹² Wawancara dengan Ayesa Sadain, dari suku Tausug, mahasiswi University of the Philippines, tanggal 29 Juni 2003.

¹³ Melvin Mednick, 1974. “Some Problems of Moro History and Political Organization”, dalam Peter G. Gowing dan Robert D. McAmis, *The Muslim Filipinos. Their History, Society, and Contemporary Problems*.

Dengan demikian, memang tidak mudah untuk menyatukan Islam di Filipina. Islam di Filipina memiliki banyak wajah, yang tercermin dari karakter masing-masing suku Islam di Selatan. Suku Maguindanao adalah suku dengan jumlah terbesar, suku Maranao terkenal sebagai pedagang ulung, dan suku Tausog terkenal sebagai suku yang paling radikal dan suka perang. Sementara kelompok Lumad merupakan istilah yang diciptakan oleh para sarjana untuk menyebut suku yang tidak beragama Islam maupun Kristen, sebab kelompok ini tidak memiliki ideologi seperti Islam ataupun Kristen. Orang sering salah mengerti tentang Bangsamoro. Banyak yang beranggapan bahwa semua yang tinggal di selatan Filipina itu muslim, padahal di selatan banyak pula yang Kristen dan tak beragama (Lumad).

*“Bangsamoro homeland is also including homeland of Lumads and Christian. But they still claim that it’s Bangsamoro homeland. By war, there will be two sides, the losing or the winning. But it’s not the way to solve Moro problem”.*¹⁴

Saat ini muslim di Filipina ibarat terjepit di antara dua karang. Mereka tidak bisa maju bergerak ke utara (Filipina), namun tidak bisa pula mundur bergabung dengan Sarawak (Malaysia). Hal demikian diungkapkan oleh Dr. Julkipli Wadi dari Institute of Islamic Studies, University of the Philippines.

“Muslim Philippine like a sandwich, have two barriers. They cannot move toward (Philippine), they cannot also move to backward (Sarawak/Malaysia)”.

Ada lebih dari 100 bahasa dan dialek berbeda di Filipina. Namun, bahasa Tagalog digunakan oleh lebih dari 15 juta orang Filipina, sedangkan bahasa Inggris dimengerti oleh tak kurang 13 juta penduduk Filipina. Adapun beberapa bahasa utama di Filipina antara lain:

1. Tagalog dan Cebuano; dipakai di Cebu, Bohol, Negros Occidental, Eastern Leyte, dan sebagian Mindanao,
2. Hiligaynon; dipakai di Negros Occidental dan propinsi Panay,
3. Waray; digunakan di Samar dan Wesren Leyte,

¹⁴ Miriam Ferrer, direktur The Third World Studies, University of Philippines. Wawancara tanggal 4 Juli 2003.

4. Bikolano; dipakai di propinsi Bikol,
5. Kampapangan; digunakan di Pampanga dan Tarlac,
6. Ilokano; digunakan di Pangasinan (bagian dari Tarlac), La Union dan propinsi Ilocos,
7. Maguidanao; digunakan di beberapa wilayah muslim, dan
8. Tausog; digunakan oleh orang-orang Islam Zamboanga dan kepulauan Sulu.

C. Sejarah Kolonisasi Filipina

1. Sejarah Masuknya Islam di Filipina

Kondisi Filipina sebelum masuknya agama Islam tidak banyak diketahui. Meskipun begitu, Filipina diperkirakan telah dihuni oleh manusia sejak dulu dengan ditemukannya sisa-sisa peninggalan manusia yang berusia sekitar 30.000 tahun di Palawan. Kelompok manusia pertama yang menghuni Filipina merupakan ras Mongoloid, ras yang sampai kini masih dominan di Filipina¹⁵. Sementara kelompok lain, yaitu Negrito atau Aeta (yang kemudian dianggap sebagai penduduk asli Filipina), dipercaya berasal dari Kalimantan dan Sumatra¹⁶. Mereka termasuk ras Austro-Melanesia, dengan warna kulit hitam, rambut coklat keriting, badan kecil, dan pendek. Orang Negrito saat ini masih bisa ditemukan di daerah pegunungan terpencil di Luzon, Palawan, Panay, Negros, dan Mindanao. Pada masa selanjutnya, orang-orang Melayu dari selatan mulai bergerak dalam jumlah yang besar ke Filipina. Mereka berlayar memakai perahu yang disebut *barangay*. Orang-orang Melayu menetap secara menyebar dan dipimpin oleh kepala suku yang dikenal dengan sebutan datuk. Komunitas ini juga disebut *barangay*.

Letak geografis Filipina yang strategis di sepanjang rute perdagangan dunia menarik Filipina secara perlahan masuk ke dalam rute perdagangan maritime internasional yang membentang dari Laut Merah hingga Laut Cina selatan. Sejak abad IX hingga abad XVI Masehi, rute perdagangan ini dikuasai oleh para pedagang muslim. Sejak abad X para pedagang muslim tersebut singgah di Kalimantan (Borneo) dan memasuki abad XIII mereka mulai singgah di Sulu. Sejak saat itu para pedagang muslim sering singgah di kepulauan Filipina selatan dan menyebarkan agama Islam sebelum melanjutkan ke perjalanan ke utara menuju Cina¹⁷. Bukti bahwa Islam telah berkembang di Filipina

¹⁵ Sumber: www.ualberta.ca/vmitchel/s

¹⁶ Sumber: www.worldrover.com/history/philippines_history.html.

¹⁷ Cesar Adib Majul, *The Contemporary Muslim Movement in the Philippines*. (Berkeley: Mizan Press, 1985), hlm. 15.

selatan sejak abad XIII adalah ditemukannya batu nisan seorang makdumin (pendakwah Islam, ustadz), yaitu Tuan Mashalika, di Bud Datu, Sulu berangka tahun 710 H (1310 M). Pada abad XV Islam telah menyebar dari Sulu ke berbagai pulau lain, seperti ke Mindanao melalui Cotabato dan Lanao, yang merupakan wilayah tinggal suku Maguindanao, Maranao, dan Iranum. Islam juga mengakar di Basilan di antara suku Yakan. Selanjutnya, Islam pun berkembang di Zamboanga di antara suku Subanun melalui Bagumbayan dan Cagang-Cagang (sekarang Zamboangan city). Mereka yang telah masuk Islam membentuk suatu subkelompok tersendiri dengan nama Kalibungan, untuk membedakan dengan saudara mereka yang masih animis. Islam juga menyebar dan dianut oleh sebagian suku Manobo di Davao. Mereka yang masuk Islam disebut sebagai kelompok Kalagan. Hal yang sama juga terjadi di Palawan, di mana orang-orang yang masuk Islam tergabung dalam kelompok Palawani, Molbog, dan Melebugnun¹⁸. Sejak saat itu Islam berkembang makin luas hingga mencapai Luzon.

Berkembangnya Islam di Filipina selatan memiliki dampak yang nyata dalam kehidupan masyarakatnya. Setidaknya ada tiga dampak nyata setelah Islam berkembang pesat di selatan. Pertama, berdirinya kesultanan di Sulu dan Cotabato sebagai pusat institusi politik dengan sultan sebagai pemimpinnya, yang sekaligus merangkul para datu dalam satu kesatuan. Kedua, kesultanan juga memperkenalkan jabatan-jabatan penting lokal yang baru dalam rangka menyatukan kewibawaan dan kekuasaan, dan yang ketiga adalah berdirinya kesultanan telah menciptakan proses sosial budaya baru yang memiliki dampak yang signifikan dalam struktur dan sifat dasar masyarakat lokal¹⁹.

Sebelum Spanyol menginjakkan kakinya di Filipina, Bangsamoro di Kepulauan Mindanao telah memiliki tingkat peradaban yang cukup tinggi. Mereka memiliki sistem sosial dan politik yang jauh lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Filipina utara.²⁰ Bangsamoro juga telah memiliki ikatan yang kuat dengan tergabungnya mereka ke dalam kesultanan-kesultanan di Sulu maupun Maguindanao dengan model kekalifahan Islam. Pada saat itu bahkan juga telah ada persatuan antara kesultanan-kesultanan Islam Sulu, Maguindanao, dan Buayan yang tergabung dalam konfederasi *Pat-a-pangampong-ku-Ranao*,

¹⁸ Samuel K. Tan dan Heidi K. Gloria. *Mindanao and Sulu: History, Peoples, and Institutions*. (Southern Philippines Development Authority, 2002), hlm. 72-73

¹⁹ Samuel K. Tan, *Decolonization and Filipino Muslim Identity*. (Diliman, Quezon City: Department of History, University of the Philippines, 1989), hlm. 15.

²⁰ T.J.S. George, *Revolt in Mindanao*. (New York: Oxford University Press. 1980), hlm. 53.

yakni negara-negara muslim yang merdeka dan berdaulat²¹. Perkembangan Islam selanjutnya, khususnya ke arah utara, mengalami hambatan dengan datangnya bangsa Spanyol di Filipina yang ingin menjajah dan menyebarkan agama Kristen di Filipina.

2. Penjajahan Spanyol (1521-1898)

Bangsa Spanyol menginjakkan kaki pertama kali di Filipina pada tanggal 16 Maret tahun 1521 di Pulau Samar melalui sebuah ekspedisi yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan. Kedatangan Magellan disambut oleh dua raja, yaitu Kolambu dan Siagu. Ia kemudian memberi nama kepulauan itu San Lazaro dan mengklaimnya untuk Spanyol. Magellan kemudian ke Cebu untuk menemui Raja Humabon. Raja Humabon dan 800 orang Cebuano lainnya dibaptis menjadi Kristen. Dalam hal ini Magellan setuju membantu Raja Humabon untuk memadamkan pemberontakan Lapu-Lapu di sekitar pulau Mactan. Magellan terbunuh dalam sebuah pertempuran antara pasukan Spanyol dan pasukan Lapu-Lapu pada tanggal 27 April 1521. Empat ekspedisi bangsa Spanyol ke Filipina selanjutnya terjadi antara tahun 1525–1542. Pemimpin ekspedisi keempat, Ruy Lopez de Villalobos, menyebut Philippines untuk pulau yang ditemukan Magellan, diambil dari nama raja Spanyol saat itu, yaitu Raja Philip II.

Filipina secara resmi menjadi koloni bangsa Spanyol pada tahun 1565, ketika Raja Philip II menunjuk Miguel Lopez de Legazpi sebagai gubernur jenderal yang pertama. Ia selanjutnya memilih Manila sebagai ibu kota wilayah koloni itu pada tahun 1571, karena letak pelabuhan alamnya yang bagus dan kekayaan daerah sekitarnya yang sangat potensial. Selama sekitar 200 tahun awal masa penjajahan Spanyol di Filipina, koloni itu terisolasi dari dunia luar. Baru setelah berakhirnya “Perang Tujuh Tahun” dengan Inggris pada tahun 1762, yang ditandai dengan Perjanjian Paris (1763) di mana Manila dikembalikan pada Spanyol, Filipina mulai terbuka dengan dunia luar.

Filipina dijajah Spanyol selama lebih kurang 377 tahun. Periode Spanyol di Filipina merupakan era kristenisasi bangsa Filipina. Hampir semua kepulauan di Filipina, kecuali Mindanao, dikristenkan. Dengan kekerasan, persuasi atau menundukkan secara halus

²¹ Salamat Hashim. *The Bangsamoro People's Struggle Against Oppression and Colonialization*. (Camp Abu Bakar Ass Shidique. Mindanaw: Agency for Youth Affairs-MILF. 2001). hlm. 63.

dengan hadiah-hadiah, orang-orang Spanyol berhasil memperluas pengaruhnya ke hampir seluruh barangay (perkampungan) di Filipina. Spanyol menghadapi perlawanan yang gigih dari kesultanan-kesultanan di Filipina selatan, yaitu, Sulu, Maguindanao, dan Buayan.²² Sistem sosial dan politik yang dibangun oleh kesultanan-kesultanan tersebut mampu membangun semangat perlawanan dan memperkuat kesadaran bersatu melawan penjajah Spanyol. Kekuatan besar dibalik motivasi peperangan panjang antara muslim Moro dengan Spanyol adalah perbedaan agama²³. Serangan terhadap orang-orang Islam dianggap sebagai penyerangan terhadap agama Islam, masyarakat, dan kesultanan yang merupakan satu kesatuan politik dan agama.

Sejak kedatangan Spanyol, sejarah Islam di Filipina senantiasa bersimbah darah. Rentetan panjang perang antara muslim Moro dengan Spanyol terus berlanjut hingga surutnya kekuasaan Spanyol di Filipina, dan bahkan hingga kini menjadi akar ketegangan dan konflik yang terjadi antara orang-orang Kristen dan Islam di Filipina²⁴. Di mata Spanyol, orang-orang Moro—sebutan yang diberikan oleh Spanyol untuk orang Islam yang tinggal di Filipina Selatan—tidak memiliki apa-apa. Mereka adalah para budak dan tidak lebih dari sekedar bandit-bandit yang mencoba menghalangi ekspansi Spanyol. “*Moros has nothing positive, they are bandit and slave*”²⁵. Barangkali ungkapan Spanyol demikian itu merupakan kulminasi keputusan mereka atas kegagalan mereka menundukkan Bangsamoro, sebab dalam kenyataannya, selama Spanyol menjajah Filipina, mereka memang tidak pernah bisa menguasai Bangsamoro hingga mereka ‘dipaksa’ angkat kaki dari Filipina oleh Amerika Serikat.

Di sisi lain, tidak semua orang Filipina bisa menerima penjajahan Spanyol. Orang-orang Filipina yang non Muslim pun (Filipino) ada yang merasa tertekan selama penjajahan Spanyol, sehingga tidak mengherankan selama periode itu terjadi beberapa pemberontakan. Salah satu pemberontakan yang terkenal terhadap penjajahan Spanyol terjadi pada tahun 1896 dipimpin oleh Emilio Aguinaldo yang terus berlanjut hingga Amerika mengalahkan armada Spanyol di teluk Manila pada 1 Mei 1898, saat terjadi perang Spanyol-Amerika. Aguinaldo mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada tanggal 12 Juni 1898.

²² Cesar A. Majul, *Dinamika Islam Filipina*, terj. Eddy Zainury (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 10.

²³ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁴ *Loc. cit.*

²⁵ Wawancara dengan Dr. Samuel K. Tan. sejarawan dari CIDS. University of the Philippines, tanggal 27 Juni 2003.

3. Penjajahan Amerika (1898-1946)

Penjajahan Amerika atas Filipina dimulai sejak armada pimpinan Laksamana Dewey mengalahkan Spanyol di teluk Manila. Spanyol menyerahkan Filipina kepada Amerika ditandai dengan Perjanjian Paris pada tanggal 10 Desember 1898, yang sekaligus mengakhiri perang Amerika Spanyol. Dalam perjanjian tersebut ternyata Spanyol memasukkan pula wilayah Moro dengan mengklaim sebagai daerah koloninya, padahal Spanyol sama sekali tidak pernah bisa menguasai wilayah itu. Tindakan Spanyol itu merupakan tindakan yang tidak sah dan tidak bermoral. Mereka tak berhak untuk menyerahkan wilayah Moro pada Amerika Serikat, sebab mereka tidak pernah berdaulat di Moro, dan masyarakat Moro pun tidak pernah dimintai pendapatnya terlebih.

Kedatangan Amerika di Filipina tidak sekedar mengandung muatan politis, tapi juga memiliki kepentingan ekonomi, mereka juga tertarik dengan sumberdaya alam di wilayah selatan, sebab di Laut Sulu terdapat deposit minyak bumi²⁶. Amerika berhasil menguasai Mindanao dengan tiga bendera, yaitu pasifikasi, Filipinanisasi, dan integrasi²⁷. Amerika Serikat belajar dari kegagalan Spanyol dalam upaya menguasai Moro. Amerika lebih menekankan pendekatan atraktif daripada pendekatan militer untuk mendapatkan simpati orang Moro. Setelah berhasil menguasai wilayah muslim Moro, Amerika mengeluarkan beberapa kebijakan di selatan, seperti migrasi, penguasaan tanah, dan juga membangun pendidikan dengan model barat.

Kekalahan muslim Moro secara politik dan ekonomi ditangan penjajah Amerika Serikat berujung dengan kemunduran status sosial mereka di mata penjajah. Sistem kolonial menempatkan orang-orang Kristen Filipino lebih tinggi status sosialnya dibanding penduduk non Kristen. Struktur masyarakat pada masa kolonial di Filipina menempatkan kaum penjajah berada pada urutan teratas, yang selanjutnya diikuti kelompok Kristen, orang-orang Moro (Islam), dan kelompok-kelompok tribal lain berada pada posisi paling bawah²⁸

²⁶ Dr. Samuel K. Tan, wawancara tanggal 27 Juni 2003

²⁷ Dr. Julkipli Wadi, wawancara tanggal 27 Juni 2003.

²⁸ Samuel K. Tan, *Internationalization of the Bangsamoro Struggle*. (Quezon City: The University of the Philippines Press and Center for Integrative and Development Studies, U.P., 1993), hlm. 17.

Pada masa awal kekuasaan Amerika, terjadi pemberontakan oleh orang-orang Filipina di bawah pimpinan Presiden revolusioner Aguinaldo pada tahun 1899. Pada tahun 1901, Aguinaldo tertangkap dan disumpah untuk setia kepada Amerika Serikat. Amerika secara bertahap berhasil menguasai daerah-daerah kota dan pantai di akhir tahun 1903. Setelah itu, Amerika menempatkan militer dalam jumlah yang besar yang dipersiapkan untuk menghadapi pemberontak Filipino.

Selain pemberontakan orang Filipino, Amerika juga menghadapi perlawanan orang-orang Moro, seperti terjadinya serangan terhadap pasukan Amerika di Lake Lanao tahun 1902. Untuk mengatasinya, pada tahun 1903 Amerika merubah sistem kekuasaannya di selatan dari tidak langsung menjadi langsung dengan membentuk propinsi Moro, yang terdiri atas lima distrik, yaitu Cotabato, Sulu, Zamboanga, Lanao, dan Davao. Pemerintahan langsung ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan Moro ke dalam bangsa Filipina²⁹

Pembentukan Propinsi Moro ini justru menimbulkan masalah baru dan merusak sistem sosial masyarakat Moro. Di bawah pemerintahan Amerika ini perbudakan dilarang, konsep hukum Amerika diperkenalkan, pungutan pajak diadakan, dibangun sekolah-sekolah, rumah sakit, dan sarana lainnya. Pelarangan perbudakan di Moro di anggap oleh orang Moro sebagai satu hal yang merusak sistem sosial, sebab perbudakan merupakan bagian integral dalam hubungan sistem sosial dan politik di Moro saat itu dan mereka tak bisa menerima peraturan Amerika itu. Akibatnya, terjadi beberapa perlawanan terhadap Amerika. Perlawanan yang cukup penting terjadi di Jolo, yaitu pertempuran Bud Dajo bulan Maret tahun 1906 dan Bud Bagsak bulan Juni tahun 1913. Dalam pertempuran Bud Bagsak ini banyak terjadi korban, antara 300 sampai 500 jiwa dari pihak orang muslim. Setelah peristiwa tahun 1913 tersebut tidak ada lagi perlawanan yang berarti³⁰.

Di sisi lain, pada tahun 1907, Amerika memilih Badan Legislatif yang pertama di Filipina. Selanjutnya dibentuk Badan Pembuat Undang-undang Bicameral, yang sebagian besar dikontrol oleh orang-orang Filipina. Saat W. Wilson menjadi presiden Amerika pada tahun 1913, terjadi perubahan yang besar dalam kebijakan resmi Amerika terhadap Filipina. Pemerintahan Wilson memutuskan untuk memulai sebuah proses secara bertahap bagi kemerdekaan Filipina.

²⁹ William Larousse. *op .cit.*, hlm 76.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 78.

Pada tahun 1916, Amerika mengizinkan pembentukan sebuah Majelis Permusyawaratan Filipino untuk menjalankan pemerintahan internal. Pada tahun 1934, melalui Tydings-McDuffie Act, Amerika mengizinkan Filipina merdeka pada tahun 1944. Sebuah pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 1935 untuk memilih presiden Commonwealth of the Philippines. Pemilihan itu dimenangkan oleh Manuel L. Quezon dan kemudian sebuah pemerintahan Filipino dibentuk dengan dasar konstitusi Amerika.

Pada masa Filipina menjadi persemakmuran (1935-1946) inilah, orang-orang Moro banyak kehilangan berbagai ketentuan khusus untuk melindungi hukum dan tradisi Islam, serta berbagai hak kesultanan dan program-program sosial ekonomi. Hal ini disebabkan adanya migrasi orang-orang Kristen dalam jumlah besar dari utara ke selatan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Tampaknya pemerintah Amerika dan orang-orang Filipina bersekongkol melakukan usaha-usaha yang sistematis untuk memperluas dominasi mereka di wilayah muslim Moro. Pemerintah Persemakmuran membangun sarana-prasarana dan mempermudah proses kepemilikan tanah orang-orang Kristen di wilayah Moro. Hal ini merupakan satu bentuk penyerobotan tanah milik muslim Moro, yang kemudian hari menjadi pemicu pertentangan etnis di Filipina.

Walaupun setelah Filipina mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1946, dan pemerintah berusaha mengadopsi rancangan sosial ekonomi orang Moro untuk mengintegrasikan orang Moro ke Filipina, namun hal itu justru semakin memperburuk persepsi orang Moro terhadap pemerintah. Pencaplokan tanah oleh orang Kristen selama migrasi mengakibatkan muslim Moro makin terpinggir. Jika pada tahun 1912 orang Moro menguasai hampir seluruh tanah di Mindanao dan Sulu, namun pada tahun 1972 mereka tinggal menguasai 30 % saja³¹

Berbagai pengalaman pahit yang dialami oleh masyarakat muslim Moro di Filipina selatan sejak kedatangan Spanyol hingga pemerintahan Amerika semakin memantapkan semangat muslim Moro untuk memilih terlepas dari Filipina. Indikasi kuat dari keinginan itu tampak sejak masa pemerintahan persemakmuran, di mana sekitar 100 datu dari Mindanao meminta pemerintah Amerika untuk tidak memasukkan Mindanao ke dalam Negara Filipina yang merdeka kelak.

³¹ Jacques Bertrand, "Peace and Conflict in the Southern Philippines: Why the 1996 Peace Agreement is Fragile", dalam *Pacific Affairs*, Vol.73 No.1. (Columbia: University of British Columbia. 2000), hlm. 43-44

Pada bulan Desember 1941 Jepang melakukan invasi ke Filipina. Karena invasi itu, Manila kemudian dinyatakan sebagai kota terbuka dan pemerintahan Filipina dipindahkan ke Corregidor. Pada bulan Maret 1942, Presiden Quezon dan Jenderal Douglas MacArthur melarikan diri. Setelah mendapat pasukan tambahan yang cukup, pada bulan Oktober 1944 MacArthur berusaha merebut kembali Filipina. Pertempuran hebat pun berlangsung cukup lama, dan akhirnya Jepang menyerah pada tanggal 2 September 1945.

Akibat invasi Jepang, Filipina mengalami kerusakan parah dan semua lembaga pemerintahan pun berantakan. Walaupun negara masih dalam keadaan gonjang, Amerika dan Filipina memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana semula bagi kemerdekaan Filipina. Akhirnya, pada tanggal 4 Juli 1946 Filipina menjadi negara merdeka dengan nama Republic of the Philippines, sesuai dengan Tydings-McDuffie Act. Saat Filipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika tersebut, masyarakat muslim Moro di Mindanao dan sekitarnya tidak puas dengan kebijakan memasukkan wilayah Moro ke dalam Negara Filipina. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila sampai saat ini gerakan sseparatisme di selatan selalu berkobar dan tidak tahu kapan akan berakhir, sebab di Bangsamoro merasa bukan sebagai bagian dari Negara Filipina.

4. Pasca Kemerdekaan

Filipina memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946, dan Manuel Roxas dari Partai Liberal terpilih sebagai presiden pertama. Tahun-tahun awal kemerdekaan Filipina masih didominasi oleh berbagai upaya dan bantuan Amerika untuk merekonstruksi kembali Filipina. Pada tahun 1948, Roxas meninggal karena serangan jantung dan digantikan oleh Elpidio Quirino. Elpidio kemudian digantikan oleh Ramon Magsaysay, yang sukses memadamkan pemberontakan Hukhalahap.

Pemerintahan Presiden Magsaysay melakukan beberapa pembangunan penting, seperti proyek-proyek pembangunan gedung, jembatan, serta saluran-saluran irigasi yang sangat bagus. Magsaysay juga mendirikan pengadilan khusus untuk memecahkan perselisihan antara tuan tanah dengan petani penggarap. Pada masa pemerintahannya, Mindanao dijadikan sebagai tempat pembuangan penjahat-penjahat kelas kakap dan tahanan-tahanan politiknya. Pada masa pemerintahan Magsaysay ini juga sering terjadi kontak senjata antar etnik di Filipina selatan, seperti yang terjadi di Sulu pada tahun 1950an di bawah

pimpinan Datu Haji Kamlan, yang kemudian menyulut konflik yang lebih luas di Mindanao.

Ketika Presiden Magsaysay meninggal karena kecelakaan pesawat pada 17 Maret 1957, Carlos Garcia terpilih sebagai presiden. Pada tahun 1961 Carlos Garcia digantikan oleh Diosdado Macapagal yang memenangkan pemilihan presiden pada tahun tersebut. Pada tahun 1962, Presiden Macapagal menyatakan bahwa tanggal 12 Juni sebagai hari libur nasional untuk merayakan hari kemerdekaan Filipina. Jadi, sejak saat itu hari kemerdekaan Filipina berubah dari tanggal 4 Juli menjadi tanggal 12 Juni, tanggal di mana Jenderal Emilio Aguinaldo memproklamasikan kemerdekaan Filipina dari Spanyol pada tahun 1898

Presiden Macapagal kemudian digantikan oleh Ferdinand Marcos. Pada masa-masa awal pemerintahan Marcos, perekonomian Filipina sempat mengalami perkembangan yang sangat baik, di mana ekonomi Filipina sempat menduduki nomor dua di Asia setelah Jepang. Pada saat itu nilai tukar Peso terhadap dollar sangat bagus. 1 US\$ saat itu senilai dengan 2 Peso.³²

Sejak masa awal pemerintahannya, Marcos sudah terlibat peperangan dengan Bangsa Moro, yang dipicu oleh keterpinggiran Bangsa Moro dari daerah yang ditempatinya secara turun-temurun beserta kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya. Selanjutnya, konflik yang lebih besar juga terjadi antara pemerintah Marcos dengan MNLF (The Moro National Liberation Front) yang merupakan organisasi perlawanan Bangsa Moro yang lebih bersifat nasional. Organisasi yang didirikan tahun 1968 ini³³, setidaknya, hingga tahun 1976 menjadi satu-satunya organisasi yang mengakomodasi perlawanan Bangsa Moro dalam perjuangannya memperoleh kemerdekaan. Adanya berbagai tekanan dari negara-negara Timur Tengah, di mana kebutuhan minyak Filipina saat itu sangat bergantung negara-negara Timur Tengah, menyebabkan pemerintahan Marcos mau berunding dengan Bangsa Moro. Hasil yang cukup menonjol adalah Tripoli Agreement tahun 1976 yang diprakarsai oleh pemimpin Libya Muammar Gaddafi.

³² Julkipli Wadi, wawancara tanggal 27 Juni 2003.

³³ John Garsman, *Moros in the Philippines*. Oktober 2001, lihat www.c-r-org/acc_mon

Identitas dan Perlawanan Bangsa Moro

Sebagaimana telah disebutkan di atas Moro yang meliputi 13 kelompok etnolinguistik budaya yang unik, berbicara dengan dialek yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan keyakinan yaitu Islam. Untuk kepentingan identifikasi, mereka bisa dibagi menjadi tiga kelompok utama berdasarkan dasar populasi dan kepemimpinan. Orang moro terdiri dari, kelompok pertama, Maguindanaon (tinggal di dataran yang berawa), kelompok kedua, Maranao (tinggal di sekitar danau) dan kelompok ketiga, Tausog (masyarakat yang berpindah-pindah).

“...The Bangsa Moro: Who are they? Bangsa Moro (“the Moro People”) is the generic name for the 13 ethnolinguistic Muslim tribes in the Philippines which constitute a quarter of the population in Mindanao in the Southern Philippines. They number from 6-12 million and are found in every major island of the country. They share a distinct culture, speak different dialects, are varied in their social formation but share a common belief in Islam. This is a uniting factor among the different groups. Of the 13 groups, there are three major groups on the bases of population and their leadership. These are the Maguindanaons (the people of the flooded plains), the Maranaos (people living around the lake) and the Tausogs (people of the current). These major groups have rallied the support of the Bangsa Moro in their struggle for self-determination...³⁴

Lebih rinci lagi disebutkan, tanah air Bangsa Moro di Filipina Selatan terdiri dari Pulau Mindanao (pulau kedua terbesar di Filipina), kepulauan Sulu, Palawan, Basilan dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Tanah air bangsa Moro ini meliputi kawasan seluas 116,895 kilometer persegi yaitu lebih dari satu pertiga keseluruhan luas negeri Filipina. Penduduknya hampir 20 juta orang dan 12 juta orang yang ada di pulau-pulau tersebut, penghuninya

³⁴ Lihat The Bangsamoro Struggle for Self-Determination by Guiamel M. Alim. Executive Director, Kaduntaya Foundation. Inc. European Solidarity Conference on the Philippines, *Philippine Solidarity 2000: In Search of New Perspectives* 23-25 June 1995. Hoisdorf, Germany.

adalah pemeluk agama Islam. Selebihnya adalah 'orang pendalaman' dan pendatang dari pulau Luzon dan Visayas yang beragama Kristen.³⁵

Kedatangan Islam telah bertapak di tanah air Moro pada tahun 1210 Masehi. Mengenai pengaruh Islam dalam sistem kemasyarakatan dan terhadap perjuangan separatisme Bangsa Moro Guiamel M. Alim menulis:

"...The Bangsa Moro struggle for self-determination cannot be placed in proper perspective without a brief account of the Islamic era which began in the year 1310 A.D. through the efforts of Arab traders, travellers, sufis (saintly Muslims) and Muslim missionaries. Islam as a way of life (politics, governance, economic systems, justice systems, etc.) spread and soon Islamic principalities in Sulu and Maguindanao were established. In the 15th century and early 16th century, the Sultanate of Sulu and Maguindanao came into being. Each sultanate was independent, had sovereign power and had diplomatic and trade relations with other countries in the region. Other Muslim principalities known as emirates, like those of Rajah Solaiman in Manila and the emirates of Panay and Mindoro, were also born. This goes to show that Islam stands on record as the first political institution, the first institutional religion, the first educational system and the first civilization in the Philippines, and that its economy was far advanced than those of the other indigenous communities. But before the Bangsa Moro could fully grow into full nationstatehood, a series of foreign colonial interventions came their way."³⁶

Kedatangan Islam 300 tahun lebih awal dibanding kedatangan agama Kristen yang dibawa oleh Ferdinand Magellan yang berbangsa Portugis, tetapi bekerja untuk raja Sepanyol. Ferdinand Magellan yang kebetulan menyebarkan ajaran Kristiani ini tiba di Filipina pada tahun 1521. Sebelum itu agama Islam telah diperkenalkan oleh pedagang-pedagang Arab dan pendakwah-pendakwah Islam.

³⁵ Lihat Tanah Air Bangsa Moro Sumber: http://www.geocities.com/arham_s/f2u/arkib2000/gu20000603moro.htm

³⁶ *Ibid.*- Guiamel M. Alim.

Tidak lama selepas kedatangan Islam, sultan-sultan Moro dan para ulamanya menegakkan pengaruh Islam di Filipina Selatan. Sultan-sultan ini antara lain adalah Sultan Sulu, Sultan Tawi-Tawi, Sultan Palawan dan pulau-pulau sekitarnya, juga termasuk Sultan Maguindanao. Menurut perspektif orang Moro, pendatang baru dari Spanyol yang dikepalai Ferdinand Magellan ketika tiba di Filipina pada tahun 1521 telah memasang semacam hegemoni “*Gold, Gospel, Glory*” bersimbol pemersatu Salib untuk menghela pencapaian tujuan dan menyebarkan agama Kristen “dengan paksaan” di tanah orang yang sudah beragama, yaitu keluarga besar pemeluk Islam. Dengan *show of force* kekuatan tentara Kristen Spanyol dan berbagai cara halus telah dilancarkan secara sistematis, akhirnya penduduk pulau Luzon dan Visayas hampir semuanya di-Kristenkan.³⁷

Berdasarkan perspektif sejarah orang Moro, masuknya Spanyol di Manila memang mendapat tentangan hebat, perlawanan ini diketuai oleh Raja Sulaiman dan Lakandula. Tetapi selepas keduanya mati syahid, “perjuangan jihad” ini tidak dapat lama bertahan. Selepas itu Spanyol menghancurkan semua tanda dan simbol-simbol keislaman di Manila, kecuali sebuah benteng atau “kubu” yang kemudian dikenal orang dengan nama “*Fortress-Intramoros*”.

Pada tanggal 10 Desember 1898, di bawah Perjanjian Paris, Sepanyol kemudian bersetuju menyerahkan Filipina kepada Amerika. Yang pelik, dalam perjanjian itu Sepanyol memasukkan tanah air Moro ke dalam perjanjian itu walaupun Sepanyol tidak pernah memerintah kawasan itu. Selama hampir lebih dari 300 tahun, pihak Spanyol mencoba untuk menundukkan orang-orang Islam Moro Muslim dan kemudian upaya yang sama diikuti pula oleh pihak Amerika, selama 47 tahun, tetapi mereka gagal.

Walau bagaimanapun, pendekatan politik yang dibuat oleh Amerika cuma berhasil membujuk hati sultan-sultan dan datu-datu Bangsa Moro. Akhirnya mereka –para elit Moro– mengikat perjanjian dengan pihak Amerika, dengan syarat pihak Amerika tidak akan mencampuri hal-ihwal urusan internal bangsa Moro. Perjanjian ini kemudian dinamakan “*Kiram-Bates Treaty*”, yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 1899. Perjanjian yang sama juga telah ditandatangani oleh Sultan Maguindanao.

³⁷ *Ibid.*,-

Pada tanggal 2 Maret 1904, Presiden Roosevelt, dengan tidak segan-segan, menurut perspektif Moro, "Silu mengistiharkan" perjanjian tersebut batal. Ketika Amerika "memberi kemerdekaan" kepada Filipina pada tahun 1946, menurut perspektif orang-orang Moro, mereka membantah dengan keras masuknya atau dimasukkannya bangsa Moro ke dalam negara Filipina. Tetapi, pihak Amerika dan orang-orang Filipina yang telah "dikristenkan" itu tidak "memperdulikan bantahan orang Moro", mereka menutup mata kalau orang Moro berbeda nilai bahkan prinsip agama. Manila dan Amerika punya kepentingan (*vital interest*) di tanah air orang Moro, yang beragama Islam, yang kaya dengan sumber bahan mentah dan hutan tanahnya subur untuk dijadikan satelit atau periphery hubungan ketergantungan (*dependencia*).

Menurut perspektif Moro, jihad atau perjuangan sungguh-sungguh sejarah Bangsa Moro bisa dibagi dalam tiga fase. Fase pertama, jihad "menghalang kemasukan" Spanyol bermula pada tahun 1521 hingga tahun 1898, yaitu selama 377 tahun. Fase kedua adalah jihad menentang penjajahan Amerika yang bermula pada tahun 1898 hingga tahun 1946, yaitu selama 47 tahun. Fase ketiga ialah jihad menentang penguasaan Filipina (Manila) yang berawal pada tahun 1970 hingga sekarang (tahun 2000-an).

Semenjak kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, pemerintah Manila telah melancarkan program "penerokaan tanah" (pendudukan tanah lewat *land reform*) oleh orang-orang Kristen dari Pulau Luzon dan Visayas di tanah air bangsa Moro. Padahal sebelum itu orang-orang Islam Moro bisa memerintah sendiri wilayah mereka melalui gubernur-gubernur propinsi, datuk-datuk bandar dan 'kapita Barangay' yang berasal dari kalangan bangsa Moro sendiri. Manila telah melakukan marginalisasi kepemimpinan lokal Moro dalam posisi-posisi politik yang sebelumnya dipegang oleh para pendahulu Moro. Berikut ini petikan suara hati pejuang Moro terhadap posisi Manila:

"....Peneroka Kristian, dengan pertolongan Kerajaan Manila, telah mula mengambil alih jawatan-jawatan politik dan pentadbiran sebaik-baik sahaja mereka bertapak di bumi Moro itu. Nampak jelas niat kerajaan Manila mengirimi peneroka Kristian ke tanah Moro bukan semata-mata untuk bermastautin, tetapi untuk melakukan pembunuhan dan kekacauan ke atas orang-orang Islam. Peneroka-peneroka ini telah membuat kumpulan laskar (militia) Kristian yang dilengkapi dengan senjata. Kerja mereka ialah menganiaya orang-orang Islam yang tidak bersenjata dan tidak

bersedia, terutamanya di kawasan-kawasan luar bandar. Siri-siri pembunuhan beramai-ramai dan pembakaran rumah-rumah telah dilakukan ke atas orang-orang Islam. Kerena tidak tahan, orang-orang Islam ini telah meninggalkan tanah-tanah mereka dan mencari perlindungan di bandar-bandar yang dikuasai oleh orang-orang Islam. Orang-orang Kristian ini pun mengambil alih tanah-tanah dan ladang-ladang kepunyaan orang-orang Islam yang telah ditinggalkan itu...".³⁸

Dari ungkapan itu tampak ada data yang menunjukkan bagaimana menejemen politik dan konflik telah dilancarkan pemerintah Manila terhadap Bangsa Moro di Filipina Selatan. Kalau terjadi perlawanan terbuka maupun sikap resistensi, agaknya ini bukan tindakan baru atau mendadak. Lazimnya, ada aksi maka ada reaksi. Berapa lama entitas Manila akan bertahan dalam situasi “perang” yang berkepanjangan, menuai teror dan kekerasan balasan?

Perjuangan Bangsa Moro untuk menentukan nasibnya sendiri sudah berlangsung beberapa generasi. Ini merupakan gerakan separatisme terlama yang bertahan di Asia, yang berlangsung sejak abad ke-16 dan belum nampak tanda-tanda akan berakhir, bahkan cenderung semakin meningkat. Ini bila ditilik dari perkembangan gerakan organisasi dan motif-motif ideologi yang melandasi perjuangan (lihat Bab II). Sedang gerakan-gerakan separatisme lain ada yang berhasil mencapai tuntutannya, ada pula yang gagal alias dihancurkan. Perjuangan Moro masih berlangsung sampai detik ini demi menjaga kelangsungan hidup dari Bangsa Moro, menegakan identitas kultural dan hak untuk menentukan nasib sendiri, sebagaimana digambarkan oleh M. Alim:

“.....The Bangsa Moro struggle for self-determination is already a struggle of generations. The longest in Asia and maybe the whole world, it started in the 16th century and up to now there is no clear indicator yet as to when it will end. Other peoples' struggle in the world have either succeeded or been totally crushed. The Moro struggle is still going on. It is an ongoing struggle for survival, cultural identity and for the right to self-determination....”³⁹

³⁸ *Ibid.*- Tanah Air Bangsa Moro.

³⁹ Lihat Guiamel M. Alim, *The Bangsamoro Struggle for Self-Determination*, Kadtuntaya Foundation, Inc. European Solidarity Conference on the Philippines *Philippine Solidarity 2000: In Search of New Perspectives* 23-25 June 1995, Hoisdorf, Germany.

Perjuangan bangsa Moro untuk menentukan nasibnya sendiri terkait dengan perbedaan pengalaman dalam kemajuan dan persebaran-persebaran peradaban Islam dan Kristen, yang menerpa bangsa Moro maupun entitas yang kemudian berkembang di Manila. Kedatangan koloni imperialisme, mengubah hubungan Moro dan Manila menjadi hubungan ketergantungan (*dependencia*) antara *core* dan *periferal*. Perjuangan bangsa Moro, secara teoritis bisa dilihat sebagai upaya memotong hubungan yang tidak seimbang tersebut:

Sheikh Abu Zahir, seorang pejuang separatisme Moro, dalam tulisannya “Jihad Umat Islam Moro”, mengkritik Perjanjian Paris yang memasukan Moro sebagai bagian dari Filipina. Lewat tulisannya ini dia meneriakan semangat pembebasan sebagaimana tertera di bawah ini:

“...Bumi Islam Moro (kini dikenali sebagai ‘Selatan Filipina’) merangkumi pulau Mindanao (pulau ke dua terluas di Filipina), kepulauan Sulu, Palawan, Basilan dan pulau-pulau sekitarnya. Keluasan tanahnya adalah 116,895 kilometer persegi, lebih 1/3 daripada keluasan Filipina. Penduduknya lebih 20 juta dengan lebih 12 juta daripadanya adalah umat Islam. Selebihnya adalah penduduk pedalaman di situ dan juga pendatang Kristian dari Luzon dan Visayas.

Islam tiba di Moro pada tahun 1210 Masihi, dibawa oleh pedagang dan pendakwah Arab. Ini adalah lebih tiga abad sebelum kedatangan Kristian yang dibawa oleh Ferdinand Magellan pada tahun 1521 Masihi. Tidak lama selepas kedatangan Islam, Kesultanan Islam telah dimulakan oleh Kesultanan Moro sendiri seperti, Kesultanan Sulu dan Kesultanan Maguindanao.

Penjajah Sepanyol yang diketuai oleh Magellan telah memaksakan ‘Salib’ dan kepercayaan Tritini ke atas penduduk di situ. Umat Islam ketika itu bangkit menentang penjajahan negara dan agama ini dengan dipimpin oleh Raja Sulaiman dan Lakandula. Namun setelah shahidnya kedua pemimpin ini, umat Islam telah dikalahkan dan segala peninggalan Islam di Moro telah dihapuskan oleh pihak Kristian. Yang tinggal hanyalah sebuah kota yang dikenali sebagai ‘Intramoros’.

Pada 10 Disember 1898, “Perjanjian Paris” di antara Amerika dan Sepanyol telah dimeterai. Dalam perjanjian ini Sepanyol telah menyerahkan Filipina kepada Amerika. Walaupun mereka sebenarnya tidak menguasai umat Islam

Moro tetapi mereka tetap memasukkan bumi bertuah ini di dalam perjanjian tersebut.

Selama lebih 300 tahun umat Islam Moro cuba dikalahkan dan dihapuskan oleh pihak Kristian Sepanyol, diikuti pula oleh pihak Amerika selama 47 tahun, namun kedua-dua kuasa kuffar ini telah menemui kegagalan.

Melalui helah politik, Amerika telah berjaya memujuk sultan-sultan dan pembesar-pembesar Moro mengikat perjanjian dengan mereka (Perjanjian 'Kiram-Bates', 2/8/1899). Di antara syarat-syarat perjanjian tersebut adalah tidak ada campurtangan pihak Amerika dalam soal pemerintahan para sultan dan pembesar ini. Pada 2 Mac 1904, President Roosevelt, bagaimanapun telah mengisytiharkan bahawa perjanjian tersebut tidak akan diterima lagi.

Apabila Amerika memberi kemerdekaan kepada Filipina pada tahun 1946, umat Islam Moro telah menentang usul meletakkan bumi Islam Moro di bawah pemerintahan Filipina. Namun pihak kuffar Amerika dan Filipina tidak mengendahkan suara umat Islam ini (perhatikan tarikhnya dan renungi sebabnya, umat Islam tidak diendahkan). Maka bumi Moro yang kaya dengan hasil semula jadi, bahan galian dan tanah yang subur ini pun jatuh ke tangan kerajaan Kristian Filipina.

Jihad di bumi Moro ini bermula sejak 1521 lagi. Mereka menentang penjajahan Sepanyol selama 377 tahun (1521-1898). Kemudiannya mereka menentang kuasa kuffar Amerika pula selama 47 tahun (1898-1946). Sejak 1970 pula, umat Islam Moro telah berjuang menentang kuasa kuffar Filipina sehingga hari ini.

Sebaik sahaja Filipina merdeka pada 1946, kerajaan Kristian Filipina telah melancarkan program penempatan untuk penduduk-penduduk Kristian dari Luzon dan Visayas ke bumi Moro. Dengan sokongan dan bantuan pihak kerajaan, pendatang-pendatang Kristian ini telah menindas umat Islam Moro di bumi mereka sendiri.

Kumpulan bersenjata pengganas-pengganas Kristian telah ditubuhkan. Ramai penduduk Islam Moro telah dibunuh dengan kejam dan kediaman-kediaman mereka dibakar. Umat Islam Moro yang tidak berdaya menentang pengganas-pengganas yang dibiayai kerajaan Kristian ini terpaksa meninggalkan harta benda mereka dan mencari perlindungan di kawasan-kawasan yang ramai penduduk Islamnya. Tanah dan ladang-ladang mereka kemudiannya telah diduduki oleh pendatang-pendatang Kristian.

Pada ketika kerajaan dan pegganas-pegganas Kristian ini merasakan bahawa mereka telah berjaya menghapuskan umat Islam Moro, bangkit para pemuda Islam Moro (Takbir!) dari pelbagai lapisan termasuk para pelajar, terutamanya dari yang berpelajaran agama dari negara-negara Arab.

Di bawah pimpinan Selamat Hashim, 'Pergerakan Pembebasan Kebangsaan Moro' (MNLF) telah ditubuhkan. Ketika pergerakan ini masih diperkuatkan, satu konflik tercetus di antara Misauri dengan seorang graduan kedoktoran dari Mesir, kerana kedua-duanya ingin menjadi pemimpin. Selamat Hashim yang merupakan pelopor pergerakan tersebut menyedari bahawa usahanya mungkin gagal sekiranya konflik berterusan terutamanya jika beliau juga menyatakan pendirian untuk menjadi pemimpin. Beliau lantas membuat keputusan tidak memarakkan lagi konflik yang tercetus. Akhirnya Misauri telah berjaya menjadi pengerusi pergerakan tersebut.

Beberapa tahun selepas bermulanya perjuangan MNLF, menyedari ketidak-sesuaian Misauri, hampir kesemua komander telah bersepakat bahawa Misauri patut melepaskan jawatannya kepada Selamat Hashim. Bagaimanapun Misauri enggan dan dengan pelbagai helah terus mengekalkan jawatannya. Atas sebab ini, Selamat Hashim pun megambil-alih pimpinan MNLF dari Misauri yang terus mendabik dada sebagai pengerusi.

Bagi mengelakkan kekeliruan, majlis syuranya telah mengambil keputusan menggantikan perkataan 'Kebangsaan' dengan perkataan 'Islam'. Maka Pergerakkan Pembebasan' yang sebenarnya kini adalah Pergerakan Pembebasan Islam Moro' (MILF) yang matlamatnya adalah untuk mengembalikan kedaulatan Negara Islam Moro.

Mujahid-mujahid Islam Moro terdiri daripada; 120,000 orang Tentera Islam dengan lebih 80% daripada mereka bersenjata lengkap. Lebih 300,000 pejuang-pejuang umum. Matlamat Jihad MILF adalah : Untuk meninggikan Kalimah Allah; Untuk mendapatkan keredhaan Allah; Untuk menguatkan hubungan manusia dengan Penciptanya; Untuk menguatkan hubungan sesama manusia; Untuk mendapatkan semula hak-hak Umat Islam Moro yang dirampas ; Untuk menegakkan sebuah negara Islam yang merdeka dan menjalankan Syariah Islam. (05/05/98, Abu Aqeedah) *Mati Hanya Sekali, Jadikannya Pada Jalan Allah...."*⁴⁰

⁴⁰ Sumber: <http://www.gcocities.com/PicketFence/3131:moro.htm>.

Selain faktor sejarah kolonisasi dan pengintegrasian paksa, separatisme Moro terhadap Manila juga dipicu oleh dominasi Kristen Filipino atas berbagai sumber daya alam dan posisi-posisi strategis di Mindanau. Keterwakilan orang Moro secara politis maupun dalam penguasaan aset-aset ekonomis penting di wilayahnya sendiri sangat rendah. Mereka beralasan untuk memilih merdeka atau melepaskan diri dari negara bangsa Filipina. Perbedaan agama hanya menjadi faktor yang memperkuat, melandasi, dan mempeperkuat motivasi (secara ideologis) perlawanan bangsa Moro. Hal yang cukup kuat mempengaruhi perlawanan dan pembontakan Moro tampaknya adalah soal terjadinya eksploitasi sumber daya alam, pendudukan lahan dan sehingga marginalisasi Bangsa Moro semakin menguat.

Ada pendapat bahwa setelah memperoleh kontrol politik, Pemerintah kolonial Amerika yang didukung Manila mengumumkan seluruh wilayah Filipina, termasuk Mindanau sebagai tanah publik, mengubah sistem pendidikan menjadi pendidikan “ala Barat”, menempatkan pemerintahan asing di bumi Moro, mendatangkan imigran dari utara dan mulai mengeksploitasi sumber daya alam Mindanau yang kaya. Sebaliknya bangsa Moro hanya menjadi penonton, muali kehilangan lahan, kurang dilibatkan dalam posisi pemerintahan setempat dan kemudian menjadi minoritas dan mengalami peminggiran di negeri leluhur dan ruang habitatnya sendiri.

“...USA declared the entire archipelago as public land, including those considered by the Bangsa Moro as their ancestral homeland. They established foreign education, put up foreign government, brought in settlers from the North and started the exploitation of Mindanao’s rich resources. Thus the beginning of the minoritization and marginalization of the Bangsa Moro. The impact of such colonial machination is still very much felt today. Legally, the Bangsa Moro lost their lands because of the Torrens land titling system. They became acculturated due to the public school system which is foreign to their culture. The indigenous political system was replaced with a new system. Today, many of their territories are either controlled by elite settlers or by foreign multinational corporations. After ensuring its continuous political control and economic interest in the Philippines, the Americans granted independence to the Philippines. Despite protest from the Moro leaders, Mindanao was annexed to the soon-to-be-independent Philippines. Thus, the most awaited transfer of power and reins of government to the Filipino elite.”⁴¹

⁴¹ Ibid.- Guiamel M. Alim, 1995

Akibat-akibat yang muncul adalah perlawanan dari yang berpola resistensi pasif sampai kepada upaya separatisme lewat cara-cara kekerasan karena mereka sudah mengalami kekerasan yang dilancarkan entitas Manila. Terorisme, pelanggaran HAM, korban sipil adalah wajah lain untuk menggambarkan konflik yang berlangsung.

Instabilitas politik dan keamanan: lokal, nasional, regional dan global menjadi bagian dari upaya untuk membangun hubungan baru antara Manila dan Moro. Kerusakan lingkungan alam akibat eksploitasi ekonomi dan hubungan sosial yang diwarnai dominasi menjadi alasan bangsa Moro untuk meneruskan perjuangan mereka entah sampai kapan. Menurunnya pertumbuhan ekonomi lokal, nasional dan regional karena adanya peristiwa yang disebut terorisme akibat rusaknya hubungan Kristen Filipino dan Muslim Moro merupakan biaya politik yang harus dibayar oleh banyak pihak.D.

Kesimpulan

Letak geografis Filipina yang strategis di jalur pelayaran internasional, didukung oleh sumberdaya alamnya yang melimpah, menjadi magnet bagi pedagang-pedagang asing untuk menyinggahinya. Pedagang-pedagang Arab memperkenalkan Islam di Filipina Selatan, dan kemudian Islam dengan cepat menyebar di kepulauan Filipina Selatan hingga ke utara.

Kedatangan Spanyol ke Filipina pada awal abad XVI menghambat perkembangan Islam ke utara Filipina, sebab Spanyol ingin menguasai dan menyebarkan Kristen di Filipina. Spanyol yang cukup mudah menaklukkan Filipina utara mendapat perlawanan sengit oleh muslim Moro di selatan. Sejak kedatangan Spanyol sejarah Islam di Filipina senantiasa bersimbah darah. Berbagai upaya Spanyol untuk menaklukkan Moro dan mengkristenkan mereka tidak pernah berhasil hingga berakhirnya kekuasaan mereka di Filipina.

Perjanjian Paris tanggal 10 Desember 1898 menandai berkuasanya Amerika di Filipina, sekaligus penyerahan wilayah Moro secara illegal ke dalam wilayah Filipina sebagai jajahan Amerika. Pendekatan Amerika untuk mengintegrasikan Moro ke dalam Filipina yang lebih persuasif dibandingkan Spanyol membawa hasil. Dengan modus pasifikasi, Filipinanisasi, dan integrasi mereka berhasil menguasai wilayah Moro.

Walaupun demikian, tidak berarti muslim Moro di Filipina selatan mau berintegrasi dengan

mereka di utara, sebab bagaimanapun mereka memiliki perbedaan sejarah, agama, budaya, dan sistem sosial politik. Berbagai kebijakan yang diterapkan sejak pemerintahan Amerika hingga kebijakan yang ditempuh pemerintah Filipina pasca kemerdekaan, yang cenderung merugikan muslim Moro, bukannya semakin mengeratkan Moro dengan Manila, tetapi justru semakin menimbulkan keinginan untuk berpisah menjadi sebuah negara yang merdeka.

Pengalaman historis Bangsamoro yang penuh luka dan perlawanan terhadap kaum yang ingin menguasai tanah mereka, harapan akan bebas dari terror dan ancaman, penindasan, dan kediktatoran pemerintah Filipina, semakin menguatkan cita-cita untuk memisahkan diri dari pemerintahan Manila. Keinginan pemisahan itu semakin menguat sesudah kemerdekaan Filipina dan masa-masa selanjutnya.

Sultan Sulu, Muhammad



BAB III

PERKEMBANGAN GERAKAN SEPARATISME BANGSA MORO

Oleh
Cahyo Pamungkas

A. Pendahuluan

Jika dilihat dari kategori konflik antara negara dan masyarakat, gerakan separatis Bangsa Moro selama ini dikenal dalam dua perspektif. Bangsa Moro menganggap bahwa perjuangan mereka ditujukan untuk penentuan nasib sendiri atau *self determination*. Sedangkan Pemerintah Filipina menggolongkan gerakan ini sebagai pembontakan bersenjata dari sekelompok etnik minoritas. Di luar kategori tersebut, Pemerintah Amerika Serikat yang dewasa ini mengkampanyekan perang melawan terorisme mendefinisikan gerakan separatis Bangsa Moro sebagai kelompok teroris yang terkait dengan jaringan Al Qaida maupun Jamaah Islamiyah.

Terlepas dari kategorisasi tersebut, Guimel M. Alim, Executive Director Kadtuntaya Foundation, dalam *Philippine Solidarity 2000* mengatakan bahwa Perjuangan Bangsa Moro untuk tujuan kemerdekaan sudah menjadi sebuah perjuangan dari generasi ke generasi.⁴² Selanjutnya disebutkan bahwa gerakan kemerdekaan ini merupakan perjuangan yang memakan waktu paling lama di Asia bahkan di seluruh dunia. Sampai sekarang, gerakan ini masih tetap berlangsung tanpa menunjukkan kapan akan berakhir meskipun negosiasi-negosiasi untuk proses perdamaian terus tetap berlangsung. Perjuangan tersebut berada dalam spektrum yang luas dan kompleks dari perjuangan untuk mempertahankan kelangsungan hidup, mempertahankan identitas budaya, sampai dengan memperoleh kemerdekaan.⁴³

Tulisan berikut tidak dimaksudkan untuk memberikan solusi praktis yang berupa *conflict resolution* ataupun prediksi ke depan dari gerakan separatis melainkan mencoba

⁴² Lihat Guimel M. Alim dalam *Philippine Solidarity 2000* disampaikan dalam European Solidarity Conference on the Philippines, 23-25 Juni 1995 di Hoisdorf, Germany.

⁴³ *Ibid.* Hal. 1.

mendiskripsikan perkembangan gerakan separatisme dari sejak lahir sampai sekarang. Perkembangan gerakan ini tidak terlepas dari dinamika kehidupan sosial politik Filipina yang seringkali mengalami pasang surut. Perlawanan dan negosiasi gerakan separatist Bangsa Moro dengan pemerintah bergantung pada sejauhmana tingkat represivitas suatu rezim. Semakin tinggi represivitas rezim yang berkuasa maka akan semakin tinggi pula tingkat resistensi yang diberikan gerakan separatist.

Selain itu, tulisan ini juga ditujukan untuk mengetahui secara komprehensif faktor-faktor utama yang menyebabkan timbulnya gerakan separatist. Gambaran tersebut sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan langkah-langkah yang terdekat untuk mencari jalan ke luar dari problematika separatisme di Filipina. Dewasa ini, sejalan dengan kampanye melawan terorisme internasional, manajemen konflik untuk menangani gerakan separatist di berbagai negara diarahkan pada pendekatan kekerasan. Dengan demikian pengelolaan konflik lebih dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan iklim politik internasional yang berkembang daripada sebuah analisis sosial yang komprehensif.

Hal-hal yang akan digambarkan dalam tulisan berikut meliputi dua hal utama. Pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan separatisme. Kedua, sejarah perkembangan gerakan separatist. Faktor-faktor penyebab separatisme akan dideskripsikan untuk mengetahui akar dari persoalan munculnya separatisme. Sejarah gerakan separatist juga mencakup analisis karakteristik gerakan seperti basis ideologi dan basis etnik. Hal ini penting untuk dianalisis mengingat bahwa kelompok-kelompok yang tergabung dalam gerakan separatist tidak berada di bawah satu organisasi tunggal. Organisasi-organisasi gerakan separatist yang akan diterangkan studi ini antara lain adalah MNLF (*Moro Nation Liberation Front*), MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), dan Abu Sayyaf.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Gerakan Separatist

Faktor-faktor yang menjadi latar belakang gerakan separatist dapat dilihat dari berbagai perspektif atau kerangka analisis yang bervariasi sesuai dengan fakta-fakta sosial yang terjadi. Perspektif yang digunakan dalam paper ini antara lain perspektif sejarah, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Perspektif sejarah akan melihat gambaran awal atau sebab utama timbulnya gerakan separatist karena hampir semua gerakan perlawanan Bangsa Moro mengatakan bahwa inkorporasi Bangsa Moro ke Filipina adalah sesuatu yang "*immoral and illegal annexation*." Analisis sejarah juga diperlukan untuk melihat dampak dari

kolonialisme terhadap gerakan perlawanan Bangsa Moro.

Sedangkan perspektif sosial budaya akan melihat bahwa timbulnya perlawanan Bangsa Moro disebabkan karena adanya perbedaan ideologi antara Islam dan nilai-nilai sekulerisme barat serta konflik horizontal antara Bangsa Moro dan Filipino yang sengaja direkayasa oleh pemerintah Filipina. Konflik ideologi dan sosial tersebut diduga telah berimplikasi terhadap represi terhadap identitas sosial budaya Bangsa Moro. Kebijakan asimilasi kebudayaan yang represif ini diduga menyebabkan dekulteralisasi dan hegemoni budaya terhadap masyarakat Bangsa Moro. Dekulteralisasi pada satu sisi mendorong Bangsa Moro ke dalam situasi yang kurang menguntungkan tetapi pada sisi lain diduga akan meningkatkan integrasi internal karena berkaitan dengan identitas kolektif.

Perspektif politik diperlukan untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan politik terhadap Bangsa Moro baik kebijakan akomodasi politik seperti pemberian otonomi maupun kebijakan represi militer berpengaruh terhadap meningkatnya eskalasi perlawanan Bangsa Moro terhadap pemerintah pusat dan etnik Filipino. Selain itu juga akan dilihat apakah ada kebijakan *ethnic cleansing* dari pemerintah pusat dan etnik Filipino terhadap komunitas muslim Bangsa Moro dan bagaimana hal tersebut ikut memacu tumbuhnya gerakan separatis. Sementara analisis ekonomi diperlukan untuk melihat pembagian sumberdaya antara Bangsa Moro dan Filipino dan implikasinya terhadap munculnya gerakan separatis. Analisa ekonomi menjadi penting mengingat gerakan separatisme pada umumnya diawali dengan suasana ketidakadilan yang bersumberkan dari pembagian alokasi sumberdaya. Berikut akan dideskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan berkembangnya gerakan separatis Bangsa Moro.

1. Politik Integrasi Kolonial

Salah satu faktor paling kuat yang menyebabkan timbulnya gerakan separatis Bangsa Moro adalah faktor sejarah yaitu dampak dari politik integrasi kolonial terhadap wilayah-wilayah Bangsa Moro. Kepulauan Mindanao, Sulu, dan Palawan pada awalnya dihuni oleh 13 etnik muslim yang berbeda secara linguistik dan 10 suku pedalaman. Sebelum kedatangan kaum kolonialis, mereka memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya sendiri. Berikut ini akan digambarkan secara ringkas mengenai dampak integrasi kolonial di Kepulauan Mindanao.

Dalam sejarahnya Bangsa Moro adalah suatu etnik yang berbeda dan terpisah dengan Bangsa Filipino yang sekarang merupakan mayoritas penduduk Filipina. Nuaim bin Abdul Haq (1994) mengatakan bahwa Dr. Alunan C. Glang dan Romo Fransisco Combes, SJ memperkuat fakta sejarah mengenai eksistensi Bangsa Moro yang berbeda dengan etnik Filipino. Dr. Alunan C. Glang, mantan duta besar Filipina untuk Kuwait dalam buku *"A Nation Under Endless Tyranny"* mengutip sejarawan Perancis D'Avitay sebagai berikut⁴⁴ :

"as early as the 16th century, Mindanao is not a Philippine Island."

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Romo Fransisco Combes, SJ. Dalam *Historia de las islas, Jolo y Sus Adjacentes* (Madrid, 1667) yang mengatakan bahwa⁴⁵ :

"The second nation in estimation is Mindanao which includes the Kingdom of Buhayen: for in the olden times they were all one nation, and today, although various petty rulers govern them, they are one in customs and language. They are nation of some valor with their policy of being subject to kings they have acquired esteem among other nations, whom they have united under one political government for achievements that are too great for their own courage".

Sebelum kedatangan Spanyol di Filipina pada awal abad ke-15, Bangsa Moro telah mencapai tingkat peradaban yang cukup tinggi⁴⁶. Mereka tergabung dalam kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh sultan-sultan Sulu dan Maguindanaw yang mengikuti model kekalifahan Islam. Bahkan pada waktu itu Kerajaan-kerajaan Sulu, Maguindanao, dan Buayan tergabung dalam suatu konfederasi yang disebut sebagai *"Pat-a-pangamong-ku-Ranao"* yaitu negara-negara muslim yang merdeka dan berdaulat.⁴⁷ Dalam kerajaan-kerajaan Islam tersebut, sistem hukum diatur dan ditegakkan berdasarkan Syariah Islam. Selain itu kesusastraan, perdagangan, dan tingkat peradaban berkembang sangat pesat sebagaimana kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara.

⁴⁴ Nuaim bin Abdul Haq dalam Independent Bangsa Moro State, book 1, Agency for Youth Affairs of MILF, Hal. 1

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Salamat Hashim, The Bangsa Moro People's Struggle Against Oppression and Colonialisation, Agency for Youth Affairs-MILF, Camp Abu Bakar Ass Shiduque, Mindanaw, 2001, hal. 63.

Kedatangan Bangsa Spanyol pada abad ke-16 atau pada tahun 1521 berimplikasi pada perubahan politik dan sosial budaya di kawasan tersebut terutama P. Luzon. Tujuan kaum kolonialis adalah mendirikan koloni dan memasukkan penduduknya ke dalam agama Kristen untuk menghalangi penyebaran Islam ke utara dari Kalimantan⁴⁸. Hal tersebut dibuktikan dengan dipaksanya Rajah Sulaiman of Luzon yang mempertahankan Kota Manila dan pengikut-pengikutnya untuk memeluk agama Katolik. Dengan politik kekerasan dan persuasi, Spanyol dapat memperluas kedaulatannya di seluruh Filipina kecuali di 3 daerah yaitu yaitu kesultanan Sulu, Maguindanao, dan Buayan.

Masyarakat di daerah-daerah Sulu, Maguindanao, dan Buayan telah memiliki suatu kesatuan politik yang lebih baik daripada daerah-daerah lain.⁴⁹ TJS. George (1980) mengatakan bahwa masyarakat Mindanao berbeda dalam merespon kolonialisme Spanyol. Salah satu alasannya adalah karena Islam yang berkembang di Mindanao telah memberikan masyarakat suatu sistem sosial dan politik yang lebih maju dari pada daerah-daerah Filipina Utara⁵⁰. Sistem sosial dan politik tersebut mampu membangun ideologi perlawanan dan memperkuat kesadaran untuk bersatu melawan agresi kaum kolonialis. Serangan terhadap daerah Bangsa Moro diartikan sebagai penyerangan terhadap agama Islam, masyarakat, dan kerajaan yang merupakan satu kesatuan agama dan politik.

Bangsa Moro sebagaimana telah diwakili MILF menyatakan bahwa Bangsa Spanyol selama 377 tahun tidak pernah berhasil menundukkan Bangsa Moro menjadi daerah kolonial.⁵¹ Kaum kolonialis mencoba mempergunakan segala cara untuk menundukkan Bangsa Moro. TJS George (1980) menerangkan bahwa salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengirim misionaris Katolik ke wilayah-wilayah Bangsa Moro dengan harapan bahwa proses Kristenisasi akan membantu penaklukan secara politik. Sebaliknya, kaum misionaris mendorong Tentara Spanyol untuk melakukan penaklukan guna memudahkan penyebaran agama Katolik. Pada tahun 1635, Pihak gereja meminta Pemerintah Spanyol mendirikan garnizon di Zamboanga untuk melindungi para misionaris. Tiga ratus orang tentara Spanyol dan seratus orang tentara Visayas membangun benteng di sekitar Jesuit. Di mata Bangsa Moro, hal ini merupakan simbol agresi Katolik dan menimbulkan

⁴⁸ Cesar A. Majul dalam *Dinamika Islam Filipina*, LP3ES Jakarta. 1989. Hal. 10.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ TJS George dalam *Revolt in Mindanao*. Oxford University Press. New York. 1980, Hal. 53.

⁵¹ Ibid. No. 3 Nuaim

kemarahan yang luar biasa. Tiga puluh tahun kemudian karena tekanan-tekanan militer dari pasukan-pasukan Bangsa Moro, benteng tersebut ditinggalkan dan para misionaris kembali ke utara.

Perubahan konstelasi politik imperialisme dunia memaksa Spanyol menjual seluruh kepulauan Filipina kepada Amerika Serikat melalui *Treaty of Paris* termasuk Mindanao pada tanggal 10 Desember 1898. Spanyol menyebutkan bahwa Kepulauan Mindanao adalah daerah kolonial dan dijual dengan harga 20 juta dolar Mexico. Bangsa Moro menganggap bahwa inkorporasi wilayah Bangsa Moro dari Spanyol ke Filipina adalah sebagai *immoral and illegal anexation* karena Spanyol tidak pernah memiliki hak untuk menyerahkan wilayah ini ke Amerika Serikat. Kepulauan Mindanao yang dijual merupakan daerah masyarakat muslim dimana Spanyol tidak pernah berdaulat atas daerah ini. Selain itu, masyarakat Bangsa Moro tidak pernah diminta pendapatnya atau tidak pernah diajak konsultasi sebelum wilayahnya diserahkan ke Amerika Serikat.

Sebagai dampak dari persetujuan ini pemerintahan Provinsi Moro didirikan pada tanggal 1 Juni 1903 dengan pemerintahan yang terpisah dengan bangsa Filipino. Beberapa provinsi Moro diperintah secara administratif oleh orang-orang Moro sendiri yang ditugaskan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat (G. M. Alim, 1994). Pemerintah Amerika Serikat belajar dari kegagalan Spanyol untuk menguasai Bangsa Moro yang selalu menggunakan pendekatan militer. Amerika Serikat lebih menekankan kepada *politic of attraction* daripada menggunakan *military approuch* untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Bagi mereka yang menyerah diberikan amnesti dan bagi mereka yang melawan diberikan hukuman.

Pemerintah kolonial Amerika Serikat pertama kali juga menjalankan program pasifikasi melalui pendekatan militer untuk mengintegrasikan seluruh wilayah Mindanao. Hal ini menjadi salah satu periode perang yang berdarah-darah sampai dengan tahun 1914. Namun demikian pada tahun 1914 Pemerintah Amerika Serikat menghentikan kampanye militer melawan Bangsa Moro dan mengubah kebijakannya menjadi *policy of attraction*. Pemerintah kolonial mulai menempuh langkah-langkah akomodasi terhadap kelompok-kelompok perlawanan yang ada. Hal ini seringkali dilakukan terhadap masyarakat umum dengan menggunakan kebijakan yang disebut sebagai *candy and chocolate diplomacy*. Tentara-tentara Amerika memberikan permen dan cokelat kepada anak-anak. Cara tersebut banyak mendapatkan simpati baik dari masyarakat maupun pemimpin Moro.

Hal ini sangat menguntungkan pemerintah kolonial untuk meratakan jalan ke arah konsolidasi yang lebih luas baik angkatan bersenjata maupun kekuasaan pemerintahannya. Namun demikian terhadap kebijakan ini, para pemimpin Filipino mengajukan syarat peningkatan partisipasi Filipino dalam birokrasi kolonial dan perlunya kebijakan pemerintah yang mendorong masyarakat Bangsa Moro berintegrasi ke Filipina. Tuntutan ini berimplikasi pada penghapusan Provinsi Moro dan pemberlakuan hukum-hukum untuk orang Filipina kepada Bangsa Moro pada tanggal 1 September 1914.

Salah satu implikasinya adalah pada *policy of settler of colonialism* yang secara aktif mendorong orang-orang Filipino bermigrasi ke wilayah-wilayah Bangsa Moro. Mengenai dampak dari kebijakan ini akan diterangkan lebih detail pada sub bab represi sosial budaya dan pembagian sumber daya. Bangsa Moro melihat hal ini sebagai awal dari kebijakan Filipinosasi yang akan membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Moro sebagai satu komunitas pada masa mendatang. Perjuangan-perjuangan dilakukan baik melalui jalan parlemen maupun cara-cara bersenjata. Pemimpin-pemimpin Bangsa Moro menghendaki agar wilayah Mindanao dijadikan sebagai bangsa yang terpisah dengan Filipino.

Dalam era perjuangan kemerdekaan dari Amerika Serikat, kalangan muslim tidak berpartisipasi aktif seperti bangsa Filipino lainnya. Mereka berpendapat bahwa di bawah perlindungan Amerika Serikat akan lebih baik daripada hidup bersama bangsa Filipino. Pada tahun 1935, 100 datu meminta Pemerintah Amerika untuk tidak memasukkan Mindanao ke dalam negara Filipina yang merdeka (Ismael Villareal, 2000). Ketika Amerika memberikan kemerdekaan pada tanggal 4 Juli 1946, Bangsa Moro masih merasa tidak puas dengan kebijakan ini. Datu-datu dari ranao telah memberikan petisi kepada Pemerintah Amerika untuk mengecualikan tanah mereka ke dalam '*Philippine Nation State*'. Dengan demikian di mata Bangsa Moro, timbulnya gerakan-gerakan separatis disebabkan karena mereka menganggap bahwa Pemerintah Filipina adalah pemerintahan luar negeri atau "*gubirno na saruwang a tau.*"⁵²

2. Represi terhadap Identitas Sosial Budaya

Represi terhadap identitas sosial dan budaya Bangsa Moro telah dilakukan sejak masa pemerintahan kolonial Spanyol. Pemerintah kolonial berhasil dalam meyakinkan Bangsa

⁵² Salam Hashim, Op. Cit. Hal. 63.

Filipino yang pada umumnya sebagian besar beragama Kristen untuk memiliki pandangan-pandangan yang chauvinistik terhadap Bangsa Moro maupun suku-suku asli yang lain (G. M. Alim, 1995). Sebagai contohnya *The moro-moro play* yang merupakan bagian integral dari banyak festival budaya dan agama diyakinkan kepada masyarakat yang sudah ditaklukkan agar mereka menganggap bahwa sesuatu yang *wicked and treacherous* identik dengan muslim dan sebaliknya sesuatu yang baik dan bagus dilakukan oleh orang Kristen. Bangsa Moro dianggap sebagai *juramentados, herejas, feroces* yang dihukum di neraka.

Hal tersebut diperkuat oleh TJS George yang mengatakan sebagai berikut:

"...Governors told local chieftains to remember that the doctrine of mahoma is a false and evil law. Bishop Salazar called Islam 'that pestilential fire'. The Jesuit Pio Pie described muslim as 'unexcelled pirates'. Betraying ignorance of both the people and the faith they set out to crush, another priest wrote as late as 1892 that Islam among such 'a barbarous and backward race as the Moros of Mindanao and jolo has a little importance...'

Berkaitan dengan perbedaan budaya antara Bangsa Moro dan Filipino yang diduga sebagai penyebab konflik antara kedua etnik ini, Prof. Thomas Mc. Kenna dalam bukunya *Muslim Rulers and Rebels: Everyday Politics and Armed Separatism in the Southern Philippines*⁵³ mengatakan bahwa perbedaan budaya tidak secara langsung menciptakan konflik⁵⁴. Masyarakat dan pemerintah Filipina seringkali cenderung melihat muslim sebagai orang yang terbelakang dan tidak dapat dipercaya karena perlawanan mereka terhadap bangsa Spanyol. Sementara kalangan muslim cenderung khawatir terhadap tujuan dari pemerintah dan bangsa Filipino yang mayoritas kristen. Perbedaan prasangka inilah yang tidak terselesaikan dan beberapa dasawarsa kemudian berkobar menjadi peperangan.

Perbedaan prasangka tersebut bertambah semakin besar ketika elit-elit politik Filipina tidak memahami masalah ini. Ketika pemerintahan persemakmuran Filipina didirikan pada tahun 1935, pemimpin-pemimpin baru di Manila menganggap bahwa semua

⁵³ Diterbitkan oleh University of California Press, Berkeley, 1998

⁵⁴ Lihat Historical roots of Muslim Separatism in the Philippine. www.asiasource.org.

golongan yang hidup dan berkembang di masyarakat akan bersatu padu dan bekerja sama di belakang kepemimpinan nasional⁵⁵. Para pemimpin tersebut mengesampingkan konflik dan perbedaan yang ada di masyarakat terutama konflik antara etnik-etnik yang agama Islam dan Kristen. Namun demikian, Pemerintah persemakmuran menggunakan cara berfikir kolonial bahwa bangsa-bangsa non-Kristen dapat menyesuaikan diri dengan doktrinisasi atau pembaratan.

Contohnya adalah ketika Manuel Quezon, presiden pertama persemakmuran, mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi sultan-sultan/datu-datu dan bahwa undang-undang nasional akan diterapkan bagi semua golongan masyarakat baik kristen dan Islam, umat Islam memberikan reaksi yang sangat keras. Masyarakat Islam telah memiliki komunitas dengan tata politik, hukum, dan sosial budaya tersendiri berdasarkan syariah. Sikap Manuel Quezon tersebut mendatangkan kebencian dari kalangan pemimpin maupun komunitas-komunitas Islam.

Kalangan Islam sangat membenci sistem pendidikan progresif ala barat yang diajarkan oleh Bangsa Spanyol dan Amerika⁵⁶. Sistem tersebut sebenarnya lebih ditujukan untuk menciptakan suatu kerakyatan nasional yang baru dan memperkuat identitas nasional untuk negara baru yang akan dibentuk kemudian. Buku-buku sejarah dituliskan bahwa orang-orang Islam yang memerangi Bangsa Spanyol dan Amerika adalah perampok-perampok dan pedagang-pedagang budak. Selain itu, binatang-binatang yang dibenci oleh umat Islam dijadikan sebagai karakter dalam buku-buku cerita anak-anak dan sebagai ilustrasi dalam latihan-latihan buku teks di sekolah-sekolah. Hal ini berakibat orang Islam tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah ala barat. Menurut wawancara dengan Maharlika Alonto, mahasiswi UP (*The University of the Philippines*) dari Maranao, represi terhadap identitas sosial budaya juga dilakukan secara fisik dengan menyerang umat Islam pada saat menjalankan ibadah agamanya seperti yang terjadi pada serangan terhadap Camp Abu Bakar pada hari raya Idul Adha Februari 2003. Serangan ini banyak menimbulkan korban sipil yang cukup banyak dan media masa di Manila menganggapnya sebagai serangan terhadap teroris. Selain itu, terdapat diskriminasi terhadap orang-orang Moro dalam mencari pekerjaan baik negeri maupun swasta sehingga memiliki identitas sebagai orang Moro adalah sesuatu yang tidak menguntungkan.

⁵⁵ Cesar A. Majul, Op. Cit. hal. 18

⁵⁶ Cesar A. Majul, Op. Cit. hal. 19

Selain itu, kebutuhan dasar masyarakat Bangsa Moro tidak diurus oleh Pemerintah sehingga menimbulkan tuntutan pembangunan sosial ekonomi masyarakat minoritas sebagaimana yang telah dilakukan terhadap mayoritas Filipino. *Equality* menjadi isu yang penting baik dalam sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Selama ini yang terjadi adalah sebatas pengakuan terhadap perbedaan (pluralisme) secara simbolis tetapi belum menyentuh pembukaan akses terhadap minoritas dalam ruang publik (multikulturalisme). Adapun hasil wawancara dengan Maharlika selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

“In Idul Ada prayer on February 2003, AFP had bombardir North Cotabato at moslem region. The media did not explore balance, this is not fair for Moro people. Thee is a strong discrimination for moslem mainly in walking a job and holiday. After graudating from college, my friend had asked by interviewer about religion. Being minority in the Philip-pine I feel disadvantages than advantages. Second is holiday. The government only give a holiday in Idul Fitri and Idul Adba but in Mindanao some regions holiday in Friday. Minority rights are not respected. The most important issue is economic and social developemnt for minorities. The government has to provides basic needs for minorities as well as threatment to majorities. The government does not conduct social and economic developemnt for Bangsa Moro people.”

Dewasa ini, hampir tidak terdapat perubahan cara pandang etnik Filipino terhadap Bangsa Moro menjadi cara pandang yang lebih baik. Sebagai contohnya mereka memandang orang-orang Islam yang terdiri dari orang-orang Bangsa Moro sebagai sebagai orang yang malas, tinggal di daerah-daerah kumuh, menggunakan kekerasan, dan dekat dengan kriminalitas. Tetapi tidak semua memandang seperti demikian, masih ada LSM-LSM dan perguruan tinggi seperti *the University of the Philippines* (UP) yang bersimpati untuk membela hak-hak Bangsa Moro.

3. Pembagian Sumberdaya di Mindanao

Pembagian sumberdaya yang tidak adil antara masyarakat Bangsa Moro dengan Filipino berakar dari masa pemerintahan kolonial Amerika Serikat. Sesudah Amerika berhasil melakukan kontrol terhadap seluruh wilayah Mindanao, mereka mendeklarasikan bahwa daerah tersebut adalah tanah publik atau milik umum termasuk wilayah-wilayah yang didiami oleh Bangsa Moro sejak zaman nenek moyang. Pemerintah kolonial segera mengeluarkan beberapa kebijakan seperti penguasaan tanah, *forced migration*, dan membangun pendidikan model barat.

Kebijakan *forced migration* yang memindahkan penduduk dari Filipina utara dan tengah ke selatan dilakukan dengan intensif. Pemerintah memberikan pinjaman lunak bagi penduduk yang ingin ke Mindanao tetapi tidak memiliki modal. Bahkan pada tahun 1902 pemerintah kolonial menetapkan UU registrasi pemilikan tanah yang menentukan luas tanah yang boleh dimiliki secara individual. Sebelum pemerintahan Persemakmuran, tanah yang diperuntukkan bagi setiap orang Bangsa Moro adalah 16 Ha tetapi sesudah persemakmuran melalui Undang-Undang No. 141. menjadi 4 Ha. Hal ini berlawanan dengan prinsip-prinsip multikulturalisme karena masyarakat pendatang diberikan kesempatan untuk memiliki tanah yang lebih luas, sementara masyarakat pribumi tidak diberikan kesempatan tersebut.

Pemerintah Amerika Serikat dan Filipina telah melakukan usaha-usaha secara sistematis untuk memperluas dominasi kekuasaan orang-orang Kristen yang merupakan pendatang melalui penguasaan tanah masyarakat Bangsa Moro. Untuk memperoleh deskripsi mengenai kebijakan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Daftar Undang-Undang Kepemilikan Tanah di Mindanao pada Masa Kolonial

No.	Tanggal	Undang-Undang	Luas Tanah yang diijinkan untuk dimiliki Individu
1.	7 Oktober 1903	926	16 Ha
2.	29 November 1919	2874	16 menjadi 24 Ha dan membeli sampai 100 Ha
3.	12 Januari 1924	3164	Mengijinkan individu lebih dari 1 patent
4.	19 Januari 1925	3219	Mengijinkan pembelian tanah sampai 144 Ha
5.	10 Februari 1927	3346	Memfasilitasi pemerolehan tanah hanya untuk satu homestead
6.	8 Juni 1939	456 (Com. Act)	

Sumber: Samuel K Tan, *The Economic Dimension of Moro Secessionism, Mindanao Studies Report 1995/No. 1, CIDS, Manila, 1995*

Sesudah pemerintahan persemakmuran dibentuk, kebijakan migrasi ditingkatkan secara besar-besaran. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi perselisihan mengenai tanah di provinsi-provinsi pusat di Pulau Luzon dan juga ditujukan untuk mengurangi kepadatan

penduduk di daerah-daerah padat. Selain itu kebijakan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan memutuskan ambisi kolonial Jepang.⁵⁷ Pemerintahan persemakmuran kemudian mengirimkan ribuan orang Kristen untuk tinggal di wilayah-wilayah yang sedikit penduduknya dan harus menghormati hak-hak orang Islam. Pemerintah mulai membangun sarana dan prasarana serta mempermudah proses kepemilikan tanah. Hal inilah yang menjadi bibit bagi pertentangan etnik yang berkembang di kemudian hari.

Kebijakan ini berimplikasi pada perubahan status Bangsa Moro dari etnik mayoritas di Mindanao menjadi etnik minoritas.⁵⁸ Pada tahun 1950-an, lebih dari 500.000 orang Kristen telah menetap di Cotabato dan menjadikan komposisi muslim menjadi 30%. Pada tahun 1918 di Lanao terdapat 24 keluarga kristen, kemudian tahun 1941 berkembang menjadi 8.000 orang dan pada tahun 1960-an menjadi 93.000 orang. Bahkan pada masa Presiden Ramon Magsaysay, 1953-1957, Pulau Mindanao dijadikan tempat pembuangan bagi para penjahat-penjahat dan tahanan-tahanan politik dari kalangan komunis. *Camp-camp* tahanan tersebut dan koloni-koloni pertanian dibangun di tengah-tengah pemukiman masyarakat Islam.

Untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai perkembangan dominasi etnik Filipino terhadap Bangsa Moro dari tahun 1918 sampai tahun 1980 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Jumlah dan Komposisi Penduduk di Mindanao, 1918 – 1980

No.	Etnik	1918	%	1970	%	1980	%
1.	Kristen	159.132	22	6.119.026	75	7.131.351	65
2.	Muslim	358.968	49	1.583.043	19	2.504.232	23
3.	Lumads	205.555	29	1.269.660	5	1.269.660	12
	Total	723.625	100	8.146.652	100	10.905.243	100

Sumber: Samuel K. Tan, *The Economic Dimension of Moro Secessionism, Mindanao Studies Report 1995/No. 1, CIDS, Manila, 1995*

⁵⁷ Cesar A Majul, Op. Cit. Hal. 19 dan 20.

⁵⁸ Cesar A Majul, Op. Cit hal.. 19

Selama 50 tahun kebijakan migrasi telah merubah komposisi penduduk di Kepulauan Mindanao secara radikal. Komposisi masyarakat Kristen pada tahun 1918 sebanyak 22% dari total penduduk menjadi 75% pada tahun 1970 dan 65% pada tahun 1980. Dewasa ini dari 13 Provinsi yang dibentuk oleh Pemerintah Filipina di Kepulauan Mindanao, Sulu, dan Palawan, masyarakat Muslim atau Bangsa Moro hanya menjadi mayoritas di lima provinsi termiskin yaitu Sulu, Tawi-tawi, Basilan, Cotabato, dan Lanao del Sur. Wilayah lain didominasi oleh pendatang yang mayoritas adalah Kristen dan etnik Filipino. Pada waktu plebisit dilakukan pemerintah Filipina untuk membentuk ARMM, hanya 5 provinsi tersebut yang mendukung sementara provinsi lainnya menolak. Kepulauan Mindanao, Sulu, dan Palawan sekarang ini dihuni oleh Kristen, Muslim, dan Lumads.

Perubahan komposisi penduduk berimplikasi pada terciptanya ketidakmerataan distribusi kepemilikan tanah. Ketimpangan dalam kepemilikan tanah berawal dari perbedaan konsep penguasaan tanah antara sistem modern yang diterapkan pemerintah dan tradisional yang dipahami oleh Muslim dan Lumads. Kepemilikan tanah dalam konsep tradisional menekankan kepada kepemilikan kolektif sehingga penggunaan tanah menjadi basis bagi hak-hak individu untuk memanfaatkan sumberdaya dan mejadi matapencaharian.⁵⁹ Hukum modern yang lebih menekankan pada kepemilikan individual lebih banyak menguntungkan orang-orang pendatang yang sebagian besar adalah Kristen. Orang-orang muslim banyak yang buta huruf sehingga mereka tidak bisa mengajukan kepemilikan tanah kepada pemerintah seperti orang kristen. Padahal masyarakat non-muslim telah didorong oleh pemerintah untuk mengajukan kepemilikan tanah secara besar-besaran. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk non-Kristen dan kebijakan perluasan tanah untuk pendatang, jumlah perusahaan-perusahaan asing terutama dari Amerika Serikat yang menanamkan investasinya semakin meningkat. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa dominasi Kristen dan penguasaan lahan adalah awal dari imperialisme terhadap Bangsa Moro. Perkembangan kepemilikan tanah perusahaan-perusahaan asing ini dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁹ Sumber: Samuel K Tan, *The Economic Dimension of Moro Secessionism*, Mindanao Studies Report 1995/No. 1. CIDS, Manila, 1995

Tabel 3.3 Perkembangan Kepemilikan Tanah untuk Perusahaan-Perusahaan di Mindanao

Tahun	Perusahaan	Lokasi	Luas Tanah (Ha)
1908	Thomas Scheineder Edward E. Christensen Hardin Monroe Joyce	Lanipao, Malita Hagoney, Davao Culaman, Davao	50 936 1.000
1930	Agricultural Colonies	Cotabato, Davao, Zamboanga, Agusan, dan Lanao.	5.000-20.000

Sumber: Samuel K Tan. *The Economic Dimension of Moro Secessionism. Mindanao Studies Report 1995/No. 1. CIDS, Manila, 1995*

Seperti pada periode kolonial dan paska kolonial, dewasa ini Pemerintah Filipina melaksanakan program perumahan dan pembukaan daerah pertanian yang didirikan di tanah Bangsa Moro atas nama pembangunan. Usaha-usaha pembangunan ini seringkali melanggar hak-hak ulayat dari masyarakat asli. Penggusuran-penggusuran terhadap masyarakat Bangsa Moro seringkali dilakukan untuk kepentingan pembangunan. Contohnya antara lain adalah sebagai berikut.⁶⁰ Dua puluh dua keluarga miskin Bangsa Moro diusir dari General Santos untuk meratakan jalan bagi pembangunan konstruksi Departemen Perikanan Filipina. Komunitas-komunitas Bangsa Moro digusur untuk membangun taman dan hotel-hotel bagi wisatawan. Pemakaman-pemakaman muslim juga digusur untuk pembangunan terminal bus dan lapangan udara. Masyarakat Bangsa Moro pada kenyataannya menjadi masyarakat miskin di kampung halamannya sendiri. Data statistik nasional pada tahun 2000 menunjukkan bahwa 4 provinsi ARMM yaitu Sulu, Tawi-tawi, Maguindanao, dan Lanao del Sur termasuk 10 besar provinsi termiskin di Filipina⁶¹. Adapun gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁶⁰ Guiamel M. Alim, Lok Cit.

⁶¹ Parameter yang digunakan adalah *the annual poverty threshold* yaitu sejumlah kebutuhan pokok makanan dan non-makanan yang dibutuhkan setiap individu sebesar P 11.605 (2000) dan P 9.843 (1997).

Tabel 3.4 Daftar 10 Provinsi Termiskin di Filipina pada Tahun 2000

Provinsi	Proporsi penduduk miskin 1997 (%)	Proporsi penduduk miskin 2000 (%)	Urutan kemiskinan 1997	Urutan kemiskinan 2000
Sulu*	67	63	1	1
Masbate	61	63	2	2
Tawi-tawi*	35	57	40	3
Ifugao	58	56	4	4
Romblon	53	55	8	5
Maguindanao*	42	55	27	6
Lanao del Sur*	56	55	7	7
Sultan Kudarat	37	54	38	8
Camiguin	32	53	49	9
Camarines Norte	50	53	10	10
National	28	28		

Sumber: 1997 and 2000 Provincial Poverty Statistics, Statistik Nasional Filipina dalam nscb.gov.ph

* = provinsi yang tergabung dalam ARMM.

Sebagian besar masyarakat Bangsa Moro tidak bisa melakukan investasi atau berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana bangsa Filipino dan kaum pendatang lainnya. Sebagian besar orang-orang Moro bekerja sebagai buruh dalam proyek-proyek ekonomi tersebut. Industrialisasi dan pembangunan yang dilakukan pemerintah di atas tanah Bangsa Moro merupakan salah satu akar permasalahan bagi tuntutan untuk penentuan nasib sendiri.⁶²

Salah satu contoh marginalisasi Bangsa Moro dalam pembangunan industri diilustrasikan oleh Fred Hills dalam *Islamic Horizons* tanggal 17 April 1996 dalam artikelnya "*Ethnic Cleansing in Mindanao.*" Dia mencontohkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air sepanjang 30 km. Bendungan tersebut membentang sepanjang *Agus river* dan menjadi pusat listrik bagi Iligan dan Cagayan de Oro. Proyek ini telah merusak ekosistem Danau Lanao dan sungai-sungai di sekitarnya dimana Masyarakat Maranao telah menggantungkan

⁶² Guiamel M. Alim, Lok Cit

kehidupannya selama ratusan tahun dari tempat ini. Dewasa ini separuh dari air danau digunakan untuk pembangkit listrik, sementara masyarakat Marawi menderita karena matapencahariannya mengalami polusi. Ketika menghadapi perlawanan dari masyarakat, Executive NPC mengatakan bahwa mereka yang melawan adalah bandit-bandit yang mencoba memutus aliran listrik.

Energi yang murah mendorong investor untuk mendirikan industri-industri di sepanjang pantai utara Mindanao. Misalnya adalah *The National Steel Company*, sebuah perusahaan baja terbesar di Filipina yang diberikan tugas untuk mengembangkan pembangunan industri di Mindanao Utara. Walaupun perusahaan ini berkedudukan di daerah muslim yaitu sebelah barat Iligan City tetapi hampir 4.000 orang pekerjanya adalah orang-orang Kristen dari Visayas. Sebagian besar dari mereka didatangkan untuk bekerja di pembangunan projek perkebunan pada tahun 1970-an.

Dalam menghadapi tuntutan untuk merekrut orang-orang muslim, salah satu direktur mengatakan bahwa 5 sampai 10, maksudnya 5 sampai 10 dari 4.000 orang. Hal ini disebabkan karena orang muslim tersebut tidak berpendidikan untuk bekerja di pabrik baja. Hal tersebut merupakan upaya-upaya sistematis yang dilakukan oleh masyarakat Filipino terhadap marginalisasi Bangsa Moro. Hal serupa juga dilakukan dalam pembangunan sumberdaya manusia dimana Walikota Iligan telah mengusir semua pelajar muslim dari sekolah-sekolah pemerintah.

Dewasa ini, keadaan masyarakat Bangsa Moro tengah berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka baik secara ekonomi maupun sosial budaya⁶³. Kehidupan perekonomian Bangsa Moro bertambah sulit. Merekalah yang menjadi mayoritas dalam kelompok termiskin di Mindanao. Sebagian besar bekerja sebagai petani kecil dan nelayan tradisional. Petani-petani Moro sebagaimana petani miskin di Asia lainnya memiliki produktivitas yang sangat rendah, penguasaan teknologi yang tidak memadai, dan di bawah tekanan kapitalisasi industri pertanian modern. Pemerintah Filipina tidak memperhatikan secara serius untuk memperbaiki nasib mereka. Subsidi pertanian pun tidak pernah diberikan kepada mereka. Nelayan-nelayan kecil pun mengalami nasib yang sama. Mereka tidak bisa bersaing dengan nelayan-nelayan dari Jepang dan Taiwan yang menggunakan kapal-kapal besar dan teknologi tinggi.

⁶³ Guiamel M. Alim, Lok Cit.

Sebagian petani-petani Moro dewasa ini bekerja pada keluarga-keluarga Kristen. Pada masa panen mereka kembali ke desa-desa mereka untuk menuai padi dan mempersiapkan benih untuk periode penanaman selanjutnya. Sebagian yang lain bekerja sebagai pedagang kaki lima, penarik becak, penjual sayur keliling, kuli pasar, dll. Bahkan sebagian dari mereka mulai tertarik untuk menjalani pekerjaan sebagai prostitusi meskipun dilarang oleh Islam. Ratusan ribu perempuan lainnya pergi ke luar negeri terutama Timur Tengah untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita. Banyak dari mereka pulang kampung dengan cerita yang mengerikan. Kekurangan gizi dan tingkat pertanian cukup tinggi di daerah pedesaan Mindanao.

Kebijakan migrasi seperti telah diterangkan di muka telah membawa dampak pada penguasaan sumberdaya yang tidak seimbang antara kaum pendatang yang didukung pemerintah kolonial dengan penduduk asli. Peningkatan jumlah orang Kristen, pembangunan ekonomi yang maju pada daerah-daerah pemukiman Kristen lama kelamaan menimbulkan kebencian dan dugaan akan adanya pembubaran komunitas muslim. Hal inilah yang menjadi titik tolak proses marginalisasi Bangsa Moro dan eksploitasi sumber-sumber ekonomi di Mindanao yang diduga masih berlangsung secara sistematis hingga sekarang.

4. Ethic Cleansing terhadap Bangsa Moro

Represi dan kekerasan yang akan dibahas dalam bagian ini adalah dalam periode paska kolonial walaupun Bangsa Moro sendiri telah mendapatkan tekanan-tekanan militer sejak periode kolonial. Tindakan represi pada masa kolonial telah dibahas secara mendalam dalam bagian sebelumnya. Represi terhadap Bangsa Moro dilakukan baik oleh etnik Filipino yang mayoritas Kristen maupun oleh aparat keamanan Filipina yang diduga lebih banyak memihak etnik Filipino.

Ethnic cleansing pada dasarnya adalah praktik-praktik penghilangan (*elimination*), pengurangan (*minimalization*), dan peminggiran (*marginalization*) terhadap individu-individu yang berbeda secara warna kulit, suku bangsa, kebudayaan, bahasa, atau agama dan menolak eksistensi negara bangsa. *Ethnic cleansing* dapat berupa pembersihan individu-individu secara fisik ataupun secara struktural melalui sistem politik, sosial, dan ekonomi. Bentuk yang kedua ini seringkali disebut sebagai kekerasan struktural yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang ataupun kelompok masyarakat melalui penciptaan struktur sosial yang menindas.

Tindakan kekerasan fisik terhadap Bangsa Moro pertama kali terjadi di Upi berkaitan dengan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan November 1971.⁶⁴ Manuel Tronto, mantan perwira polisi, ingin menjadi walikota Upi dan meminta temannya untuk mengusir orang-orang Islam dari Upi untuk menjamin kemenangannya. Penyerangan ini dikoordinir oleh organisasi milisi Kristen yang dikenal sebagai ILAGA. Kalangan muslim mulai merespon serangan tersebut dengan membentuk milisi-milisi yang sejenis di Cotabato yang terkenal dengan sebutan *blackskirt* dan *barracuda*.

Cesar Majul (1989) mengatakan bahwa sebenarnya konflik kekerasan yang terjadi lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik elit lokal dalam menghadapi Pemilu November 1972 karena masing-masing milisi menjadi dasar kekuasaan masing-masing elit lokal. Pada akhir tahun 1970 terjadi pertempuran besar-besaran antara ILAGA dan milisi kristen melawan *blackskirt*, *barracuda*, dan kelompok perlawanan muslim bersenjata. Hal ini menyebabkan sedikitnya 30.000 orang Islam, Kristen, Tiruray, telah menjadi pengungsi di Maguindanao dan Maranao. Pada awal tahun 1970-an kalangan muslim telah menghadapi kebijakan *genocidal* yang diduga diprakarsai oleh Pemerintah Filipina. Permusuhan dan pembantaian terhadap Bangsa Moro dilakukan oleh ILAGA yang didukung militer, Organisasi ini diduga seringkali bergaul dengan penguasa-penguasa pemerintah dan kalangan penegak hukum serta dilegalkan di bawah payung Civilian Home Defence Force (CHDF) of the Department of National Defense.⁶⁵ ILAGA seringkali dilaporkan tidak pernah dituntut secara hukum (*impunity*) atas kejahatan yang dilakukannya baik di tingkat lokal maupun nasional.

Adapun praktik-praktik *ethnic cleansing* yang terjadi pada awal munculnya gerakan separatis antara lain adalah sebagai berikut. Pada awal tahun 1970-an, peperangan dan konflik antara Islam dan Kristen berkembang hampir di seluruh Mindanao. Cotabato merupakan provinsi yang paling berbahaya di Filipina. Pembantaian terhadap masyarakat muslim terus berlangsung dari kota ke kota. Pada bulan Juni 1971, pembunuhan besar-besaran terhadap masyarakat muslim secara terang-terangan dan terbuka oleh komunitas Kristen pertama kali terjadi di Manili, Carmen, Cotabato utara.

⁶⁴ Cesar A. Majul, Op Cit. hal. 47-52

⁶⁵ Ethnic Cleansing against muslims revisited, www.luwaran.com

Seluruh penduduk Carmen pada waktu itu adalah muslim. Pembantaian tersebut berawal dari undangan beberapa tokoh Kristen pada tanggal 9 Juni 1971 untuk membicarakan perdamaian. Masyarakat muslim disarankan untuk berkumpul di Masjid. Orang-orang muslim bersedia datang ke tempat tersebut dengan harapan bahwa dialog akan meredakan ketegangan antara Kristen dan Muslim yang telah menyebar ke seluruh Mindanao. Pada akhirnya yang terjadi adalah bukan sebuah dialog melainkan milisi-milisi ILAGA langsung menembaknya. Cesar Majul (1989) mengatakan bahwa dalam insiden tersebut 70 orang muslim baik laki-laki, perempuan, dan anak-anak terbunuh oleh 20 orang anggota ILAGA.⁶⁶

Manila Times menceritakan bahwa 70 orang terbunuh dan 17 luka-luka. Dari korban meninggal dalam insiden tersebut, setidaknya 29 orang perempuan dan 13 anak-anak. Sebuah surat kabar lain memberitakan bahwa diantara korban anak-anak terdapat seorang bayi yang berumur 3 bulan dan masih menyusui ibunya. Selain melakukan pembunuhan milisi-milisi tersebut membakar sekolah-sekolah, menghancurkan rumah-rumah, dan membakar seluruh daerah tersebut.

Pembantaian masyarakat muslim di Manili menyebabkan tanda tanya yang besar bagi kalangan muslim karena daerah tersebut di bawah perlindungan kepolisian. Mengapa pada saat pembantaian kepolisian tidak segera bertindak menyelamatkan mereka. Kepolisian datang ketika ILAGA telah menarik mundur. Hal ini menimbulkan prasangka yang semakin kuat bahwa kepolisian dan ILAGA saling bekerja sama untuk mengusir dan membubarkan orang-orang Islam terutama Bangsa Moro dari seluruh Mindanao. Bukti lain adalah ketika terjadi pertempuran antara laskar Kristen dan Islam, pihak kepolisian seringkali menyerang pihak muslim. Kalangan politisi muslim mencoba membujuk pemerintah pusat untuk membongkar persengkongkolan ini. Namun demikian hal sangat sulit diatasi karena politisi-politisi Kristen di balik penyerangan ini adalah anggota dari partai politik berkuasa⁶⁷. Selanjutnya sebagian dari kelompok-kelompok bersenjata muslim mempersatukan diri ke dalam Moro Independent Movement (MIM) untuk melindungi teritori mereka dari serangan kaum pendatang.

⁶⁶ Cesar A. Majul, Op Cit. hal. 47-52

⁶⁷ Cesar A. Majul, Op Cit. hal. 47-52

Sebanyak 70.000 orang pengungsi melarikan diri dari Carmen menuju kota-kota di Cotabato. Pola-pola genocida menyebar ke seluruh Cotabato. Sekitar 800 orang terbunuh dan 2000 rumah terbakar di 3 kota sepanjang 6 bulan. Insiden Manili mendorong protes yang sangat keras dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat Muslim Filipina. Tiga puluh tokoh muslim Filipina di media massa menyatakan bahwa mereka mengkhawatirkan keberadaan komunitas muslim di Filipina. Kota Carmen kemudian ditinggalkan oleh orang-orang muslim dan digantikan oleh komunitas kristen. Dewasa ini Carmen telah berkembang menjadi kota berpenduduk mayoritas kristen.

C. Gerakan Separatis Bangsa Moro

Illegal dan immoral annexation, represi terhadap identitas budaya, ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi, *forced migration*, dan *ethnic cleansing* terhadap Bangsa Moro mendorong gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintah dan masyarakat pendatang yang pada umumnya Kristen-Filipino. Hal ini sejalan dengan Ted Robert Gurr (1998) yang mengatakan bahwa perlakuan yang tidak adil dari etnik mayoritas, kompetisi dengan kelompok-kelompok lain untuk mendapatkan akses kekuasaan dalam negara baru, pola-pola kebijakan negara mentransformasikan kekuatan komunal menjadi gerakan protes dan pembrontakan etnik minoritas.

Menurut wawancara dengan Zulkifli Wadi, pengajar dari Islamic Institute Studies of University of the Philippines (UP), bahwa gejolak-gejolak atau protes terhadap integrasi Filipina terhadap Bangsa Moro sudah terjadi sejak Filipina diberi kemerdekaan. Namun demikian protes dan gejolak ketidakpuasan tersebut bersifat sporadis, lokal, dan tidak terorganisir. Hal tersebut dikatakan sebagai berikut:

“In 1946 had appearance rebellion against the Philippines but unorganized and locally. The only problem is not nationalism, there was only individual. Sulu and Mindanao undertaken uprising and rebellion in 1946. There was 50 times rebellion. The opposition for moslem against annexation because the GRP imposed taxation of land, come, and imprison the people.”

Sejak tahun 1956 terdapat 50 kali pembrontakan Bangsa Moro terhadap Pemerintah Filipina yang berusaha mengenakan pajak tanah. Namun perlawanan tersebut masih bersifat individual karena tidak adanya ikatan dan identitas kebangsaan yang mengikat seluruh etnik-etnik Bangsa Moro.

Sementara, Ismael Z. Villareal (2000) mengatakan Konflik yang pertama kali muncul adalah konflik horizontal antara Bangsa Moro dan Filipino yang dipicu oleh keterpinggiran masyarakat Bangsa Moro dari daerah yang ditempati secara turun temurun beserta sumberdaya yang dimilikinya⁶⁸. Peperangan bersenjata antara dua etnik seringkali muncul di Mindanao seperti pada awal tahun 1950an Datu Haji Kamlan memimpin sebuah revolusi di Sulu selama beberapa tahun. Sistem *cattle rustling* yang diterapkan oleh kedua belah pihak mendorong konflik meluas ke seluruh Mindanao.

Sebagaimana diterangkan di muka pada akhir tahun 1960-an, terjadi konflik antara Laskar Kristen “Ilaga” dengan Laskar Bangsa Moro “*Blackskirts and Barracudas*” yang meluas di seluruh Mindanao. Pada tahun 1968, dua bulan sesudah terjadinya insiden Corregidor didirikanlah *Moro Independent Movement* (MIM) oleh Utdog Matalam⁶⁹ di Cotabato. MIM bertujuan untuk mendirikan republik Islam yang mencakup Mindanao, Sulu, dan Palawan. Di samping itu MIM dimaksudkan untuk merespon pendudukan atau penyerangan orang-orang Kristen terhadap Bangsa Moro.

Karena tekanan-tekanan dari pemerintah dan orang-orang Filipino terhadap Bangsa Moro semakin meningkat baik secara militer maupun represi budaya, didirikanlah organisasi perlawanan yang bersifat nasional dengan merekonstruksi identitas bersama yang sebelumnya tidak pernah dilakukan yaitu “Bangsa Moro”. Organisasi ini dikenal dengan nama MNLF (*The Moro National Liberation Front*).

Menurut wawancara dengan Dr. Samuel K Tan, bahwa istilah “Moro” pertama kali diberikan oleh Spanyol untuk orang-orang Mindanao yang selalu mengadakan perlawanan terhadap Pemerintahan Kolonial Spanyol. Moro berarti primitif (*safitry*), kriminal (*banditary*), kekerasan (*violance*), dan semua aspek-aspek negatif. Namun demikian Nur Misuari mencoba menggunakan istilah ini menjadi identitas bersama untuk menyatukan semua etnik di Kepulauan Mindanao baik yang beragama Islam, Kristen, maupun Lumad.

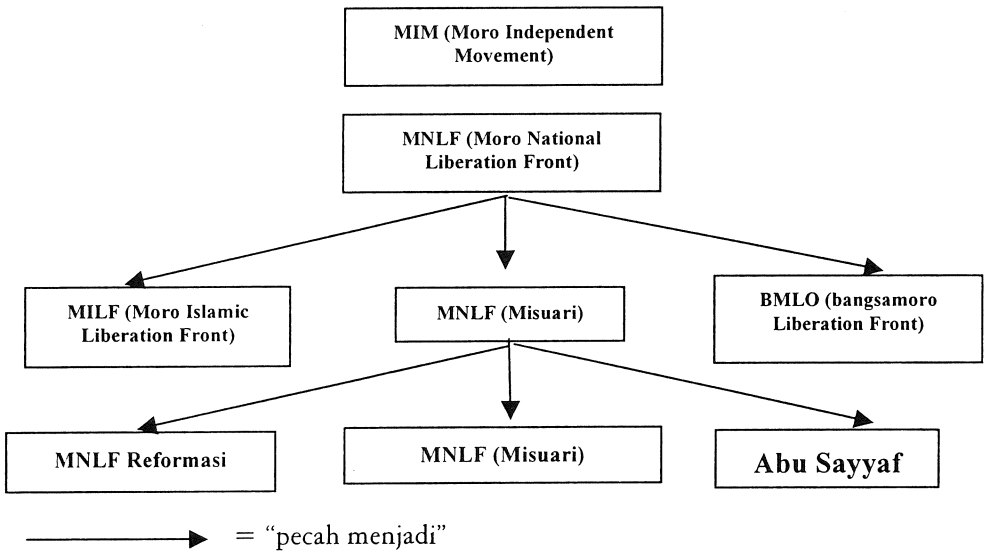
⁶⁸ Ismael Villareal adalah seorang Letnan Jenderal Angkatan Bersenjata Filipina, Lihat artikelnya “A Journey Towards Lasting Peace” dipublikasikan oleh The Philippine Graphic, 6 Maret 2000.

⁶⁹ Utdog Matalam adalah seorang pemimpin tradisional dari Maguindanao yang menjabat Gubernur Cotabato pada akhir tahun 1960-an. Pemimpin ini berhasil mempersatukan laskar-laskar di Maguindanao menjadi satu organisasi yaitu Moro Independent Movement (MIM). MIM dibentuk untuk mempertahankan masyarakat dan tanah Bangsa Moro dari serangan kaum pendatang yang didukung pemerintah Filipina.

Identitas bersama sangat diperlukan karena selama ini tidak pernah ada satu komunitas politik yang menyatukan seluruh etnik di daerah ini. MNLF mengubah citra orang Bangsa Moro di mata orang Kristen menjadi *bloody, confrontatiion, and army*.

Zulkifli Wadi dalam wawancaranya menegaskan bahwa Islam tidak cukup menjadi pemersatu dalam komunitas politik karena pada masa lalu di wilayah ini tidak pernah ada satu kerajaan Islam yang bisa menyatukan seluruh etnik. Perasaan ketertindasan yang dialami oleh semua etnik Bangsa Moro mendorong terbentuknya kesadaran untuk bersatu melawan para pendatang maupun pemerintah yang dianggap menjajah. Kesadaran menyatukan perlawanan tersebut dimanifestasikan dalam MNLF yang bertujuan mendirikan negara merdeka untuk Bangsa Moro.

Apabila dilihat secara keseluruhan perkembangan gerakan separatis Bangsa Moro dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam perkembangannya organisasi-organisasi yang berpengaruh dan banyak berperan dalam perjuangan Bangsa Moro adalah MNLF, MILF, dan Abu Sayyaf. Deskripsi mengenai perkembangan tersebut secara ringkas dapat disarikan sebagai berikut.

Ismael J. Villareal mengemukakan bahwa MNLF didirikan pada akhir tahun 1969 untuk mengambil alih tugas-tugas MIM dan melancarkan perjuangan bersenjata Bangsa Moro melawan Pemerintah Filipina. MNLF memiliki sebuah pernyataan terbuka yang dikenal sebagai "*Manifesto on the establishment of the Bangsa Moro Republic*". Deklarasi ini menjadi *common platform* bagi seluruh etnik dan golongan Bangsa Moro untuk bersatu berjuang melawan pemerintah dan orang-orang Kristen Filipino.

Pernyataan tersebut ditandatangani oleh tokoh-tokoh masyarakat Bangsa Moro pada tanggal 18 Maret 1974, dan memuat alasan-alasan mengapa masyarakat Muslim memberontak sebagai berikut⁷⁰ :

"We, the oppressed Bangsa Moro people, wishing to free ourselves from the terror, oppression and tyranny of Filipino colonialism which has caused us untold suffering and misery by criminally usurping our land, by threatening Islam through wholesale destruction and desecration of its places of worship and its Holy Book, and murdering our innocent brothers, sisters and old folks in a genocidal worship and its Holy Book, and murdering our innocent brothers, sisters, and old folks in a genocidal campaign of a terrifying magnitude."

Dengan demikian, latar belakang munculnya MNLF berawal dari harapan akan kebebasan dari teror, penindasan, dan kediktatoran yang dilakukan Pemerintah Filipina. Integrasi terhadap Bangsa Moro merupakan salah satu bentuk kolonialisasi Filipina yang menimbulkan penderitaan dan kekejaman yang luar biasa, serta merampas tanah dan mengancam Islam. Islam terancam karena berkembangnya proses perusakan terhadap tempat-tempat ibadah dan kitab-kitab suci umat Islam serta pembunuhan terhadap laki-laki, perempuan, dan orang tua yang tidak berdosa dari kalangan Bangsa Moro.

John Gershman (2001) mengungkapkan bahwa MNLF didirikan pada tahun 1969.⁷¹ Organisasi ini menggambarkan perwakilan dari etnik-etnik Moro di Kepulauan Mindanao termasuk juga Tausug, Samal, dan Yakan yang berbeda secara bahasa. Anggota-anggotanya pertama kali adalah pemuda-pemuda yang direkrut oleh pemimpin muslim tradisional

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Lihat John Garsman, Moros in The Philippines, October 2001, di www.c-r.org/acc_mon

untuk dilatih militer di Malaysia. Salah satu kadernya adalah Nur Misuari⁷², yang menjadi ketua MNLF. Sebagian besar dari kelompok pemuda ini pada umumnya menempuh pendidikan sekuler dan sebagian lain adalah mahasiswa berhaluan politik sayap kiri.

MNLF dari tahun 1970 sampai dengan 1976 menjadi satu-satunya organisasi yang memayungi seluruh gerakan perlawanan Bangsa Moro dari kelompok nasionalis sampai Islam dan mendasarkan perjuangannya pada kemerdekaan Bangsa Moro. Pada awalnya, sebagian pemimpin-pemimpin tradisional Bangsa Moro merespon dengan membentuk organisasi-organisasi regional dan meninggalkan MNLF. Namun sepanjang periode ini, MNLF melakukan perang terbuka melawan pasukan-pasukan pemerintah. Peperangan baru berhenti pada tahun 1976 dengan ditandatangani *Tripoli Agreement* dengan mediasi Pemimpin Libya, Muammar Qaddafi.

Tujuan pendirian MNLF adalah mencapai kemerdekaan Bangsa Moro. MNLF mendasarkan ideologi gerakannya semata-mata kepada perjuangan kemerdekaan dan cenderung sekuler. Dalam perkembangan politik menjelang tahun 1996, organisasi ini telah menyetujui pemberian otonomi dalam kerangka konstitusi negara Filipina. Organisasi ini kelihatan tidak memiliki pendukung dan mereka yang mendukungnya terserap dalam Dewan-dewan dan pemerintahan daerah ARMM sehingga MNLF identik dengan ARMM.

Pada perkembangannya, organisasi ini terpecah-pecah menjadi beberapa organisasi seperti MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), BMLO (*Bangsa Moro Liberation Organization*), MNLF Reformasi, dan Abu Sayyaf. Penyebab perpecahan MNLF dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama yaitu alasan politik dan ideologi.

⁷² Nur Misuari adalah seorang Professor Ilmu Politik dari Faculty of Political Science The University of the Philippines. berasal dari etnis Tausug Kepulauan Sulu, memimpin demonstrasi mahasiswa pertama kali pada akhir tahun 1969 memporotes pembunuhan di jabidah. Pada akhir tahun 1969 dipilih menjadi ketua MNLF dan menandatangani perjanjian damai sebanyak dua kali dengan pemerintah yaitu tahun 1976 dan 1996. Beliau terpilih menjadi gubernur ARMM dari tahun 1996-2000, pada tahun 2000 kembali lagi bergerilya melawan pemerintah karena dipaksa mundur dari pencalonan gubernur. Pada tahun 2001 melarikan diri ke Malaysia dan ditangkap oleh pemerintah Malaysia untuk diserahkan kepada Pemerintah Filipina. Sekarang ini dipenjara di Laguna Jail. Manila.

Faktor ideologis menerangkan bahwa faksi-faksi Islam dalam MNLF memandang Nur Misuari telah meninggalkan komitmennya bahwa organisasi ini akan mewujudkan cita-cita Islam dalam perjuangannya. Hal tersebut diindikasikan dengan tidak adanya program dalam kepemimpinannya untuk meningkatkan pelaksanaan ajaran Islam dan memajukan kesadaran Islam bagi anggota-anggota MNLF. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam berkembang subur di antara anggota Front. Sebagai akibatnya pada akhir tahun 1970-an sebagian besar komandan-komandan MNLF mengajukan petisi agar Nur Misuari digantikan oleh Hashim Selamat⁷³. Nur Misuari menolak tuntutan ini dan memecat mereka-mereka yang menandatangani petisi sehingga menimbulkan perpecahan di dalam tubuh MNLF. Faksi-faksi Islam ini kemudian membentuk *New MNLF* yang pada tahun 1982 mengubah namanya menjadi MILF (*Moro Islamic Liberation Front*).

Sementara faktor politik berawal dari ditandatanganinya *Tripoli Agreement*. Bulan Mei sampai Desember 1977 adalah tahun-tahun yang agak menyulitkan bagi MNLF karena pada periode ini mulai timbul perpecahan internal. Hal tersebut berawal pada ICFM (*The Islamic Conference of Foreign Minister*) ke-8 di Tripoli yang mengizinkan Nur Misuari hadir di pertemuan tersebut. Para menteri luar negeri tersebut menyatakan kekecewaannya atas hasil negosiasi antara MNLF dan Pemerintah Filipina.

Konflik internal di MNLF mulai membesar, Hashim Selamat mengumumkan dirinya menggantikan Nur Misuari pada tanggal 26 Desember 1977 di Jeddah. Hashim didukung oleh pemimpin-pemimpin tradisional seperti Domocao Alonto, Rashid Lukman, dan Salipada Pendatun. Nur Misuari menanggapi dengan memecat Hashim dan menuduhnya pengkhianat. Mesir mendukung Hashim tetapi Libya mendukung Nur Misuari. Hashim kemudian memindahkan MNLF nya ke Cairo sedangkan Lukman dan Pendatun membentuk *Bangsa Moro Liberation organisation* (BMLO)⁷⁴.

⁷³ Hashim Selamat adalah seorang pemimpin tradisional yang berbasis pada masyarakat Islam etnik Maguindanao. Tokoh ini berpendidikan master di Al-Azhar University Cairo dan berhaluan Islam. Sampai akhir tahun 1979 menjabat sebagai wakil ketua MNLF. Pada tahun ini juga memisahkan diri dari MNLF karena Nur Misuari dipengaruhi oleh faksi-faksi nasionalis dan sosialis dalam tubuh MNLF. Pada tahun 1982, faksi-faksi MNLF yang mendukungnya mengganti nama new-MNLF menjadi MILF. MILF tidak diajak dilibatkan pada perjanjian damai 1996. Tokoh ini memimpin perang gerilya sampai akhir hayatnya di bulan Juli tahun 2003.

⁷⁴ Cesar A. Majul, Op. Cit. hal. 47-52.

Dalam konferensi ICFM ke 9 di Dakar, Senegal, Misuari diakui sebagai ketua MNLF karena Hashim tidak dapat hadir.⁷⁵ Pada akhirnya karena ketidakpuasan terhadap kinerja MNLF yang menerima otonomi dalam kerangka konstitusi Filipina, sebagian dari pemimpin MNLF memisahkan diri dan membentuk MILF. Sedangkan MNLF reformasi/ Abu Sayyaf terbentuk menjelang dan sesudah ditandatangani *peace agreement* tahun 1996.

Menurut seorang informan, warga negara Indonesia yang pernah tinggal di Manila (DS), sesudah didirikannya ARMM sebagai hasil dari perjanjian damai tahun 1996 konflik internal justru semakin membesar di tubuh MNLF yang bermuara pada dibentuknya MNLF reformasi dan ditahannya Nur Misuari oleh Pemerintah Filipina. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan konsep otonomi yang diberikan oleh pemerintah dan proses birokrasi pemerintah pusat dan daerah yang dipenuhi oleh KKN. Pada waktu Nur Misuari akan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur, pemerintah pusat menghembuskan isu bahwa dirinya korup dan mendukung pemimpin MNLF lainnya untuk menjadi gubernur pada periode depan.

Nur Misuari meminta pemerintah pusat untuk memberikan bukti-bukti atas tuduhan korupsi yang telah dia lakukan. Kemudian, dia megancam jika pemerintah pusat hanya berkeinginan untuk membuat isu semata maka dirinya akan mengobarkan pembontakan untuk kedua kalinya. Pemerintah merespon tuntutan Misuari dengan menyerang pasukan-pasukan MNLF dan memaksanya melarikan diri ke Malaysia. Pemerintah malaysia kemudian menangkap Nur Misuari dan menyerahkannya ke Pemerintah Filipina dalam rangka kerja sama mewujudkan stabilitas keamanan di Asia Tenggara.

Dr. Samuel K. Tan dalam wawancaranya menegaskan bahwa konsep otonomi yang diberikan kepada ARMM bukan otonomi nyata tetapi sebatas simbol. Sesudah menerima otonomi, MNLF berubah menjadi instrumen pemerintah Filipina untuk mengendalikan Bangsa Moro. Sebagian tentara MNLF menjadi tentara pemerintah dan sebagian lainnya bergabung dalam MILF. Dr. Samuel K Tan mengungkapkannya sebagai berikut:

⁷⁵ Ketidakhadiran Hashim Salamat diduga karena tidak diijinkan oleh penguasa Mesir pada waktu itu.

“Basically the Bangsa Moro people did not get the real autonomy. They got back in 1996. There was an agreement between MNLF-GRP created ARMM. Misuari became a first governor. People reacted because the MNLF was couped by the government. This is important because the MNLF became illogical. Meanwhile MILF continued the struggle..they are a faction from MNLF. A part of MNLF being on the army. That movement (MNLF) partly was the instrument of the government.”

Sementara MNLF sendiri kemudian pecah menjadi dua yaitu MNLF yang tetap di bawah Nur Misuari dan MNLF Reformasi. MNLF yang pada masa lalu adalah organisasi perlawanan Bangsa Moro yang paling besar dan diakui secara internasional sekarang hanya tinggal nama. Sebagian orangnya terserap dalam birokrasi ARMM dan lainnya menggabungkan diri dengan MILF ataupun membentuk faksi-faksi kecil seperti Abu Sayyaf.

Dewasa ini MILF adalah organisasi perlawanan Bangsa Moro yang paling populer dan mendapatkan perhatian baik dari pemerintah Filipina maupun Amerika Serikat yang mengelompokkannya ke dalam organisasi teroris. MILF adalah kelompok perlawanan Bangsa Moro yang mendasarkan perjuangannya kepada ajaran-ajaran Islam. MILF didirikan oleh Hashim Salamat setelah dia menyatakan keluar dari MNLF tidak lama setelah keluarnya perjanjian Tripoli tahun 1976. Hashim sendiri adalah orang kedua dalam MNLF sampai tahun 1979. Pertama kali organisasi ini dikenal sebagai *new-MNLF* dan baru pada tahun 1982 berubah menjadi MILF. Organisasi ini bermarkas di *Camp of Abu Bakar Assh Shidique*, sekitar Cotabato dan didukung sampai pelosok-pelosok pedesaan di Mindanao⁷⁶.

MILF sebenarnya bukanlah sebuah organisasi yang baru karena merupakan perwujudan ide-ide dan kerja-kerja mahasiswa Bangsa Moro di Timur Tengah pada tahun 1962.⁷⁷ Pada awalnya kelompok mahasiswa ini terbakar dan bersatu didasarkan atas perasaan ketertindasan yang sama dan mendorong pemuda-pemuda Bangsa Moro lainnya untuk bergabung dan bersumpah melakukan perjuangan kemerdekaan. Kongres pertama MILF diselenggarakan di *Camp of Busra* pada tahun 1978 dan menghasilkan garis-garis besar organisasi sebagai berikut.

⁷⁶ TJS George, Lok. Cit.

⁷⁷ Salamat Hashim. *The Bangsa Moro People's Struggle Against Oppression and Colonialisation*, Agency for Youth Affairs-MILF, Camp Abu Bakar Assh Shidique, Mindanao, 2001 hal. 84-85.

Perjuangan MILF dimaksudkan untuk memperoleh kembali kemerdekaan, yang telah dirampas secara *immoral* dan *illegal*, dan memperjuangkan penentuan nasib sendiri rakyat Bangsa Moro melalui perjuangan secara damai⁷⁸. Organisasi ini pada dasarnya menghendaki proses penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Moro dapat dilakukan melalui non-kekerasan seperti yang dialami oleh Maldeva, Brunei, dan Singapura. Kebijakan perang melawan Pemerintah terpaksa dilakukan untuk kepentingan mempertahankan diri dan wilayah mereka dari pendudukan Bangsa Filipino maupun Tentara Pemerintah Filipina.

Organisasi ini memiliki suatu perspektif yang cukup radikal dalam perjuangannya dibandingkan dengan MNLF yaitu melihat bahwa tidak ada solusi yang dapat bertahan lama dalam penyelesaian konflik Bangsa Moro kecuali memberikan aspirasi kepada penduduk asli Bangsa Moro dan Lumad untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kata lain gerakan MILF tetap konsisten bahwa tujuan untuk memperoleh kemerdekaan Bangsa Moro ditempatkan sebagai kerangka dasar perjuangan baik secara diplomasi maupun militer.

Adapun metodologi perjuangan MILF didasarkan atas ideologi penyerahan diri kepada takdir Allah sebagaimana dijelaskan Al Quran Surah 5 ayat 56: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Hal ini menunjukkan bahwa segala kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Al Quran dan Sunnah Rasul. Dengan demikian tujuan dari terbentuknya MILF secara keseluruhan mencakup hal-hal sebagai berikut⁷⁹:

1. Membuat supremasi hukum Allah.
2. Mendapatkan kebahagiaan Allah.
3. Memperkuat hubungan antara manusia dan Tuhannya.
4. Memperkuat hubungan antar manusia.
5. Memperoleh kembali kemerdekaan yang telah dirampas secara ilegal dan imoral, dan memperjuangkan hak-hak rakyat Bangsa Moro untuk merdeka dan menentukan nasibnya sendiri.
6. Mendirikan pemerintahan dan negara yang merdeka dan melaksanakan syariah Islam.

⁷⁸ Ibid. Hal. 84.

⁷⁹ Ibid. Hal. 87.

Tujuan umum ini diterjemahkan ke dalam kampanye politik MILF menjadi sebuah tujuan praktis yaitu membentuk sebuah negara Islam yang terpisah dari Filipina mencakup daerah-daerah sebagai berikut: Mindanao, Semenanjung Zamboanga, Davao, Basilan, Sulu, Tawitawi, dan Palawan. Sebuah laporan intelijen Filipina mengatakan bahwa nama negara yang akan dibentuk MILF adalah Mindanao Islamic Republic (MIR), sementara pemerintahannya berdasarkan atas syariah Islam. Tujuan tersebut akan diwujudkan melalui dua strategi perjuangan yaitu dahwah dan jihad.⁸⁰ Sebagian besar pemimpin-pemimpin MILF adalah *Islamic scholars* yang berasal dari kalangan aristokrat tradisional dan berlatar belakang agama Islam yang sangat kuat. Sejak tahun 1982, Kepemimpinan MILF bekerja keras untuk mewujudkan gerakannya sebagai gerakan Islam yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan usaha-usaha memajukan kesadaran dan praktik pelaksanaan ajaran-ajaran Islam secara murni dan melakukan hubungan dengan gerakan Islam di seluruh dunia. Selain itu, MILF juga mengembangkan program-program penguatan organisasi, pembangunan kekuatan angkatan bersenjata, dan memupuk kepercayaan diri yang tinggi. Program-program ini dikenal dengan *Four Point Program of the MILF* yang masih dilakukan hingga sekarang.

Menurut keterangan seorang mahasiswa UP dari Maguindanao (AA), Organisasi ini memiliki anggota dan kekuatan militer yang hampir merata di seluruh Kepulauan Mindanao, yaitu 5 divisi di Mindanao dan 1 divisi di Kepulauan Sulu. MILF juga memiliki 46 *camp mujabiddin* dan mengorganisir 120.000 prajurit bersenjata dan tidak bersenjata serta ribuan pengikut lainnya. Tentara MILF dikenal sebagai *Bangsa Moro Islamic Armed Forces* (BIAF) yang terdiri dari 60% pasukan reguler. Pemerintah Filipina sendiri memperkirakan organisasi ini memiliki 8.000 tentara, sedangkan intelijen barat memperkirakan sekitar 40.000 tentara. Sebagian besar anggota dan prajurit MILF berasal dari etnik Maguindanao, Iranun, dan Maranao. Hal ini dapat dipahami mengingat konsentrasi terbesar masyarakat Bangsa Moro berada di Pulau Mindanao yang didominasi oleh etnik-etnik tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa organisasi ini paling banyak memperoleh dukungan dari masyarakat Bangsa Moro dibandingkan dengan MNLF dan Abu Sayyaf. Sebagian dari

⁸⁰ Lihat Alfredo Filler. *Muslim Militancy: A New Threat to Security and Stability, a philippine view-point.*'' paper yang tidak diterbitkan untuk Angkatan Bersenjata Filipina, Juli 1995, hal. 20.

mereka adalah mantan anggota MNLF yang tidak puas dengan kebijakan organisasi tersebut menerima otonomi dari Pemerintah Filipina. MILF sendiri memperkirakan bahwa dari sekitar 8 juta penduduk Bangsa Moro, 85% mendukung perjuangan MILF dan 90% pendukung MILF sebagian besar (90%) adalah berusia dari 16 sampai 60 tahun yang dilatih peperangan dan penggunaan senjata⁸¹.

Pada waktu MNLF menerima *peace agreement* dengan pemerintah pada tahun 1996, MILF tidak mengakuinya dengan alasan sebagai berikut. Persetujuan tersebut pada dasarnya hanya menekankan pada satu sisi yaitu penerimaan otonomi dan tidak menyentuh permasalahan mendasar Bangsa Moro yaitu perebutan secara *imoral* dan *illegal* terhadap tanah nenek moyang mereka dan hak-hak rakyat untuk merdeka atau menentukan nasibnya sendiri. Selain itu persetujuan ini menghindarkan diri dari keadilan dan kemerdekaan Bangsa Moro. Perdamaian tanpa keadilan dan kemerdekaan bagi kelompok yang tertindas adalah bentuk lain dari kolonialisme. Persetujuan tersebut hanya merupakan solusi bagi pemerintah tetapi tidak untuk Bangsa Moro. Meskipun berbeda pendapat dengan MNLF, MILF tidak menganggap organisasi tersebut sebagai musuh seperti dijelaskan dalam pernyataan Ketua MILF, Salamat Hashim, pada tanggal 1 Desember 1993 sebagai berikut:

“The MILF leadership is confident that Bother Nur Misuari of the MNLF can not afford to betray the Bangsa Moro people and cause. We have high regards on him and we presume he and MNLF leadership are well aware that unless a meaningful self determination for the Bangsa Moro people is in place, the problem will persist from generation to generaiton. Meanwhile granting Misuari will sell out himself to the enemy, the MILF has nothing to worry, she has all the options. She may hope for a wait and seestance or pursue the struggle on her own way, whicever is deemed apropriate at the moment”

Para pemimpin MILF tetap pada keyakinannya bahwa Nur Misuari beserta seluruh anggota MNLF tidak dapat dikatakan berkhianat terhadap perjuangan Bangsa Moro. MILF tetap menghargai MNLF dan menganggap mereka menyadari dengan baik tanpa penentuan nasib sendiri, masalah Bangsa Moro masih jalan di tempat karena masalah ini telah berlangsung dari generasi ke generasi. Selain itu, MILF tetap tidak khawatir terhadap

⁸¹ Lihat www.luwaran.com

penerimaan otonomi tersebut karena berharap bahwa MNLF tetap akan berjuang dengan caranya sendiri pada waktu yang tepat.

Sampai sekarang, organisasi ini tetap menggunakan aksi-aksi militer untuk mempertahankan diri dari serangan Angkatan Bersenjata Filipina. Sejak tahun 2001 dimana Pemerintah menerapkan “*all out war against MILF*,” Masyarakat Bangsa Moro membuktikan bahwa mereka mendukung pasukan-pasukan MILF. Sebagai indikasinya, selama tiga bulan peperangan terus-menerus Mujahidin MILF mampu mempertahankan diri dalam peperangan konvensional dengan pasukan pemerintah di *Camp Abu Bakar* dengan jumlah korban yang lebih kecil dibandingkan dengan tentara pemerintah. Seratus orang mujahidin MILF diduga tewas dalam peperangan tersebut, sementara korban di pihak pasukan pemerintah sebanyak 1.726 orang⁸².

Sedangkan kelompok perlawanan Abu Sayyaf terkenal sebagai “*Bearer of the sword*.” Menurut Prof. Mc. Kenna kelompok ini diperkirakan mulai menguat dan berkembang dengan pesat sejak tahun 1995 dan berpusat di Pulau Basilan. Kelompok ini berjumlah kecil, bersifat misterius dan paling radikal. Sementara John Gersham (2001) menduga bahwa kelompok ini telah berdiri pada pertengahan tahun 1980-an dan dirikan oleh Abdurajak Abubakar Janjalani, seorang *moslem scholar* dan mantan anggota MNLF⁸³. Beliau terbunuh dalam kontak senjata dengan Polisi Filipina pada bulan Desember 1998.

Prof. Carmencita T. Aguillar dalam wawancaranya memperkuat Prof. MC. Kenna bahwa Abu Sayyaf berdiri sekitar tahun 1996. Beberapa karakteristik yang nampak dari kelompok ini adalah mengubah strategi perlawanan dari melawan Pemerintah Filipina menjadi memerangi orang-orang sipil terutama para pendatang Kristen. Para pimpinan organisasi ini sebagian adalah mantan Pasukan Taliban yang berperang dengan Russia di Afganistan pada tahun 1980-an. Sesudah perang Afganistan berakhir mereka kembali ke Filipina Selatan. Prof. Carmencita mengatakan sebagai berikut:

⁸² Ibid.

⁸³ Abubakar Razik Zanjani adalah mantan anggota MNLF dan memisahkan diri kira-kira pada perengahan tahun 1980-an. Beliau diduga banyak kalangan pernah mendapatkan latihan perang di Afganistan dan mendukung pemerinthan Taliban. Pada tahun 1995 kembali ke Filipina dan tertembak mati pada tahun 1998.

"Abu Sayyaf was established based on islamic principles by Abdurrajak Janjalani in 1996. Their activities are like banditry such as stealing, rape, ransom, kidnapping to tourist and missionaries. They change position from fight against GRP into civilian. There is also a change on issues from islamic issues become into banditry activism. Janjalani was trained in Afganistan and USA. Many people from Mindanao had been trained in Taliban to fight against Russia. After Afganistan war ended, they go back to Mindanao becoming islamic missionaries. The change of issues was named as corrupted ideological."

Setelah itu kelompok ini terpecah menjadi faksi-faksi yang berbeda. Dewasa ini kelompok Abu Sayyaf dipimpin oleh Khadafi Janjalani. Pemerintah Filipina menduga kelompok ini memiliki 2000-5000 anggota. Sedangkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat memperkirakan sekitar 200 orang. Militer Filipina menduga bahwa organisasi ini mendapatkan dukungan dari Oshama bin Laden sampai tahun 1995. Aktivitas kelompok ini diduga bergantung dari ransom yang diminta dari keluarga orang-orang yang diculik.

Berdirinya kelompok perlawanan ini dinilai oleh pemerintah Filipina sebagai munculnya kelompok Islam fundamentalis bahkan Islam teroris yang memiliki jaringan dengan organisasi teroris internasional. Namun demikian penilaian yang berbeda diberikan oleh kalangan muslim. Kelompok Abu Sayyaf ini seringkali diduga kalangan muslim mendapat dukungan dan bantuan dari militer Filipina untuk melakukan aksi terorisme guna mendeskreditkan kelompok-kelompok separatis yang lain.

Menurut wawancara dengan seorang mahasiswa Islamic Studies Institute UP dari Maguindanao (AA dan MM), terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa Abu Sayyaf sudah disusupi oleh intelijen militer dan didukung sepenuhnya oleh Angkatan Bersenjata Filipina. Kesaksian pertama diberikan oleh Father Nacolda, seorang pastor dari Zamboanga City. Pastor tersebut mengatakan pada saat Abu Sayyaf melancarkan aktivitasnya, Tentara Amerika Serikat dan Filipina tidak mengambil tindakan pengamanan justru menarik mundur dari kawasan konflik. Proses penyusupan intelijen bermula sejak tahun 1998 ketika Angkatan Bersenjata diduga menyusupkan Edwin Angelos, seorang Katolik yang berubah menjadi agama Islam dengan menikahi perempuan muslim dari Tausug yang bernama Juliana. Sejak saat itu, organisasi ini berubah menjadi kelompok radikal dan memfokuskan gerakannya pada ransom dan kriminalitas.

Tujuan kelompok Abu Sayyaf adalah mendirikan negara Islam merdeka di Mindanao.

Walaupun kelompok ini memiliki tujuan yang sama dengan MILF tetapi terdapat perbedaan yang cukup tajam. Abu Sayyaf mengarahkan gerakannya kepada orang-orang Katolik di Filipina selatan dan melakukan tindakan kekerasan terhadap mereka tanpa toleransi.

Kelompok ini beroperasi di Pulau Basilan, Zamboanga, Sulu, dan Tawi-Tawi. Pemerintah telah mengkampanyekan perang dengan kelompok ini dan juga menyatakan bahwa mereka adalah Islam fundamentalis, ekstrimis, teroris. Pada awal tahun 2000 Abu Sayyaf juga melakukan penculikan-penculikan pada aktivis-aktivis misionaris Kristen yang beroperasi di daerah ini dan meminta tebusan. Selain itu, pada bulan Maret dan April 2000 kelompok ini melakukan penculikan terhadap 50 orang guru SD dan anak-anak di Pulau Basilan dan mengambil 21 orang wisatawan termasuk dari luar negeri. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa penculikan-penculikan di Basilan dan Zamboanga dilakukan oleh Abu Sayyaf yang menggunakan pendekatan kriminal.

Dalam hubungannya dengan MNLF dan MILF, Zulkifli Wadi dalam wawancaranya mengatakan bahwa Abu Sayyaf tidak pernah menyerang kedua organisasi ini karena mereka adalah sesama muslim walaupun memiliki identitas sendiri. Kelompok ini dicurigai memiliki jaringan dengan Jamaah Islamiyah dan Al Qaidah sesudah pengeboman di Metro Manila. Pemerintah Filipina menjadikan pengeboman itu sebagai dasar untuk menerapkan kebijakan *"fight against terrorism."* Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan Amerika Serikat menganggap bahwa permasalahan Moro adalah problema internasional padahal sesungguhnya persoalan lokal.

Zulkifli Wadi juga mengungkapkan dalam wawancaranya bahwa program *"war against terrorism atau war against terrorims"* pada dasarnya adalah proyek yang menguntungkan bagi militer Filipina dan Amerika Serikat. Militer Filipina dapat memperbarui peralatan militernya dan meningkatkan kontrol terhadap sejumlah daerah tertentu di Mindanao. Sementara Amerika Serikat dapat menjual senjatanya ke militer Filipina maupun Abu Sayyaf dan menyewakan tentaranya untuk beroperasi di Filipina Selatan. Zulkifli mengatakan secara lengkap sebagai berikut:

"Abu Sayyaf do not fight each other to MNLF and MILF because they are moslem but have own identity. Abu Sayyaf also is suspected have a relation to Jamaah Islamiyah and Alqaidah. There is a serious moslem problem in Philippine. After the bombing the Philip-

pines building. the government legitimated to war against terrorism. GRP and USA are making the Mindanao problem as an international problem but reallity just a local problem. The war is business of military both US military and AFP. The AFP get renew their military equipment and controll some territory, US military could get some benefit from selling the weapon. Separatist movement also buy the gun with military. The philippine moslem respond the peace talk. The military penetrate the separatist movement to choose armed clashes. . . That is why? Like Abu Sayyaf because no choices for bangsa Moro people."

Kelompok-kelompok perlawanan muslim Bangsa Moro melihat bahwa kegiatan-kegiatan kriminal, terorisme di Filipina akan tetap berlangsung sebelum permasalahan Bangsa Moro dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, Prof. Mc. Kenna mengatakan bahwa baik MNLF maupun MILF mengutuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.⁸⁴

Berdasarkan paparan di muka dapat disarikan karakteristik-karakteristik gerakan separatis Bangsa Moro yaitu MIM, MNLF, MILF, maupun Abu Sayyaf seperti tabel di bawah bawah ini:

Tabel 3.5 Karakteristik Gerakan Separatis Bangsa Moro

No	Organisasi	Berdiri	Ideologi	Tujuan	Hasil sementara
1.	MIM	1960-an (Dr. Matalam)	Islam	Mendirikan republik Islam Mindanao	Sebagian elit-elitnya menerima tawaran pemerintah untuk duduk di posisi-posisi lokal*
2.	MNLF	1969 (Nur Misuari)	Nasionalisme	Mencapai kemerdekaan	Menerima otonomi (ARMM) dalam kerangka <i>peace agreement</i> 1996**
3.	MILF	1982 (Hashim Salamat)	Islam	Mendirikan negara merdeka dan melaksanakan syariah islam	Masih dalam perjuangan bersenjata sambil membahas <i>peace process</i> dengan pemerintah***
4.	Abu Sayyaf	199 (A. A. Janjalani)	Islam	Mendirikan negara islam	Mengubah strategi dari menyerang pasukan pemerintah menjadi menyandera warga sipil****

Sumber: Hasil studi literatur (diolah oleh penulis).

- * = Gerakan ini terdiri dari milisi-milisi lokal yang bertujuan mempertahankan wilayahnya dari serangan kaum pendatang.
- ** = MNLF melakukan gerakan bersenjata antara tahun 1969 – 1996, kemudian mengakhiri konfrontasinya dengan menerima *peace agreement* tahun 1996.
- *** = Pemerintah melakukan *peace negotiation* dengan MILF pada tahun 1997 dan 1999 tetapi mel tetapi melancarkan *all out war* sejak tahun 2001. Tahun 2003 mulai dilakukan *peace negotiation*.
- **** = Pemerintah menganggap gerakan ini sebagai kelompok teroris dan melancarkan *all out war* sejak tahun 2001.

⁸⁴ — Ibid No. 9

Setidaknya terdapat 3 hal yang membedakan antara MNLF, MILF, dan Abu Sayyaf yaitu ideologi, basis etnik, dan jaringan internasional. Sebagaimana diterangkan di muka MNLF berorientasi sekuler sementara MILF dan Abu Sayyaf mendasarkan ideologinya kepada Islam. Nathan Quimpo (1999) mengatakan bahwa MILF dan Abu Sayyaf merujuk kepada “*Islamic revivalism* atau *Islamic Fundamentalism*” yang telah menyebar ke beberapa negara Islam. Dia mengatakan sebagai berikut⁸⁵ :

“These Islamic movements regard Islam not merely as a religion, but as an all-embracing ideology, a way of life, with its own theory of politics and statehood. For them, the establishment of an Islamic state- a state based on the doctrine of the sovereignty of Allah-is crucial for Muslim to live in the Islamic way.”

Bila ditelusuri lebih jauh maka gerakan-gerakan separatis ini memiliki basis etnik yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi-organisasi perlawanan Bangsa Moro masih ditandai oleh semangat kesukuan dan primordialisme yang cukup tinggi. Sebagian besar kelompok elit politik yang memimpin MNLF didominasi oleh orang-orang Tausug. Sementara MILF yang diperkirakan pemerintah tersebar merata di seluruh Pulau Mindanao terdiri dari 1,6 juta orang orang Maguindanao, 1,9 juta Maranao. Sisanya orang-orang Iranun dari Cotabato Utara dan Basilan. Sedangkan Kelompok Abu Sayyaf diduga berasal dari daerah Zamboanga, Sulu, dan Basilan.

Mengenai perbedaan basis etnik dari gerakan-gerakan separatis Bangsa Moro, Prof. Carmencita T Aguillar dalam wawancaranya mengatakan sebagai berikut:

“MILF continue armed struggle after Misuari got a special position. Why? Because he is a Tausug meanwhile MILF dominated by Maguindanao besides ideological difference problems. MILF required only when Misuari got the position of governor and also attack AFP and government position. The reason of rebellion of MILF are political envy, ethnic envy, and economic envy.”

⁸⁵ Nathan Quimpo, dealing with the MILF and Abu Sayyaf, dalam Jurnal CHRONICLE. CIDS-UP Diliman, Manila. Vol. 4 No ½ Januari-Desember 1999.

Menurut analisis Prof. Carmencita, konflik dan gerakan separatis di Mindanao pada dasarnya adalah problema etnisitas. Pembontakan MILF lebih disebabkan karena basis etnik MILF berbeda dengan MNLF sehingga ketika MNLF diakomodasi oleh pemerintah maka ada perasaan kecemburuan secara etnik dan ekonomi dari elit-elit MILF terhadap MNLF. Konflik elit dari etnik-etnik yang berbeda mendorong perbedaan sikap dalam menghadapi Pemerintah Filipina, MNLF menerima otonomi sedangkan MILF memilih perjuangan bersenjata.

Sedangkan dari segi jaringan, MNLF lebih banyak membangun hubungan dengan Libya dan negara-negara Organisasi Islam Internasional (OKI). Pada tahun 1976, atas Libya memprakarsai *Tripoli agreement* dan pada tahun 1996 Indonesia memprakarsai *peace agreement*. Sementara MILF lebih dekat ke Mesir, Pakistan, dan Afganistan. Banyak ulama-ulamah dari negara tersebut adalah teman Hashim Salamat sewaktu menuntut ilmu di Cairo Al-Azhar University. Dukungan internasional bervariasi dari dukungan diplomasi sampai bantuan keuangan, pelatihan militer, dan persenjataan.

Prof. Carmencita T Aguillar dalam wawancaranya menyebutkan bahwa MILF memiliki akademi militer yang terletak di Buldon. Akademi ini yang ditujukan untuk melatih pemuda-pemuda Bangsa Moro menjadi anggota-anggota Angkatan Bersenjata Bangsa Moro. Sementara Ismael J. Vilareal (2000) mengatakan bahwa materi yang diajarkan meliputi pelatihan militer meliputi kuliah-kuliah agama sampai kepada penanganan senjata-senjata konvensional. Hal ini menunjukkan tingginya perhatian MILF terhadap proses pengkaderan dan keberlanjutan perjuangan untuk kemerdekaan.

Tiga gerakan separatis ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Pemerintah Filipina dalam penerapan kebijakan pengelolaan konflik. Pemerintah menawarkan otonomi kepada MNLF melalui *Peace Agreement* tahun 1996. Sedangkan terhadap MILF, pemerintah melakukan tawaran-tawaran penyelesaian secara damai sambil terus menerus melakukan serangan-serangan militer. Sementara terhadap Abu Sayyaf, pemerintah melakukan *all out war* dengan menganggap organisasi ini sebagai kelompok teroris. Walaupun mendapat perlakuan yang berbeda dari pemerintah dan berbasis etnik yang beranekaragam, tiga organisasi gerakan separatis ini tidak pernah berperang satu sama lain. Mereka berbeda dalam ideologi perjuangan tetapi masih merasa saudara satu sama lain. Namun dalam beberapa hal, sebagaimana telah dijelaskan di muka, MNLF dan MILF sering mengutuk tindakan Abu Sayyaf yang tindakan-tindakannya dianggap telah mendiskreditkan gerakan separatis dan gerakan Islam.

Perkembangan terakhir dari gerakan separatis adalah meninggalnya pemimpin MILF, Hashim Salamat, pada bulan Juli 2003 dan diumumkan pada bulan Agustus 2003. Haji Murad, panglima *Bangsa Moro Islamic Armed Forces* (BIAF) menggantikan kedudukan Hashim Salamat sebagai ketua MILF. Pemerintah Amerika Serikat dan menuduh MILF sebagai gerakan teroris dan memiliki jaringan terhadap Al-Qaida dan Jamaah Islamiyah.

Namun demikian menurut wawancara dengan seorang mahasiswa UPI yang berasal dari Maguindanao, MILF sudah membina hubungan baik dan mendapat bantuan dari negara-negara Timur Tengah sebelum Al-Qaida terbentuk. Tujuan MILF hanya sebatas mendirikan negara Islam di Mindanao, Sulu, dan Palawan bukan seluruh Asia Tenggara seperti yang dimaksud Jamaah Islamiyah. Tuduhan bahwa MILF memiliki hubungan dengan Al-Qaidah dan Jamaah Islamiyah adalah suatu kampanye untuk mendeskreditkan gerakan separatis yang telah muncul sejak tahun 1946.

Selain itu, pola-pola perlawanan masyarakat Bangsa Moro terhadap Pemerintah Filipina secara bertahap mengalami perubahan. Gunarano Mushor, seorang staf Istana Malacanang yang berasal dari Maranao, mengatakan bahwa ada keinginan dari sebagian masyarakat untuk mengusulkan pembentukan negara federal Filipina karena ARMM terbukti gagal dan konsep otonomi yang diberikan tidak jelas. Dengan federalisme, maka kekuasaan Bangsa Moro menjadi lebih luas tidak seperti ARMM yang masih dikendalikan oleh Pemerintah Filipina.

Menanggapi usulan tersebut, seorang mahasiswa Islamic Studies UP dari Maguindanao mengatakan sebaliknya sebagai berikut:

"The bangsa Moro people is continuing the struggle for independence. They will support the organization which fight for freedom. So the MNLF had lost supporting from bangsa Moro people. If the MILF also agree to accept the autonomy or federal state it will grow a new organization to fight for independence. This is because the majority of bangsa Moro want to get independence and refusing to integrate in the Philippines. So the MILF just maintain the objective and concept of bangsa Moro people. This is a final solution, come back to the rights of bangsa Moro people."

Sebagian besar Bangsa Moro menghendaki tercapainya perjuangan kemerdekaan. Mereka akan mendukung organisasi manapun yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan

Bangsa Moro. Pada masa lalu mereka mendukung sepenuhnya MNLF kemudian mencabut dukungan tersebut karena MNLF menerima otonomi. Kalau MILF mengubah haluan gerakannya maka akan ditinggalkan oleh Bangsa Moro dan akan tumbuh organisasi-organisasi perlawanan baru. Kemerdekaan dalam pandangan masyarakat Bangsa Moro adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. MILF menghendaki dilakukannya referendum yang difasilitasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa terhadap semua provinsi di Mindanao. Pemberian hak *untuk self determination* adalah penyelesaian yang komprehensif daripada pemberian otonomi atau federalisme.

Sedangkan penjelasan yang berbeda diberikan oleh Muhammad Yahya, seorang mahasiswa UP dari Indonesia yang telah meneliti di Mindanao selama satu bulan. Informan tersebut mengatakan bahwa terdapat perubahan sikap masyarakat dalam merespon konflik separatis ini. Mereka telah mengalami frustrasi karena ARMM terbukti gagal menegakkan syariah Islam dan memajukan kesejahteraan, sementara MILF tidak ada tanda-tanda kemenangan melawan tentara pemerintah. Sebagian masyarakat mulai bergabung dalam mazhab keagamaan yang baru masuk yaitu Majelis Tabligh.⁸⁶

Cara pandang Majelis Tabligh yang menekankan pada gerakan damai melalui penyebaran Islam ke seluruh Filipina bersesuaian dengan kondisi frustrasi masyarakat karena gagal dalam perjuangan otonomi maupun kemerdekaan. Majelis tabligh berpandangan bahwa dengan mengislamkan masyarakat Filipina maka tujuan kemerdekaan Mindanao dapat diselesaikan dengan mudah. Menurut informan tersebut, ada keinginan yang kuat untuk mengubah strategi politik konfrontatif menjadi politik budaya yang lebih bisa diterima oleh masyarakat Filipina secara keseluruhan.

Analisis terhadap berkembangnya gerakan separatisme ditanggapi secara bervariasi oleh beberapa informan dalam studi ini. Prof. Carmencita T. Aguillar, melihat bahwa konflik separatisme yang dilakukan oleh MNLF dan MILF semata-mata masalah elit politik. MNLF menghentikan perlawanannya ketika pimpinannya menerima otonomi dari pemerintah. Sementara kerasnya perlawanan MILF disebabkan oleh adanya kecemburuan

⁸⁶ Paham keagamaan yang telah berkembang di Mindanao sebelum kedatangan Majelis Tabligh adalah wahabi yang diduga banyak dianut oleh anggota-anggota MILF dan sunni yang banyak diikuti oleh MNLF.

baik secara politik, ekonomi, dan etnik. MILF yang sebagian besar pemimpinnya dari Maguindanao diduga merasa dimarginalkan daripada MILF pemimpinnya dari Tausug. Satu diberikan fasilitas oleh pemerintah sementara yang lain dihadapi secara bersenjata.

Namun penjelasan ini dibantah oleh informan lain (DS) yang menjelaskan bahwa akar permasalahan dari tumbuhnya gerakan separatis adalah bukan semata-mata karena kecemburuan antar etnis, konflik antar elit Bangsa Moro, atau ketidakmerataan distribusi. Faktor-faktor tersebut hanyalah faktor struktur yang menjadi penyulut namun faktor utama terletak pada basis supra-struktur yaitu ideologi. Terdapat perbedaan dalam cara pandang antara masyarakat Bangsa Moro dan Filipino, Bangsa Moro menghendaki diterapkannya syariat Islam baik dalam negara merdeka atau daerah otonomi namun Pemerintah Filipina menginginkan Bangsa Moro tetap berintegrasi dalam sistem politik nasional yang liberal dan sentralistik.

Penilaian yang lain diberikan oleh Zulkifli Wadi yang mengungkapkan bahwa perkembangan gerakan separatisme yang berlarut-larut disebabkan oleh kurangnya kepemimpinan nasional yang kuat dan resolusi konflik yang bersifat parsial. Kebijakan resolusi konflik selalu berubah-ubah dan tidak merupakan satu kontinuitas. Kebijakan dan pendekatan resolusi konflik secara damai seperti yang dilakukan oleh Presiden Fidel Ramos tidak diteruskan oleh Presiden Josep Estrada. Presiden Estrada lebih menggunakan strategi "all out war" melawan MILF.

Selain itu, selama ini penyelesaian yang dilakukan bersifat parsial yaitu bahwa pemerintah hanya berunding dengan gerakan separatis satu demi satu tetapi tidak secara keseluruhan. Setiap satu organisasi diajak berunding maka organisasi lain meneruskan perang dan setiap satu kelompok menerima perdamaian maka kelompok lain akan meneruskan perang. Dengan demikian diperlukan satu kepemimpinan yang kuat dan resolusi konflik yang melibatkan seluruh kelompok gerakan separatis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di muka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Terdapat empat faktor utama yang menyebabkan berkembangnya gerakan separatisme Bangsa Moro yaitu *immoral and illegal annexation* wilayah Bangsa Moro oleh Amerika Serikat, represi terhadap identitas sosial budaya, pembagian sumberdaya yang tidak seimbang antara masyarakat Bangsa Moro terhadap Filipino, dan ethnic cleansing.

Integrasi wilayah Moro ke Amerika dan Filipina berawal dari perjanjian Paris dimana Spanyol menjual wilayah Bangsa Moro yang berdaulat kepada Amerika Serikat tanpa meminta konsultasi terlebih dahulu. Represi terhadap identitas budaya dilakukan baik secara fisik maupun secara struktural untuk mengusir Bangsa Moro dari wilayahnya. Pembagian sumberdaya yang tidak seimbang terlihat dari usaha forced migration yang menjadikan Bangsa Moro menjadi minoritas di wilayahnya sendiri yang berimplikasi pada marginalisasi Bangsa Moro. *Ethnic cleansing* merupakan usaha-usaha secara sistematis yang berlangsung sejak tahun 1969 untuk menekan Bangsa Moro terhadap usaha eksploitasi sumberdaya-sumberdaya di Mindanao.

Adapun gerakan separatis Bangsa Moro yang dilakukan secara terorganisir dimulai sejak akhir tahun 1960-an yaitu Moro Independent Movement (MIM) yang dipimpin oleh Utdog Matalam untuk mendirikan republik Islam di Mindanao. Kemudian karena tekanan dari pemerintah dan orang Kristen Filipino semakin meningkat maka didirikanlah organisasi perlawanan yang bersifat nasional pada akhir tahun 1969 yaitu Moro National Liberation Front (MNLF). Organisasi ini dipimpin oleh Nur Misuari dan berperang melawan pemerintah sejak tahun 1970 dengan jeda pada tahun 1976 karena menandatangani Tripoli agreement yang menyetujui pembentukan daerah otonomi Mindanao. Karena alasan-alasan politik, yaitu menerima otonomi dari pemerintah, dan perbedaan ideologi, yaitu menguatnya keinginan untuk membentuk negara Islam, MNLF pada tahun 1979 pecah menjadi Bangsa Moro Liberation Organization (BMLO) dan New-MNLF yang mendasarkan perlawanannya kepada Islam. New-MNLF berubah menjadi Moro Islamic Liberation Front (MILF) pada tahun 1982 dipimpin oleh Hashim Salamat.

MNLF berhenti berperang pada tahun 1996 karena menandatangani *Peace agreement* 1996 dan menerima tawaran otonomi pemerintah dalam bentuk ARMM (*Autonomous Regional for Moslem Mindanao*). ARMM terdiri dari 5 provinsi dari 13 provinsi di Mindanao yaitu Sulu, Basilan, Tawi-tawi, Maguindanao, dan Lanao del Sur. Sementara MILF tetap meneruskan perjuangan bersenjata dan mencita-citakan terbentuknya negara Islam di wilayah Mindanao. MNLF dalam perkembangannya pecah menjadi MNLF (Nur Misuari) dan MNLF reformasi karena konflik antar elit MNLF. Nur Misuari mengobarkan kembali peperangan melawan pemerintah pada tahun 2000 dan melarikan diri ke Malaysia. Akhirnya Pemerintah Malaysia menangkap dan menyerahkan Nur Misuari ke Pemerintah Filipina pada tahun 2001.

MNLF juga pecah menjadi beberapa faksi kecil di antaranya adalah Abu Sayyaf. Organisasi ini diduga berdiri pada tahun 1995 dan dipimpin oleh seorang scholar dari Timur Tengah yaitu Abdurrazik Al Janjalani. Sesudah kematian pemimpinnya pada tahun 1998, organisasi ini banyak disusupi operasi intelijen Filipina sehingga merubah perjuangannya dari melawan pemerintah menjadi menyerang penduduk sipil terutama orang-orang Kristen. Pemerintah melakukan *all out war* melawan kelompok ini dan menganggapnya sebagai organisasi terorist.

Dewasa ini MILF menjadi satu-satunya organisasi gerakan separatis terbesar dan diakui di Mindanao. MILF memiliki angkatan bersenjata yaitu Bangsa Moro Islamic Armed Forces yang tersebar merata di Mindanao dan Sulu. Pemerintah Filipina dan Amerika Serikat menuduh MILF sebagai kelompok teroris yang memiliki keterkaitan dengan Al-Qaidah dan Jamaah Islamiyah. Sementara pendapat yang lain mengatakan bahwa MILF hanya bertujuan mendirikan negara Islam di Mindanao semata dan tidak berkaitan dengan JI maupun Al-Qaidah. Selain itu terdapat fenomena perubahan strategi perjuangan dari kekerasan menjadi gerakan budaya melalui majelis taklim yang berkembang di Mindanao dan Pulau Luzon sebagai antitesa dari perjuangan bersenjata.

H. Murad, Pimpinan MILF yang baru setelah Hashim Selamat meninggal



BAB IV GERAKAN PEMBEBASAN MORO DAN PERJANJIAN DAMAI

Oleh
Erni Budiwanti

IV.1 Pendahuluan

Munculnya gerakan-gerakan perlawanan di Filipina Selatan utamanya di Mindanao, yang berusaha membebaskan Bangsa Moro⁸⁷ dari pemerintah Pusat Filipina telah mendorong pemerintah Filipina untuk menggalang negosiasi dan usaha-usaha perdamaian dengan pemberontak-pemberontak Moro. Bentuk perjanjian perdamaian apa saja yang pernah dijalin pemerintah dengan kelompok separatis, beserta berbagai implikasinya - termasuk kendala dan tantangan pelaksanaannya - menjadi fokus utama dalam pembahasan ini.

Dalam kenyataannya usaha rekonsialisasi dan perjanjian damai tidak sepenuhnya bisa ditaati atau berjalan sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang bertikai. Secara khusus tulisan ini hendak membahas faktor-faktor yang melatar belakangi dan mendorong perundingan perdamaian antar pemerintah Filipina (GRP- Government Republic of the Philippine) dan gerakan separatis Moro, khususnya MNLF (Moro National Liberation Front). Kedua, isi atau bentuk dari perjanjian perdamaian tersebut dan sejauh mana pelaksanaannya. Ketiga, keterlibatan internasional, khususnya OIC (Organisation of Islamic Conference atau OKI - Organisasi Konferensi Islam) dalam perjanjian damai tersebut. Keempat, implikasi dan prospek dari perjanjian damai khususnya dalam mengatasi konflik bersenjata antara GRP dan Gerakan Pembebasan Moro.

⁸⁷ Istilah Bangsa Moro muncul ketika Nur Misuari membentuk Fron Pembebasan Nasional Moro-MNLF Ini merupakan *imagined community* yang dibentuk oleh Nur Misuari untuk keperluan mempersatukan berbagai ethnic Muslim di dalam wilayah Minadanao. Yang disebut Bangsa Moro terbagi ke dalam 13 kelompok bahasa (*ethno-linguistic group*). Mereka adalah *Tausug*, *Sama* (*Samal*) dan *Badjao* yang tinggal di Kepulauan Sulu (termasuk Tawi-Tawi) dan Selatan Palawan; Palawan (*Palawani* dan *Molbog*) yang mendiami Selatan Palawan. *Yakan* yang berdomisili di Pulau Basilan. *Kalibugan* yang berasal dari Semenanjung Zamboanga, *Maranao* dari Provinsi Lanao. *Ilanun* (*Iraanun*) yang menempati daerah pantai Cotabato, *Sangil* dari Selatan Cotabato dan Davao del Sur, dan *Kalagan* yang berasal dari Davao.

IV.2. Perlawanan Moro dan Perjanjian Tripoli

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya bahwa konflik bersenjata di Mindanao antara Bangsa Moro dan Kristen Filipino memiliki akar sejarah kolonisasi. Konflik tersebut sudah dimulai semenjak masa penjajahan Spanyol dan Amerika. Di masa ini Bangsa Moro sudah berjuang melawan pendudukan penjajah asing, meskipun pada akhirnya harus mengakui kolonisasi asing dan secara paksa dipersatukan ke dalam teritori Filipina. Sedang pertikaian antara pendatang Kristen dan penduduk asli Muslim Mindanao dimulai sejak tahun 1960an sampai awal 1970an yang bersumber dari migrasi besar-besaran dari orang-orang Kristen Filipino yang berasal dari Utara Filipina ke Selatan Filipina. Gelombang migrasi ini menyebabkan banyak tanah-tanah di Mindanao yang diduduki dan dimiliki secara paksa oleh pendatang Katolik. Di tataran masyarakat, persoalan tanah menandai makin memuncaknya konflik-konflik horizontal antara Muslim Moro dengan Katolik Filipina. Konflik antara keduanya telah melahirkan organisasi para-militer yang dibentuk oleh tuan-tuan tanah dan penambang-penambang hutan yang berasal dari kelompok Katolik pendatang maupun yang dibentuk oleh penduduk asli Muslim. Dengan makin bertambahnya jumlah Muslim di Mindanao yang menganggap pemerintah Filipina berada di balik terjadinya perampasan besar-besaran oleh pendatang Katolik Filipina atas tanah-tanah mereka, konflik antar keduanya meningkat menjadi perang terbuka. Apalagi ketika persoalan tanah juga dibumbui dengan berbagai tindakan kekerasan, seperti kasus di Jabaaidah yang kemudian disusul dengan serangan di masjid Manili. Serangan ini dilakukan oleh kelompok paramiliter Ilaga yang beranggotakan Katolik Filipino yang menyebabkan 65 orang Moro meninggal dunia. Radio BBC melaporkan bahwa pembunuhan massal ini telah mengundang perhatian dari pemimpin Lybia, Kolonel Muammar Qadaffi.

Sebagai implikasi dari berbagai tindakan kekerasan di atas, pada tanggal 21 Juli 1971, pimpinan dari berbagai sektor, seperti pemimpin tradisional (datu), dan pimpinan agama (ulama) di Mindanao mengeluarkan manifesto yang menuntut pemerintah segera bertindak untuk menghentikan berbagai aksi kekerasan atas Bangsamoro. Pemerintah Manila menanggapi manifesto ini sebagai ancaman. Pembunuhan Manili memicu aksi balas dendam di kalangan Islam Moro. Di bulan Agustus 1971 Muslim Moro yang berdiam di Bouldon memperkuat wilayah perkotaan mereka dengan terlebih dulu membunuh beberapa penebang hutan dari Katolik Filipino. Pembunuhan ini memicu militer Filipina untuk melakukan aksi pengeboman di wilayah ini. Menjelang bulan September 1971

tindakan kekerasan dan saling balas-membalas sudah tidak dapat dikontrol lagi. Puncaknya di bulan Oktober 1971, pertempuran antara pasukan paramiliter Muslim dengan militer Filipina telah menyebabkan ratusan orang meninggal dari kedua belah pihak. Genocide yang dilakukan oleh militer Filipina pun tetap berlanjut. Ini terbukti dengan terjadinya lagi pembunuhan massal atas 409 orang Maranao di Tacub di bulan November 1971.

Peristiwa demi peristiwa di atas telah menimbulkan protes dan tekanan pada Filipina dari negara-negara Muslim. Sebagai implikasi dari tragedi Jabaidah, pada pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Organisasi Konferensi Islam (ICFM- Islamic Conference of Foreign Ministers) yang ketiga di Jedah, mereka menekan pemerintah Filipina untuk melindungi kehidupan dan harta benda dari Muslim di Filipina Selatan. Sebagai reaksi atas tekanan ini, di bulan Januari 1972 pemerintah Filipina mengajak 8 duta besar Islam di negaranya untuk tour keliling Mindanao. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tuduhan genocide merupakan hal yang dibesar-besarkan. Di mata internasional, GRP berusaha menutup-nutupi fakta dan menganggap tuduhan genocide tidak benar, walau dalam kenyataannya pembunuhan massal terjadi. Di bulan Juli 1972 rombongan delegasi dari Lybia dan Mesir mendatangi Mindanao dan menyimpulkan bahwa meski belum ada bukti-bukti kuat mengenai aksi genocide, tetapi telah terjadi perang antara Kristen dan Muslim (*clash of civilizations*).

Kekerasan yang bertubi-tubi yang diwarnai dengan aksi saling balas di pihak Kristen maupun Islam di Mindanao telah mendorong presiden Marcos untuk memberlakukan undang-undang militer pada 21 September 1972.

Sesudah tragedi Jabaaidah, aktivitas mahasiswa Moro meningkat. Mereka mengadakan aksi demo selama seminggu di depan istana Presiden di Malacanag dengan menggotong peti jenazah yang ditandai dengan tulisan Jabaaidah. Kesadaran sebagai Bangsamoro yang didasarkan oleh Islam, dan pemahaman tentang latar belakang sejarah dan identitas kultural yang berbeda dari mayoritas Kristen Filipina memuncak. Kristalisasi kesadaran kolektif sebagai Bangsa Moro yang memiliki identitas berbeda dan termarginalisasikan secara ekonomi, politik, dan budaya dari mayoritas Katolik Filipino pada akhirnya termanifestasikan dalam bentuk lahirnya Fron Pembebasan Nasional Moro (Moro National Liberation Front-MNLF) tahun 1969. Pembentukan MNLF didasari oleh perampasan tanah Muslim Moro di Mindanao dan dipicu oleh tragedi tragedi pembunuhan massal di Jabaaidah atas 28 orang Moro yang direkrut ke dalam angkatan bersenjata Filipina di

Pulau Corrogidor. Fron Pembesaran Nasional Moro (MNLF –Moro National Liberation Front) merupakan kelompok pemuda Muslim radikal yang dipimpin oleh bekas professor di University of Philippine, Nur Misuari. Dia muncul sebagai simbol pemersatu dan memimpin kelompok pemberontakan Moro yang terkemuka di Mindanao

Berdirinya MNLF diikuti dengan pembentukan tenaga para-militer bagi pemuda-pemuda Moro yang terekrut di dalamnya. Mereka segera dikirim ke Sabah untuk mengikuti latihan militer. Bagi pemberontak Moro, Sabah bukan saja mensuplai keahlian berperang dan ketrampilan bersenjata menyerang dan mempertahankan diri dari musuh, tetapi juga menjadi tempat perlindungan (persembunyian) mereka.

Sebulan setelah diberlakukannya undang-undang darurat militer, tepatnya Oktober 1972, organisasi perlawanan Moro secara publik menyatakan diri sebagai gerakan kemerdekaan Moro. Peluncurannya sebagai organisasi perlawanan di umumkan di Marawi. Disini secara resmi MNLF mengumandangkan perlawanan terhadap Manila guna mencapai Republik Moro merdeka.

Sejak berdirinya, MNLF secara kontinyu menerima bantuan finansial dan material (termasuk persenjataan) dari berbagai negara Muslim khususnya dari Tinur Tengah maupun organisasi Islam, terutama OIC. Pendukung utamanya adalah pemimpin Lybia, Kolonel Muammar Khadaffi yang telah mencurahkan ribuan pounsterling bagi pemberontak Muslim bersenjata di Mindanao, dan membantu mereka dalam pelatihan militer. Sejak tahun 1972 OIC bahkan menjadikan masalah Muslim di Filipina Selatan sebagai agenda pertemuan tahunan diantara negara-negara anggotanya dan secara tetap mendesak Pemerintah Filipina, yang pada waktu itu di bawah Marcos, untuk mengambil langkah-langkah kebijakan guna menyelesaikan permasalahan Muslim Moro di Filipina Selatan ini.

Keberhasilan MNLF untuk menginternasionalisasikan gerakannya dan konfliknya dengan GRP bukan hanya dalam hal memperoleh bantuan keuangan dan material, dari negara-negara Islam. Keberhasilannya juga tampak dengan menginternasionalisasikan konfliknya dengan GRP melalui kampanye untuk meminta dukungan politik, dan juga pengakuan diplomatik atas Republik Bangsa Moro. *“The Moro rebel group, already enjoying substantial financial and material support from Muslim countries, endeavored to further internationalize the conflict by campaigning for their political support as well, including diplomatic recognition of its self-*

*proclaimed "Bangsa Moro Republic"*⁸⁸: Melalui penginternasionalisasian ini berarti masalah Moro bukan hanya merupakan masalah domestik atau dalam negeri Filipina saja, tetapi juga masalah dunia Islam.

Dalam menginternasionalisasikan konfliknya dengan GRP dan perjuangannya bagi pembebasan Moro, MNLF lebih terfokus pada OIC. OIC memang merupakan satu-satunya organisasi internasional yang menunjukkan kepedulian tinggi atas nasib Muslim Moro, dan secara dekat memonitor perkembangan mereka di Mindanao sejak tahun 1972.

Tekanan-tekanan dari negara-negara Islam mendorong Marcos untuk menerapkan sejumlah kebijakan yang berupaya memperbaiki kondisi sosial ekonomi Mindanao di satu pihak. Di lain pihak, ironisnya, dia tidak menghentikan operasi militer atas pemberontak Moro. Pada pertemuan ICFM yang keempat di Benghazi, negara-negara Islam mempertahankan tekan-tekanan terhadap Marcos, tetapi tetap mengakui kedaulatan Filipina dan masalah Moro sebagai problem dalam negeri Filipina.

Di bawah dukungan OIC, perlawanan bersenjata Bangsamoro yang diwakili oleh MNLF terhadap militer Filipina (AFP Armed Forces of the Philippines) semakin sengit dan memuncak. Ini membuat AFP membagi operasi militer dalam dua komando untuk melawan serangan militer MNLF. Komando Mindanao Tengah (Central Mindanao Command-Cemcom) yang beroperasi di wilayah Cotabato dan Lanao, sedang Komando Selatan (Southern Command – Southcom) yang beroperasi di semenanjung Zamboanga dan kepulauan Sulu. Di bulan Februari 1974. Komando Selatan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melumpuhkan pemberontak MNLF yang pada waktu itu telah menguasai wilayah Jolo. Sedang di daratan Mindanao, serangan dari Komando Mindanao Tengah dipusatkan di Cotabato.

Serangan-serangan di atas makin membuat tekanan dan tuntutan dari OIC kepada GRP meningkat. Pada pertemuan ICFM yang ke-lima, negara-negara anggotanya mendesak Filipina untuk segera mencari solusi politik atas masalah Mindanao dan memulai langkah-langkah perdamaian melalui negosiasi-negosiasi, dan mengakui keberadaan MNLF. Sebagai respons, di tahun 1973 Marcos membentuk team Kepresidenan yang bertugas

⁸⁸ Nathan Gilbert Quimpo. 2000. "Back to War in Mindanao: The Weakness of a Power-based Approach in Conflict Resolution". *Philippine Political Science Journal*. No 44. Vol 21, p 103.

untuk membangun kembali beberapa area di Mindanao yang hancur akibat aksi-aksi kekerasan dan operasi militer. Marcos meresmikan pula Bank Amanah untuk mengembangkan lebih jauh usaha-usaha wiraswasta yang dikembangkan oleh pengusaha-pengusaha Muslim. Islamic center di UP (University of Philippine) pun dibentuk. Marcos pun mendirikan Pengadilan Islam ii tahun 1976. Tahun berikutnya kantor urusan agama dibentuk di dalam Departemen Luar Negeri. Namun langkah-langkah Marcos ini tidak menyelesaikan masalah dan tuntutan mendasar Bangsamoro karena yang mereka inginkan adalah penentuan nasib sendiri (*self determination*) di atas wilayah tinggalnya (*Moro land*)

Usaha-usaha MNLF bagi penyelesaian konfliknya dengan Filipina mendapat tanggapan dari OIC. Hasil dari kampanye MNLF adalah di tahun 1974 OIC mengeluarkan resolusi yang mendesak pemerintah Filipina untuk mencari pemecahan politik dan jalan damai atas masalah Mindanao melalui perundingan dengan MNLF. Dengan disebutkannya MNLF sebagai bagian dari resolusi OIC, ini menunjukkan keberhasilan MNLF dalam membuat terobosan usaha diplomatik. Kendati demikian, negara-negara Islam yang tergabung dalam OIC menolak lepasnya Mindanao dari Filipina. Mereka mendesak pihak-pihak yang berkonflik menemukan solusi yang adil atas masalah Mindanao. Pemecahan atas masalah Mindanao tetap diletakkan dalam kerangka kedaulatan nasional dan integritas teritorial Filipina.

Sebagai akibat dari tekanan ini, pemerintah Filipina pun pada akhirnya menghentikan serangan militernya. Langkah ini kemudian disusul dengan inisiatif pemerintah Filipina untuk mengadakan perundingan dengan MNLF. Di bulan Januari 1975 pemerintah Filipina untuk pertama kalinya duduk dalam meja perundingan dengan Nur Misuari – pimpinan MNLF dan wakilnya Hashim Salamat di Jedah. Marcos juga mengirimkan juru rundingnya kepada Komandan MNLF di lapangan. Wakil-wakil MNLF saling berbeda pendapat dalam menanggapi inisiatif perundingan yang dilancarkan Marcos. Marcos juga menemui Sekretaris Jendral OIC yang berasal dari Senegal, Aamadou Karim Gaye di Kenya, mengirim delegasinya pada pertemuan ICFM ke-tujuh di Istanbul, dan menghadiri pertemuan puncak negara-negara non aligned di Colombo, mengundang Komite Empat ke kota Zamboanga dan Manila. Sementara itu gencatan senjata pun di perpanjang di lapangan.

Di dalam negerinya sendiri Marcos mencanangkan *attraction policy*, suatu kebijakan merangkul para pemberontak agar meletakkan senjata dan berbalik mendukung

pemerintah. *Attraction policy* ini diantaranya dilakukan dengan menawarkan amnesti (pengampunan) bagi figure-figur kunci dari MNLF, dan diperkuat dengan menawarkan bisnis dan proyek-proyek perbaikan kesejahteraan sosial, dan jabatan-jabatan politis lainnya yang membuat pemberontak merasakan menyerah dengan “terhormat”. Anggota MNLF yang menyerahkan diri termasuk diantaranya adalah Amlil Malaguiok, Ketua Komite Revolusioner Cotabato, dan Abdul Hamid bekas hakim kota yang menjadi penasihat hukum Nur Misuari di Jeddah.

Sesudah pertemuan ICFM di atas Marcos juga memperkuat usaha-usaha diplomatiknya dengan mengirimkan delegasi-delegasinya, termasuk penugasan khusus Imelda Marcos ke Lybia, Mesir, Saudi Arabia, dan Algeria. Pemerintah Filipina juga membuka kedutaannya di Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Iran, Algeria, Lebanon, dan Kuwait. Hubungan dengan 113 negara lainnya di Asia Selatan, Timur Tengah, dan negara-negara Muslim Afrika juga diperkuat. Marcos pun berusaha melancarkan perjuangan diplomatiknya sendiri dalam mengatasi masalah Moro. Usaha Marcos ini dapat dikatakan sebagai “manuver balasan” atas usaha-usaha diplomatik MNLF yang berhasil mendesak OIC untuk menyelesaikan masalah Muslim Mindanao. Dia mengirimkan delegasinya (termasuk istrinya: Imelda Marcos) ke negara-negara utama di Arab, membuka hubungan diplomatik lebih banyak dengan negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, dan memperkuat hubungannya dengan negara-negara Muslim.

Akhirnya pada pertemuan ICFM ke-enam memutuskan bahwa agenda penetapan otonomi menjadi tujuan utama dari negosiasi antara MNLF dan GRP. Definisi otonomi berasal dari kertas kerja (*working paper*) yang diajukan oleh Komite empat yang terdiri dari negara-negara: Senegal, Lybia, Saudi Arabia, dan Somalia. Disini otonomi diartikan sebagai sebuah pemerintahan sendiri (*self-government*) di dalam kerangka kedaulatan nasional dan integritas teritorial Filipina.

Di akhir 1976, Imelda R. Marcos berangkat ke Tripoli, Lybia untuk menjajagi perundingan dengan Kolonel Khadafi guna menyelesaikan permasalahan Muslim Moro di Filipina Selatan. Hasil dari kunjungan Imelda adalah terbentuknya kelompok yang mewakili pemerintah Filipina yang bernegosiasi dengan wakil-wakil MNLF di Tripoli. Negosiasi kedua belah pihak ini pada akhirnya menghasilkan Perjanjian Tripoli (*Tripoli Agreement*) yang ditandatangani pada 23 Desember 1976. Melalui peran dari OIC sebagai mediator, GRP dan MNLF menandatangani Perjanjian Tripoli. Dalam perjanjian ini kedua belah

pihak sepakat untuk melakukan gencatan senjata, dan memberi jaminan otonomi bagi 13 provinsi dan 9 kota di Selatan Filipina. Dari perjanjian tampak bahwa otonomi yang menjamin hak untuk “memerintah sendiri (*self rule* atau *home rule*) diatas wilayah (tanah air) sendiri dianggap oleh banyak pihak sebagai solusi yang cukup adil dalam menyelesaikan masalah Moro.

Perjanjian Tripoli menandai langkah-langkah negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Filipina dengan para pejuang nasionalist Moro (MNLF). Kontak senjata antara MNLF dan angkatan bersenjata Filipina (AFP) antara 1973-1975 telah menyebabkan banyak sekali luka dan korban jiwa. Faktor ini yang mendorong OIC untuk menekan Pemerintah Filipina untuk segera mengadakan perdamaian. Keberhasilan lobi Misuari dengan demikian bukan hanya dalam bentuk datangnya bantuan keuangan dan material (persenjataan dan latihan militer) dari negara-negara Islam, tetapi juga dari usaha OIC untuk mensponsori perdamaian antara MNLF dan GRP. Dukungan OIC bagi MNLF tampak nyata dengan adanya tekan-tekanan pada pemerintah Filipina untuk menjamin otonomi penuh dan berarti bagi rakyat Moro.”The OIC supported regional autonomy as the basis for GRP – MNLF negotiations. It pressed the MNLF to accept autonomy”⁸⁹.

Keberhasilan negara-negara Islam yang tergabung dalam keanggotaan OIC untuk menekan Filipina diantaranya juga lantaran penerapan politik minyak (*oil politics*): ketergantungan Filipina pada ekspor minyak dari OPEC. Tidak mudah bagi GRP untuk mengabaikan tekanan OIC, mengingat sebagian besar dari negara-negara OIC juga anggota-anggota pengekspor minyak (Organisation of Petroleum Exporting Countries – OPEC). OPEC pernah menggunakan “senjata minyak” (*oil embargo*) ini di tahun 1973 pada negara-negara yang pro Israel. Ekonomi Filipina sangat dipengaruhi oleh anggaran militer yang telah dikeluarkannya untuk menghadapi perang dengan pasukan pemberontak MNLF. Adanya ancaman embargo dari OPEC untuk menghentikan ekspor minyak ke Filipina bila masalah Muslim Mindanao tak diselesaikan, kemungkinan besar akan makin memperburuk kondisi perekonomian Filipina. Lantaran intimidasi ini, tak ada jalan lain bagi Filipina selain mematuhi resolusi dari OIC untuk menempuh jalan damai melalui negosiasi dengan MNLF. Untuk menghindari embargo minyak dari OPEC dan memuluskan hubungan dengan negara-negara yang tergabung dalam OPEC, pemerintah Filipina bertindak hati-hati untuk tidak terlalu menentang resolusi OIC. Pada akhirnya Marcos menyetujui untuk berunding dengan MNLF dengan menjadikan OIC sebagai

⁸⁹ Ibid, hal 104.

mediator. Kesepakatan Marcos ini menunjukkan kemenangan perjuangan diplomatik MNLF.

Perjanjian Tripoli memberi otonomi bagi 13 propinsi dan 9 kota sebagai daerah otonomi. Di dalam daerah otonomi ini, Muslim Moro diberikan hak untuk mendirikan sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam (syari'ah). Muslim Moro pun berhak mendirikan sekolah-sekolah dan universitas-universitas dengan kurikulum Islam di dalamnya, memiliki sistem administrasi pemerintahan tersendiri, di samping satuan keamanan khusus regional. Meskipun demikian untuk urusan yang menyangkut pertahanan keamanan, masalah luar negeri, pengelolaan sumber daya mineral dan tambang tetap berada di bawah kontrol pemerintah Pusat.

Perjanjian Tripoli bukanlah instrumen perdamaian yang dimaksudkan untuk benar-benar memecahkan masalah Moro. Ini hanya merupakan suatu bentuk permainan kekuasaan dan "permainan Marcos" untuk mengambil hati dari negara-negara Islam yang menguasai ekspor minyak. Beberapa menit sebelum ditanda tangannya perjanjian ini, Marcos melalui Sekretaris Pertahanan, Carmelo Barbero, yang juga bertindak sebagai juru runding utama bagi GRP, menambahkan persyaratan dalam perjanjian tersebut yakni "pemerintah Filipina akan mengambil langkah-langkah yang mengikuti proses konstitusional yang dianggap perlu bagi pelaksanaan keseluruhan Perjanjian.

Perjanjian Tripoli gagal karena perbedaan-perbedaan yang menyangkut implementasi dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Filipina sendiri yang di waktu itu diwakili rezim Marcos. Negosiasi terhenti pada isu bagaimana memenuhi isi perjanjian secara detail. Sementara itu Marcos sendiri bertahan untuk menyelenggarakan plebisit (pemungutan suara secara langsung) mengenai isu otonomi di Mindanao untuk menyetujuinya.

Dengan adanya perjanjian ini MNLF berharap otonomi segera bisa dilaksanakan di ke 13 propinsi dan 9 kota di atas. Dalam perundingan selanjutnya pemerintah Marcos berkeras sebagai bagian dari proses konstitusional, referendum atau pemungutan suara harus dilaksanakan dulu untuk menentukan apakah penduduk di ketiga belas propinsi dan 9 kota tersebut menyetujui wilayah mereka dimasukkan sebagai daerah otonomi. Hasil referendum yang diselenggarakan pada 17 April 1977 menunjukkan 10 propinsi yang mau dimasukkan sebagai wilayah otonomi.

Sesudah referendum, Marcos kemudian menciptakan otonomi menurut versinya sendiri dengan membagi sepuluh propinsi ke dalam dua wilayah otonomi: Wilayah ke-9 (*Region IX*) dan Wilayah ke-12 (*Region XII*). Meskipun pihak MNLF keberatan dengan pembagian ini, Marcos tetap bertahan dengan kebijakannya, dan menetapkan *Region IX* mencakup: Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur). Sedang Wilayah *Region XII* meliputi: Lanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato Utara, Maguindanao, dan Sultan Kudarat. Pemerintah Marcos berkeras bahwa kedua wilayah itu merupakan implementasi dari Perjanjian Tripoli. Sedang MNLF dan OIC menolak kebijakan ini, dan menuduh Marcos tidak benar-benar mematuhi isi Perjanjian Tripoli dan menginginkan suara dan wilayah Muslim terpecah ke dalam dua wilayah tersebut. Dalam perjanjian Tripoli kedua belah pihak sudah menyepakati bahwa otonomi akan diberikan pada 13 provinsi ditambah 9 kota. MNLF menuduh banyak kecurangan yang dilakukan pendukung-pendukung Marcos dalam pemungutan suara tersebut. Plebisit yang diadakan pemerintah Marcos sebenarnya merupakan manuver politik Marcos untuk mengurangi wilayah otonomi Muslim Moro, dan otonomi berjalan tidak seperti isi Perjanjian Tripoli.

Selanjutnya pemerintah Marcos menentukan bahwa pemerintahan otonomi di Wilayah IX dan XII bertugas untuk: memperluas perdamaian dan menjaga kondisi ketertiban di ke dua wilayah ini, menempatkan kembali keluarga-keluarga yang dievakuasi atau diungsikan selama terjadinya kontak senjata antara pasukan pemerintah dan MNLF, dan mempercepat pembangunan sosial-ekonomi di masing-masing wilayah. Marcos juga menempatkan para elit tradisional yang menjadi pendukung utama partainya (KBL) untuk menduduki posisi-posisi politik penting di kedua wilayah otonomi ini.

Secara teoritik pemerintah daerah otonomi di kedua wilayah tampaknya memiliki kekuasaan di masing-masing wilayah, namun dalam kenyataannya pemerintah Pusat Manila membatasi kekuasaan mereka. Mereka tidak diperbolehkan bertindak atau mengambil langkah-langkah yang sudah diatur didalam yurisdiksi nasional dan menjadi kompetensi pemerintahan pusat, yang menyangkut: masalah pertahanan dan keamanan nasional, hubungan luar negeri, perdagangan luar negeri, mata uang, masalah keuangan, pertukaran perdagangan, perbankan dan quasi perbankan, dan pinjaman-pinjaman luar negeri, transportasi udara dan laut, bea cukai dan karantina, imigrasi dan deportasi, kewarganegaraan dan naturalisasi, ekonomi nasional, perencanaan sosial dan pendidikan, dan pertemuan umum.

Banyak Muslim yang menduduki jabatan politis dan birokrasi di kedua wilayah otonomi ini. Namun sebagian besar tidak merasakan bahwa mereka benar-benar telah “mempraktekkan” konsep otonomi dalam artian yang sesungguhnya (*real autonomy*). Hal ini dikarenakan badan legislative maupun eksekutif di kedua wilayah otonomi tersebut tidak dapat bertindak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemerintah Marcos. Di samping itu tak ada peningkatan kondisi sosial ekonomi di wilayah-wilayah Muslim, sebagian besar dari mereka tetap berstatus sebagai “pengungsi” di atas tanah tinggal dan lahan-lahan pertanian yang diwarisi dari nenek moyang mereka dulu. Ini disebabkan perjanjian Tripoli tidak menyelesaikan masalah tanah. Penduduk Muslim Moro tetap menganggap pendatang Katolik Filipino sebagai penjarah-penjarah tanah (*Christian landgrabbers*) dan GRP justru memberikan legitimasi atau memudahkan akses bagi penguasaan (dominasi) atas tanah-tanah mereka secara legal.

Pengawasan militer Filipina yang sangat intensif di kedua wilayah otonomi ini memperbesar kecurigaan MNLF bahwa pemerintah Marcos belum sepenuhnya memberikan “*real autonomy*” pada Muslim Moro. Pemerintah Daerah Otonomi di Selatan Filipina berfungsi sebagai unit-unit administrasi yang terus-menerus dikontrol oleh pemerintah Marcos. Dengan demikian pemerintahan otonomi di kedua wilayah ini telah mendukung pemerintah nasional untuk menetralsir perluasan pengaruh MNLF di Wilayah IX dan XII, dan menjadi agen birokrasi dari pemerintah Pusat yang berfungsi mengetatkan pengawasan di daerah-daerah yang termasuk dalam kedua wilayah otonomi di atas. Singkatnya otonomi hanya dalam bidang administrative bukan otonomi politik.

OIC menunjukkan reaksi marah atas manuver-manuver Marcos dalam menerapkan perjanjian Tripoli. OIC menyatakan bahwa pemerintah Filipina bertanggungjawab atas gagalnya negosiasi dan menuduhnya melepaskan diri terhadap tanggungjawab internasional. OIC kemudian memberikan status sebagai pengamat (*observer*) bagi MNLF di dalam OIC. Disini OIC mengakui MNLF sebagai wakil yang absah dari gerakan Muslim di Filipina Selatan. Status MNLF sebagai *observer* ini hanya satu derajat di bawah status sebagai anggota penuh dari OIC. Pengakuan ini membuktikan keberhasilan diplomatik MNLF, MNLF diperlakukan sebagai mitra terdekat dari OIC.

Beberapa saat sebelum keberhasilan pengakuannya di OIC, MNLF mengalami perpecahan. Perpecahan ini semakin terbuka di akhir tahun 1977 ketika banyaknya tuduhan-tuduhan yang dilancarkan pada diri Nur Misuari, sebagai pimpinan yang korup, otoriter, dan ingin menggantikan Islam dengan ideologi Marxisme. Hashim Slamet— wakil ketua dari MNLF

– kemudian menyempal dari MNLF dan mendirikan MNLF baru (yang pada tahun 1984 kemudian menjadi MILF). MNLF di bawah Nur Misuari kemudian kembali pada tujuan semula yakni Republik Bangsa Moro merdeka. Sedang kelompok Hashim Salamat menghendaki diterapkannya Perjanjian Tripoli.

Tahun 1977 dan 1978 merupakan masa sulit bagi kepemimpinan MNLF. Dukungan konsisten OIC bagi MNLF telah mengundang protes bagi beberapa pemimpin tradisional dan politisi lokal di Mindanao. Mereka menentang MNLF dan Nur Misuari (pucuk pimpinan MNLF) sebagai satu-satunya juru bicara Bangsa Moro. Dalam pandangan mereka OIC sangat berat sebelah lantaran hanya mengakui MNLF sebagai satu-satunya organisasi yang merepresentasikan kepentingan Bangsa Moro. Perpecahan dalam tubuh MNLF sendiri juga ditunjang oleh terdapatnya perbedaan ideologi dan pendapat dalam menginterpretasikan pelaksanaan otonomi di kedua wilayah. Sebagai akibatnya Hashim Salamat keluar dari MNLF dan mendirikan MILF. Di tahun 1982, MNLF mengalami lagi perpecahan dengan keluarnya Dimasangkay Pundato yang membentuk Kelompok Reformis MNLF (MNLF Reformist Group). Ketiga pucuk pimpinan gerakan pembebasan Moro memiliki pendukung sesuai dengan latar belakang etnik masing-masing. Misuari memperoleh dukungan sebagian besar dari etnik Tausug, Salamat dari Maguindanao, dan Pundato dari Maranao.

Dengan terjadinya perpecahan ini, MNLF tidak lagi memiliki kekuatan militer setangguh seperti di masa diberlakukannya Undang-Undang Darurat dahulu. Di samping perpecahan ini, OIC tetap mempertahankan status MNLF sebagai observer, dan pada tahun 1978 memutuskan untuk tetap mengakui Misuari sebagai juru bicara dan pimpinan MNLF.

Pada tahun 1980 OIC bahkan mengumumkan dukungannya atas perjuangan Bangsa Moro untuk menentukan nasibnya sendiri. Ini berarti untuk pertama kalinya OIC mengakui rakyat Moro sebagai sebuah bangsa, dan mendukung perjuangan Moro untuk menentukan nasibnya sendiri, di samping perjuangan untuk memperoleh otonomi daerah. Lebih jauh lagi OIC juga mendesak negara-negara anggotanya untuk memberi tekanan ekonomi, sosial, dan politik pada pemerintah Filipina agar segera memenuhi perjanjian Tripoli. Sebagai wujud dari tekanan ini, di bulan November 1980 pemerintah Arab Saudi menghentikan kontrak pengiriman 10.000 barel minyak perhari ke Filipina. Dengan gagalnya pelaksanaan Perjanjian Tripoli di era Marcos, MNLF kemudian menaikkan tuntutanannya dari otonomi ke pemisahan diri.

Sudah merupakan acara ritual tahunan bagi OIC untuk mengeluarkan resolusi pada GRP agar mempercepat pelaksanaan Perjanjian Tripoli. Atas reaksi terhadap kelambanan pemerintah Filipina dalam menerapkan otonomi sesuai Perjanjian Tripoli, pada bulan Januari 1986 OIC mengeluarkan kembali resolusi yang mempertegas dukungannya bagi MNLF untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyeru pada semua anggotanya untuk meningkatkan bantuan material dan keuangan pada MNLF dalam kapasitasnya sebagai satu-satunya wakil Bangsa Moro. OIC juga mengeluarkan resolusi menolak tuntutan MNLF untuk pemisahan diri. OIC tetap bertahan dengan keputusan otonomi regional dalam konstelasi kedaulatan nasional dan integritas wilayah Filipina. "... to arrive at a just solution to the Mindanaoi problem within the framework of the national sovereignty and territorial integrity of the Philippines"⁹⁰. Sebulan setelah itu rezim Marcos dijatuhkan melalui *people power*.

IV.3. ARMM (Autonomous Region for Muslim Mindanao)

Terjadinya revolusi di tahun 1985 dengan bergolaknya *people power* untuk pertama kalinya membuka kemungkinan terjadinya kompromi dan negosiasi yang sungguh-sungguh dalam pelaksanaan otonomi di Mindanao. MNLF ikut berkampanye untuk pemilihan Aquino. Kelompok-kelompok Moro bergabung dalam aksi oposisi menumbangkan Marcos pada bulan Maret 1985. Dalam komunike ini dinyatakan bahwa kelompok mujahidin siap untuk membuka saluran komunikasi dan kooperasi dengan kelompok-kelompok yang berposisi dengan Marcos guna mempercepat menggulingkan Marcos

Sesudah terpilihnya Aquino sebagai Presiden Filipina, Aquino menemui Nur Misuari dan membuka perundingan. Ini merupakan perundingan pertama di masa awal pemerintahannya. Perundingan ini kemudian berlanjut di Januari 1987 dengan ditandatanganinya "Jeddah Accord", di Jeddah-Arab Saudi antara GRP dan MNLF. Kedua belah pihak menyetujui proposal yang menjamin pelaksanaan otonomi penuh di Mindanao, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, dan Palawan; dan gencatan senjata. Aquino kemudian membentuk komisi konstitusi untuk membuat undang-undang yang menjamin pelaksanaan otonomi bagi Muslim Mindanao melalui referendum. Didasari oleh kekhawatiran bahwa Aquino akan bertindak seperti pendahulunya, Marcos, yang mengurangi wilayah otonomi (tidak sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian Tripoli),

⁹⁰ OIC, 5th ICFM. Kuala Lumpur, Malaysia. June 1974.

MNLF meminta Aquino untuk menunda pengesahan undang-undang tersebut. Namun Aquino menolak usulan MNLF, dan pada bulan Februari 1997 undang-undang yang mengatur penentuan wilayah otonomi disahkan.

Aquino juga mengambil kebijakan mendinternasionalisasi konflik di Mindanao dengan menolak keterlibatan peran OIC sebagai mediator yang menengahi konflik GRP-MNLF. MNLF tetap mengejar target otonomi di ketiga belas propinsi sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Tripoli, dan menuntut Presiden Aquino untuk segera mengimplementasikannya. Sedang pemerintah Aquino berkeras untuk mengadakan referendum dulu sebelum memberi otonomi, sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkannya. Aquino kemudian mengiriskan delegasinya dengan menawarkan "jaminan otonomi bagi 8 provinsi terlebih dulu, dan akan ditingkatkan lagi menjadi 10 provinsi kemudian. Misuari menolak usul ini, yang berakibat perundingan menemui jalan buntu.

Meskipun tidak lagi dilibatkan, OIC dalam setiap pertemuan tahunannya tetap berfungsi sebagai pihak pengontrol yang mengkritik langkah-langkah kebijakan GRP yang tidak mentaati isi Perjanjian Tripoli, OIC bahkan memperingatkan GRP bahwa Perjanjian Tripoli merupakan suatu perjanjian internasional yang mengikat, dan kembali menyatakan dukungan pada MNLF sebagai satu-satunya wakil Bangsamoro. Termotivasi oleh dukungan ini, MNLF kemudian meminta untuk mendapatkan status keanggotaan penuh dalam tubuh OIC. Dalam hal ini MNLF memperoleh inspirasi dari PLO (Palestine Liberation Organisation). Meski Palestina belum merupakan negara yang berdaulat tetapi memperoleh keanggotaan penuh di OIC. OIC masih menimbang untuk menyetujui permintaan MNLF ini. Belakangan permohonan MNLF untuk menjadi anggota tetap dijadikannya sebagai "senjata ancaman". Jika Filipina tidak benar-benar menepati janjinya untuk melaksanakan otonomi sesuai dalam Perjanjian Tripoli, OIC akan memasukkan MNLF bukan hanya sebagai observer, tetapi meningkatkan statusnya sebagai anggota tetap. Disini OIC membalas manuver diplomatik (*diplomatic counter offensive*) pemerintahan Aquino atas deinternasionalisasian peran sertanya untuk menyelesaikan konflik GRP- MNLF dalam masalah Mindanao.

Untuk mencegah MNLF memperoleh status sebagai anggota penuh dalam OIC, yang diartikan sama dengan pengakuan "kedaulatan" Mindanao sejajar dengan negara-negara Islam lainnya, Aquino kembali mengirim wakil-wakilnya. Manuver diplomatik OIC yang menjanjikan keanggotaan penuh bagi MNLF, telah memaksa GRP untuk kembali

ke arena perundingan internasional dan melakukan serangan balik secara diplomatik. Manuver OIC juga berhasil memaksa GRP untuk mengembalikan posisi semula OIC sebagai mediator konflik GRP-MNLF. Wakil-wakil Aquino menjadikan perpecahan (faksionalisasi) dalam tubuh MNLF sebagai alasan penundaan dan kendala utama bagi penerapan otonomi. Mereka menyatakan bahwa otonomi yang hendak dibangun bagi Muslim Mindanao sesuai dengan semangat dan isi Perjanjian Tripoli. Namun perpecahan dalam tubuh MNLF menghambat pelaksanaan otonomi itu sendiri. Wakil-wakil ini juga menyatakan bahwa GRP siap menggalang lagi perundingan damai dalam panel Moro bersatu yang mencakup wakili-wakil dari ketiga kelompok separatistis. Usaha ini berhasil, OIC kemudian menunda permintaan MNLF untuk menjadi anggota penuh di OIC.

Di bulan Agustus 1989 Aquino menandatangani undang-undang tentang pembentukan ARMM (Autonomous Region for Muslim Mindanao). Dalam pemungutan suara (referendum) yang diselenggarakan 3 bulan kemudian, namun diboikot oleh MNLF dan MILF, hanya 5 provinsi (Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Maguindanao, Lanao del Sur) dari 13 provinsi yang memilih untuk dimasukkan ke dalam ARMM. Tak satu pun kota yang setuju dimasukkan dalam ARMM. Hasil referendum menunjukkan hanya 4 provinsi (Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao del Sur) yang mau bergabung dengan ARMM. ARMM akhirnya diresmikan pada November 1990. Sesuai dengan hasil referendum, Pemerintah Aquino hanya menyetujui 4 provinsi dengan pertimbangan di kelima propinsi tersebut Muslim merupakan mayoritas. Sedang di 8 propinsi lainnya penduduk Kristen Filipino menduduki posisi mayoritas, sedang Islam merupakan minoritas. Kedudukan sebagai mayoritas ini diperoleh dengan menyita tanah Moro secara besar-besaran semenjak masa kolonisasi Amerika dan awal kemerdekaan Filipina.

ARMM adalah suatu pemerintahan otonom yang memiliki badan eksekutif dan legislative dengan berbagai cabangnya. ARMM memiliki birokrasi yang sangat besar yang terdiri dari 9 departemen dan lebih dari 19.000 pegawai. Tiap-tiap pemerintah di masing-masing dari kelima provinsi merupakan bagian struktur internal dari ARMM. ARMM memberikan kesempatan bagi pemimpin tradisional (datu) untuk memperoleh (memperkuat) kembali pengaruh politik mereka. Meski pada awalnya mereka bergabung dengan kelompok pemberontak (separatist) untuk memperjuangkan "pemisahan diri" dan pemerintahan sendiri bagi Moro, setelah perjanjian Tripoli secara perlahan-lahan mereka digiring untuk bekerjasama dengan pemerintah. Secara politis mereka mendapatkan keuntungan dengan merepresentasikan diri dalam institusi politik. Pembentukan ARMM sebetulnya merupakan

pelembagaan dari otonomi di daerah-daerah Muslim, namun dalam kenyataannya tidak dapat memuaskan MNLF. Dengan pembentukan ARMM, meski wilayah propinsi yang dicakup dalam ARMM tak disetujui oleh MNLF, GRP berusaha meyakinkan negara-negara anggota OIC mengenai kesungguhannya untuk menepati komitmen terhadap Perjanjian Tripoli.

Di masa pemerintahan Aquino perjanjian gencatan senjata banyak dilanggar yang ditandai dengan seringnya terjadi kontak senjata antara pasukan pemerintah Filipina dengan MILE, yang merupakan pecahan dari MNLF. Sementara itu, posisi Aquino di kalangan angkatan bersenjata Filipina sangat lemah, sehingga terjadi beberapa usaha kudeta untuk menggulingkan pemerintahannya. Lemahnya posisi Aquino ini menjadi salah satu faktor penghambat perundingan antara kedua belah pihak.

IV.4. Perjanjian Damai 1996 (1996 Peace Agreement)

Dua minggu sebelum pemilihan Presiden Filipina 1992 berlangsung, Ramos calon presiden yang didukung Aquino, menemui Kaddafi di Tripoli untuk membicarakan tentang penyelesaian konflik di Mindanao. Dalam masa-masa ini MNLF secara militer dan politis sudah banyak kehilangan kekuatannya. Ini disebabkan oleh perpecahan yang terjadi di pucuk pimpinan MNLF. Di samping itu, 5 tahun gencatan senjata (dari masa pemerintahan Aquino) telah mengurangi kekuatan organisasi ini secara militer. Secara politik, GRP berhasil menggagalkan keanggotaan penuh bagi MNLF di OIC. Meskipun demikian, Ramos masih mengakui MNLF memiliki kekuatan gerilya yang cukup besar dan tetap memperoleh dukungan tetap dari OIC.

Setelah Ramos terpilih untuk menggantikan Aquino, tim kepresidenan kembali ke Libia dan langsung bertemu dengan Misuari. Ramos memulai membuka perundingan kembali dengan MNLF. Pertemuan-pertemuan berikut untuk menggalang negosiasi diantara kedua belah pihak berlangsung antara tahun 1993 dan 1996, yang pada akhirnya menandai Perjanjian Damaian yang ditanda-tangani pada September 1996.

Tidak seperti Aquino yang pernah menolak peran OIC dalam perundingan antara GRP dan MNLF, Ramos menyambut baik peran OIC sebagai mediator antara keduanya. Ini lantaran Ramos melihat kenyataan bahwa organisasi ini menolak pemisahan diri Bangsa Moro dari Filipina, dan mendorong MNLF agar menerima otonomi saja. Selama masa pemerintahan Ramos, kompromi kedua belah pihak sangat mudah dilakukan. Ini

mengingat Ramos sendiri menerima asas perluasan otonomi. Wilayah yang dijadikan sasaran otonomi adalah semua daerah yang tercakup dalam Perjanjian Tripoli. Sementara itu pemerintahan Ramos juga menunjukkan komitmen sungguh-sungguh untuk memperlancar proses penerapan otonomi. Pemerintahan Ramos yang ditunjang oleh potensinya yang lebih besar dibandingkan Aquino dalam mengontrol angkatan bersenjata Filipina, dan menciptakan kestabilan politik Filipina selama masa kepresidenannya, telah meyakinkan MNLF bahwa pemerintah akan mematuhi komitmen perdamaianya dan perluasan otonomi bagi Muslim Moro di tanah kelahirannya. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya kompromi yang lebih besar di pihak MNLF bagi terlaksananya perundingan perdamaian ini adalah: pertama, kekuatan MNLF sudah banyak menurun dibandingkan masa-masa sebelumnya. Ini dikarenakan banyaknya pasukan bersenjata dari MNLF yang menyerahkan diri pada pemerintah lantaran *reward* yang diberikan pemerintah termasuk rekrutmen kedalam angkatan bersenjata dan kepolisian Filipina. MNLF juga mengalami masalah ideologis. Basis ideologi dari organisasi untuk memobilisasi massa adalah nasionalisme. Sedang basis ideologi Islam dinilai sangat lemah. Ini mengingat pendukung utama adalah para pemimpin tradisional (*datu*) dan intelektual, termasuk Nur Misuari sendiri, adalah penganut Marxist. Perpecahan dalam tubuh (anggota-anggota) MNLF sendiri yang didasarkan oleh perbedaan latar belakang etnis juga membuktikan bahwa MNLF tidak mampu memberikan basis ideologi yang kuat yang mampu menyatukan pendukung-pendukungnya. Pada akhirnya mereka yang menginginkan Islam sebagai satu-satunya basis ideologi bagi perjuangan mereka, memisahkan diri dan membentuk organisasi yang lebih berorientasikan Islam, yakni MILF (Moro Islamic Liberation Front). MNLF memperoleh basis dukungan khususnya dikalangan etnis Tausug, sedang pendukung-pendukung MILF sebagian besar berasal dari etnis Maguindanao dan Marano⁹¹.

⁹¹ Dalam sejarahnya, Bangsa Moro yang berasal dari Selatan Filipina terdiri dari 13 kelompok bahasa (*ethnolinguistic groups*). Mereka adalah: *Tausug*, *Sama (Samal)*, dan *Bajao* yang mendiami Kepulauan Sulu (termasuk Tawi-Tawi), pesisir pantau dari Semenanjung Zamboanga, Palawan Selatan, dan Davao, *Jama Mapun* yang berdiam di Cagayan de Tawi-Tawi dan Palawan Selatan, *Palawanon (Palawani dan Molbog)* yang tinggal di Palawan Selatan, Yakan di pulau Basilan, *Kalibugan* tinggal di Semenanjung Zamboanga, *Marano* di Provinsi Marano. *Ilanun (Iranun)* di pesisir pantai Cotabato, Lanao del Sur, dan Zamboanga del Sur, *Maguindanao* di Cotabato. *Sangil* di Selatan Cotabato dan Davao del Sur, dan Kalagan di Davao. Dewasa ini orang-orang Moro telah menyebar pula ke bagian lain dari wilayah Filipina, termasuk Metro Manila.

Perjanjian damai yang ditandatangani GRP dan MNLF pada September 1996 dimaksudkan sebagai perjanjian final bagi pelaksanaan dari Perjanjian Tripoli. Perjanjian 1996 merupakan elaborasi dari Perjanjian Tripoli 1976. Disini sebagaimana telah diatur dalam perjanjian Tripoli, pemberian otonomi dilengkapi dengan sistem administrasi, badan-badan eksekutif dan legislative, dan satuan pertahanan regional. Dalam perjanjian ini MNLF menerima ARMM yang mencakup 5 provinsi. Perbedaannya dalam Perjanjian Damai 1996 diterapkan selama 3 tahun masa transisi dimana MNLF akan diberi kesempatan untuk menjalankan struktur transisional dari otonomi. Dengan demikian ini merupakan kesempatan bagi MNLF untuk menunjukkan kompetensinya di pemerintahan dan untuk meyakinkan masyarakat di semua provinsi dan kota agar mereka memberikan dukungan bagi pelaksanaan otonomi.

Dalam masa ini semua elemen dari MNLF diintegrasikan ke dalam angkatan bersenjata dan polisi Filipina. Ramos mengembangkan kebijakan akomodasi dan kooptasi kekuatan MNLF dengan memberikan kesempatan kerja (rekrutmen) pada bekas gerilyawan MNLF termasuk keluarga mereka ke dalam angkatan bersenjata Filipina dan kepolisian.

Perjanjian Perdamaian September 1996 pada prinsipnya merupakan implementasi dari Perjanjian Tripoli 1976 yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama: membentuk Dewan Perdamaian dan Pembangunan Selatan Filipina (SPCPD –Southern Philippine Council for Peace and Development) dan Dewan Penasehat (Consultative Assembly). Kedua lembaga ini diciptakan untuk mengakomodasikan (mengkooptasi) semua anggota MNLF ke dalam pemerintahan. Melalui pertimbangan dari Consultative Assembly, SPCPD bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan otonomi di masing-masing propinsi selama tiga tahun pertama. Dalam masa transisi ini SPCPD, melalui pertimbangan dari Consultative Assembly, juga akan mempromosikan dan mengkoordinasikan usaha-usaha perdamaian dan pembangunan di ketiga belas propinsi yang akan dirancang sebagai Zone Khusus bagi Perdamaian dan Pembangunan di Selatan Filipina (SZOPAD – Special Zone of Peace and Development). Lembaga ini juga berkewajiban menyampaikan hasil-hasil laporannya tentang pelaksanaan otonomi kepada Presiden. Nur Misuari sebagai pimpinan MNLF, menjadi ketua SPCPD. Pemerintah juga menyetujui pencalonannya sebagai gubernur SZOPAD.

Tahap kedua, Pemerintah Pusat akan mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di ketiga belas propinsi dan 9 kota untuk menentukan status masing-masing sebagai daerah otonom.

Apabila daerah otonom di kelima provinsi ini sudah disetujui dan terbentuk (berdasarkan referendum), langkah berikutnya adalah membentuk organisasi pemerintahan di masing-masing provinsi dan kota tersebut yang bertanggung jawab ke pemerintah nasional di Pusat. Di samping itu dibentuk pula satuan keamanan regional, memasukkan kurikulum Islam, dan sekolah-sekolah Islam (Madrasah) dalam sistem pendidikan di masing-masing daerah otonomi. Setiap pemerintahan di masing-masing daerah otonomi juga diberikan hak untuk memiliki sistem pengadilan yang didasarkan pada syari'ah Islam.

Perjanjian Damai 1996 ini juga mencakup rekrutmen bagi 7.500 tentara MNLF ke dalam Angkatan Bersenjata dan Kepolisian Filipina. Ramos mengembangkan kebijakan akomodasi dan kooptasi kekuatan MNLF dengan memberikan kesempatan kerja (rekrutmen) pada bekas gerilyawan MNLF termasuk keluarga mereka ke dalam militer dan kepolisian Filipina.

Sebagai manifestasi dari Perjanjian Tripoli 1976, Perjanjian Damai 1996 diharapkan dapat menjadi penyelesaian konflik antara GRP dan MNLF – pertikaian bersenjata yang telah berlangsung 24 tahun lamanya dan menelan tidak kurang dari 120.000 korban jiwa, puluhan ribu orang luka-luka, dan lebih dari satu juta orang kehilangan rumah dan ladang-ladang mereka. Dengan perjanjian Perdamaian 1996 diharapkan pula dapat menyelesaikan konflik bersenjata dengan kelompok pembesasan Moro yang lain, MILF dan Abu Sayyaf. Dan pada akhirnya meletakkan dasar bagi terlaksananya perdamaian abadi yang didasarkan oleh prinsip otonomi yang adil di ketiga belas propinsi dan 9 kota.

SPCPD merupakan Dewan yang mengawasi program-program pembangunan di wilayah Mindanao yang beranggotakan 5 anggota semi eksekutif, 81 anggota semi legislative dari Dewan Pertimbangan (Consultative Assembly), dan sekretariat. Tujuh bulan setelah pembentukannya mereka tetap saja tidak memiliki power (pengaruh) dan kinerja mereka belum membawa dampak perbaikan sosial ekonomi di kelima provinsi yang ditetapkan dalam ARMM. Ketiga badan ini tidak memiliki otoritas kekuasaan untuk merencanakan dan mealaksanakan proyek-proyek pembangunan. Ini lantaran mereka tidak memiliki otoritas mengatur sistem keuangan yang mandiri untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Semua fungsi ini dikontrol oleh NEDA (National Economic Development Authority) atau Otoritas Pengembangan Ekonomi Nasional yang tersentralisir. Tidak ada sistem yang mendesentralisasikan keputusan-keputusan pusat ke tingkat regional. Kongres menolak pengalokasian anggaran secara khusus bagi ketiga badan ini. Eksistensi

dan peran mereka secara operasional sepenuhnya bergantung pada Presiden. Ini membuktikan konsep otonomi masih menjadi utopia bagi penyelesaian konflik GRP-MNLF. Sebagai implikasinya Nur Misuari menuduh pemerintah Maila kurang mendukung proses perdamaian.

Dalam kenyataannya perlawanan bersenjata tak berhenti juga dengan adanya pendaratan perjanjian perdamaian ini. Dengan kata lain pertempuran bersenjata antara GRP dengan kelompok separatis yang lain, seperti MILF dan Abu Sayyaf tetap berlanjut. Bahkan konflik antara GRP dan MNLF tidak begitu saja terselesaikan dengan adanya perjanjian damai di atas. Pada akhirnya banyak kalangan yang menilai bahwa Perjanjian Damai 1996 tersebut gagal.

Beberapa hal yang mendasari kegagalan Perjanjian Damai 1999 di antaranya adalah: pertama, terjadinya *mismanagement* dan korupsi dalam pengelolaan otonomi. Nur Misuari dan pengikutnya di MNLF gagal menunjukkan bahwa kepemimpinan mereka dalam institusi yang dibangun untuk melaksanakan otonomi di masing-masing wilayah provinsi mampu mensejahterakan semua penduduk Muslim dan non-Muslim di masing-masing daerah otonomi. Kedua, pembentukan SPCPD dan ZOPFAN kurang memperoleh dukungan dari kelompok sapatist Moro lain, karena sebagian besar dilaksanakan oleh MNLF khususnya yang berasal dari etnik Tausug, dan tidak melibatkan non-Muslim. Sebagai akibatnya proposal otonomi yang dicanangkan dalam Perjanjian Damai 1996 tidak dianggap sebagai solusi yang akan melibatkan semua kelompok termasuk disini adalah non-Tausug Muslim yang mendukung MILF, dan non Muslim sendiri. Gerakan Muslim radikal, seperti MILF dan Abu Sayyaf menganggap bahwa Perjanjian Damai 1996 ditanda tangani oleh kelompok-kelompok sekuler (GRP dan MNLF) dengan mengorbankan identitas dan cara hidup Muslim. Problem ini hanya dapat diselesaikan dengan mendirikan negara Islam merdeka. Ketiga, Perjanjian Damai di atas tidak menyelesaikan masalah tanah. Banyak problema yang menyangkut pemilikan tanah pribadi dan berpindahnya tanah-tanah Muslim ke tangan pendatang Katolik Filipina Masalah tanah sangat penting untuk segera diselesaikan demi mencegah konflik-konflik horizontal jangka panjang. Keempat, otonomi terbukti tidak memberikan perbaikan standard kehidupan bagi masyarakat lokal.

IV.5. Posisi MILF dalam Konteks Perundingan Damai

Berhadapan dengan pecahan dari MNLF yakni MNLF baru (yang kemudian menjadi MILF, di awal 1979, semasa Marcos, pemerintah Filipina pernah membuka negosiasi dengan kelompok Hashim Salamat (dulu disebut MNLF baru). Namun perundingan ini tidak membawa hasil. Pada waktu itu posisi MILF masih “lemah” baik secara politik maupun militer. Marcos berunding dengan MILF untuk memanfaatkan perpecahan yang terjadi di dalam kepemimpinan inti dari MNLF. Kedudukan MILF semakin lemah khususnya setelah salah satu pucuk pimpinannya yang menjadi Komite Revolusioner di Cotabato, Amelil Malaguio, bersama-sama dengan beberapa komando militer lapangan membelot ke pemerintah. Pembelotan ini bukan hanya melemahkan kekuatan militer kelompok Hashim Salamat, tetapi juga makin melemahkan usaha diplomatisnya.

Sesudah jatuhnya Marcos, MILF mengadakan rally keliling Cotabato selama 3 hari dan menyerukan perundingan damai GRP-MILF agar segera dilaksanakan untuk mengimplementasikan Perjanjian Tripoli. Ini merupakan rally terbesar yang pernah diselenggarakan di Cotabato yang dihadiri sekitar 100.000 orang untuk menyedot perhatian pemerintah guna mencari penyelesaian masalah Mindanao.

Usaha-usaha dari OIC dan Dunia Islam untuk mempersatukan faksi-faksi dalam tubuh MNLF (Misuari, Hashim Salamat, dan Pundato) dalam Fron Pembebasan Moro Bersatu, namun gagal. Dengan tak adanya kelompok panel yang mempersatukan ketiganya, pemerintah Aquino akhirnya memilih Nur Misuari sebagai wakil Bangsa Moro. Selama masa Aquino, pemerintah lebih terkonsentrasi pada perundingan dengan MNLF (Nur Misuari), dan terfokus pada usaha-usaha mendirikan ARMM meskipun MNLF dan MILF sendiri keberatan. Akibatnya perundingan antara GRP dan MILF sendiri di masa Aquino terabaikan. Sebagai protes karena tidak dilibatkan dalam perundingan, MILF melancarkan serangan militer tahun 1987. Untuk menenangkan MILF, Aquino kemudian mengadakan pembicaraan dengan Al Haj Murad (Wakil kepala urusan Militer) dan Iqbal di kota Cotabato.

Sementara itu, MILF terus memperkuat pembangunan angkatan perang dan persenjataannya, termasuk daerah yang menjadi kubu perkemahan militernya. Camp Abu Bakar adalah salah satu perkemahan permanen yang terbesar. Ini menjadi kubu pertahanan yang dikelilingi oleh kompleks perkampungan komunitas Muslim yang relatif besar, dan

karenanya sulit diserang oleh militer Filipina.

Di bulan Desember 1990, delegasi MILF menginginkan untuk diundang dalam pertemuan puncak OIC di Dakar, Senegal. Pada pertemuan ini OIC mengeluarkan resolusi yang meminta pemerintah Filipina untuk memulai perundingan dengan MNLF dan MILF. Untuk pertama kalinya OIC menyebut MILF sebagai bagian dalam resolusinya.

Di masa Ramos, dia memulai perundingan dengan MILF 4 tahun setelah dia mengadakan perundingan terbuka dengan MNLF, dan dua tahun sebelum masa jabatan kepresidenannya berakhir. Dalam masa ini MILF telah berubah menjadi kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Moro, dan menginginkan negara Islam merdeka sebagai prasyarat bagi penyempurnaan ketaatan atau ibadah Muslim kepada Allah, dan sebagai satu-satunya cara untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat Moro di dunia ini dan di akherat kelak. Perjuangan ini berbeda dengan MNLF yang menerima otonomi dalam konteks kesatuan wilayah Filipina.

Perundingan antara GRP dan MILF di masa Ramos hanya sampai pada tahap eksplorasi saja, yakni saling menjajagi kepentingan dan tuntutan masing-masing. Di bulan Juli 1987 ditindak lanjuti dengan persetujuan gencatan senjata diantara kedua belah pihak. Dalam perjanjian ini MILF menyetujui gencatan senjata dengan syarat GRP harus mengakui 46 perkemahan militer yang dimiliki oleh MILF - 13 merupakan perkemahan utama, dan 33 lainnya perkemahan tambahan. Pengakuan ini dimaksudkan agar pasukan pemerintah tidak menyerang atau memasuki kubu perkemahan ini. MILF menilai bahwa pengakuan area perkemahan militer MILF ini akan mencegah terjadinya konflik antara AFP dengan MILF. Semula GRP menolak tuntutan ini, namun pada akhirnya GRP mau mengakui perkemahan militer MILF setelah melihat luasnya yang tak seberapa, hanya meliputi beberapa kilometer. Namun MILF mengklaim bahwa perkemahan yang dikuasainya mencakup area yang lebih luas. Misalnya Perkemahan Abu Bakar memiliki luas 1.198 kilometer persegi – sama dengan ukuran satu provinsi terkecil. Pembuktian dan pengakuan atas perkemahan-perkemahan MILF berjalan. Dalam proses pembuktian ini terjadi silang pendapat antar keduanya mengenai luas wilayah dari camp-camp yang diklaim sebagai basis dukungan Hashim Salamat.

Meskipun karakteristik luas dan bentuk wilayah perkemahan MILF ini masih dalam perdebatan, pengakuan di atas menunjukkan kemenangan MILF atas klaim teritorialnya. Ini berarti GRP mengakui eksistensi MILF sebagai organisasi politik dan klaim sebagian

wilayah Moro di Mindanao. Akhirnya GRP menyadari bahwa pengakuannya atas perkemahan tersebut merupakan kesalahan (*blunder*) baginya. Untuk memperbaiki kesalahannya, pemerintah menyerang daerah-daerah perkemahan tersebut. Dalam bulan Februari 2000 pasukan pemerintah menyerang daerah-daerah perkemahan MILF dengan menggunakan berbagai justifikasi. MILF mengadakan aksi serangan balik dengan menyerang garrison dari pemerintah Filipina dan menduduki sebuah kota di Lanao del Norte selama 10 hari di bulan Maret. Ini yang membuat Estrada pada akhirnya meenytakan perang total (*all-out-war*) terhadap MILF.

Sementara itu serangkaian aksi penculikan dengan tuntutan sejumlah tebusan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Basilan, Sulu, dan sekitar Sabah telah memicu sentimen anti-Muslim dan kebencian terhadap pemberontak Moro secara umum. Pada akhirnya pasukan pemerintah berhasil menghancurkan kam-kam MILF dan menaikkan bendera Filipina di setiap kam yang berhasil didudukinya. Kemah Abu Bakar, yang menjadi markas besarnya jatuh ke tangan pasukan pemerintah pada Juli 2000. Disini pasukan MILF tak sanggup melawan serangan udara dan darat dari AFP yang bertubi-tubi.

All-out-war telah mengundang perhatian internasional, khususnya OIC, yang merepresentasikan dunia Islam (komunitas Islam internasional). Dengan melakukan all-out war, GRP mengundang resiko yang selalu ingin dihindarinya, yakni internasionalisasi konflik antara GRP-MILF. *All out war* yang dicanangkan Estrada mengawali langkah-langkah diplomasi baru bagi MILF untuk mengangkat isu Moro, dan penyelesaian konflik MILF-GRP ke forum internasional. Dalam forum inilah MILF berusaha mengangkat cita-cita sebuah negara Islam yang berdaulat bagi Muslim Moro. Kalau sebelumnya MILF menggunakan serangan bersenjata, dan menaggung kekalahan melawan pasukan pemerintah, dalam forum OIC, MILF mulai melancarkan serangan-serangan diplomatiknya. Bila dalam perundingan-perundingan sebelumnya, MILF “ditinggalkan”, lantaran pada waktu itu yang lebih diakui sebagai wakil bangsa Moro hanya MNLF (Nur Misuari), kini MILF berdiri sejajar dengan MNLF. Dalam konferensi OIC di Kuala Lumpur pada Juni 2000, OIC melibatkan tiga kekuatan dalam satu panel: GRP, MNLF, dan MILF. Disini OIC tidak lagi hanya mengakui MNLF sebagai satu-satunya Bangsa Moro. Perundingan makin bertambah kompleks, karena kedua kelompok ini mengajukan tuntutan yang berbeda: anatar otonomi regional (dalam kerangka kedaulatan dan integritas teritorial Filipina) sesuai Perjanjian Tripoli 1976 bagi MNLF dan Pembentukan Negara

Islam Moro merdeka yang berdaulat bagi MILF.

Di masa pemerintahan Presiden Arroyo, pengganti Estrada, belum terjalin perundingan lebih jauh antara GRP-MILF. Arroyo bahkan menentukan persyaratan bahwa GRP hanya mau berunding dengan Hashim Salamat bila tentara MILF meletakkan senjata. Di lain pihak Arroyo juga masih memberlakukan surat penangkapan bagi Hashim Salamat sampai sekarang.

Pemerintah untuk menangkap Salamat ini didasari tuduhan bahwa MILF telah melakukan: pembunuhan dan serentetan aksi bom, seperti yang terjadi di bandara Cotabato bulan Juli yang lalu. Meskipun ini disangkal keras oleh Hashim Salamat, GRP tidak merubah tuntutananya atas MILF. Dalam kasus masih diberlakukannya perintah penangkapan atas Salamat, salah seorang aktivis mahasiswa UP (University of Philippine) yang berasal dari ethnic Maranao mengomentari bahwa ini menjadi kendala utama bagi negosiasi antara GRP-MILF, sebagaimana dituturkannya:

“the government is not really sincere with the negotiation. If they are serious they should leave the warrant. How Salamat goes to the negotiating table if there is still a price upon his head. MILF is afraid that their leader will be arrested. In order not to be arrested, there should be a third party that would intermediate the dialogue. Malaysia and Indonesia are active as third parties entering peace dialogue with the government (pemerintah tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan negosiasi. Jika pemerintah serius, mereka tentunya akan mencabut perintah penangkapan atas Hashim Salamat. Bagaimana Salamat akan bernegosiasi, bila pemerintah menawarkan hadiah untuk penangkapannya. Untuk menghindari penangkapan, haruslah ada pihak ketiga yang menjadi penengah dalam negosiasi. Malaysia dan Indonesia merupakan dua negara yang aktif dalam menengahi dialog perdamaian dengan pemerintah).

Tanpa menghentikan berlakunya perintah penangkapan atas Hashim Salamat, perundingan jelas sulit dilakukan. MILF tidak menghendaki pemimpinnya akan mengalami nasib yang sama, sebagaimana halnya Nur Misuari yang ditangkap di Sabah, Malaysia tahun 2001, dan sampai kini mendekam di salah satu penjara di Manila. Jalan satu-satunya untuk menghindari kebuntuan perundingan adalah dengan mengundang pihak ketiga untuk

menengahi atau menjadi mediator perundingan damai. Sebagaimana yang diusulkan oleh interviewee di atas, yakni dengan melibatkan peranan Malaysia yang selama ini memang aktif sebagai mediator perundingan. Demikian pula halnya aksi-aksi teror yang gencar dilakukan oleh Abu Sayyaf yang membuat US State Department mencapnya sebagai kelompok ekstrimis Islam. Pemerintah Arroyo pun menganggap kelompok ini sebagai *banditry*, dan menolak mereka untuk berunding karena kriminalitas dan aksi-aksi teror yang mereka lancarkan.

Pemerintah dan angkatan bersenjata Filipina memiliki justifikasi untuk memasukkan penyelesaian separatisme di dalam kerangka perang melawan terorisme terutama bila mengingat Abu Sayyaf – yang merupakan faksi dari MNLF – memang sangat gencar melakukan aksi-aksi teror seperti: pengeboman, penculikan, dan pembunuhan. Abu Sayyaf juga dituduh memiliki jaringan dengan Al-Qaeda. Dengan memasukkan penyelesaian separatisme di dalam konteks perang melawan terorisme berarti GRP dan AFP mendukung kebijakan global Amerika. Mereka sangat diuntungkan dengan agenda ini lantaran berbagai *joint military project* dan bantuan finansial mengalir terus guna memerangi terorisme (separatisme).

Sampai saat ini belum ada keputusan final dari pemerintah Arroyo sendiri mengenai tindak lanjut perundingan MILF-GRP. Akibatnya masalah Mindanao tetap terkatung-katung, belum ada penyelesaian tuntas. Bentrok bersenjata antara AFP dan pasukan MILF maupun Abu Sayyaf adakalanya masih berlangsung secara sporadis.

IV.6. Kesimpulan

Perjanjian damai yang pernah terbentuk antara GRP dengan MNLF sangat didukung oleh peranan dari lembaga internasional, yakni OIC sebagai suatu lembaga yang merepresentasikan kepentingan komunitas Islam internasional. Sebagai penengah OIC sudah membantu organisasi perlawanan Moro untuk menyelesaikan konfliknya dengan Pemerintah Filipina sejak 1972. Usaha mediasi OIC ini membuahkan dua bentuk perjanjian: Tripoli Agreement yang ditandatangani 1976, dan Peace Agreement 1996. Dalam kenyataannya tidak sepenuhnya isi perjanjian ditaati. Pelaksanaannya sangat bergantung pada sikap penguasa. Di masa Marcos otonomi harus dijalankan melalui plebisit (referendum). Setelah diadakan referendum, ternyata hanya 10 propinsi (dari 13 propinsi dan 9 kota yang ditetapkan dalam Perjanjian Tripoli) yang menerima otonomi. Marcos

membagi (mengelompokkan) lagi 10 propinsi ini kedalam dua wilayah terpisah: wilayah ke-9 dan ke-12. Sedang di masa Aquino hanya menyetujui 4 provinsi saja untuk dimasukkan dalam Autonomous Region for Muslim Mindanao sesuai hasil referendum. Kedua belah pihak tidak menyetujui mengenai detail dari otonomi dan basis teritori yang hendak dijadikan sebagai landasan otonomi. Disinilah konflik antar GRP-MNLF berlangsung, karena apa yang diimplementasikan pemerintah berbeda dengan semangat perjanjian Tripoli itu sendiri

Peace Agreement 1996 antara GRP-MNLF di masa Ramos, sebenarnya merupakan pelaksanaan final dari Perjanjian Tripoli. Disini pelaksanaan otonomi mencakup semua provinsi yang tercakup dalam perjanjian Tripoli. Namun dalam kenyataannya otonomi tidak berjalan juga mengingat ketiga lembaga yang dipercayai untuk melaksanakan otonomi regional: Dewan Eksekutif dari SPCPD, Dewan penasehat sebagai Badan Legislatif, dan Sekretariat tidak memiliki otoritas kekuasaan maupun keuangan untuk mengatur pengalokasian dana guna menjalankan program-program pembangunan di masing-masing propinsi tersebut. Segalanya masih diatur dan dikontrol pemerintah Pusat melalui NEDA (National Economic Development Authority). Detail pelaksanaan Peace Agreement 1996 ternyata juga tak sesuai juga dengan cita-cita Nur Misuari, dan Bangsa Moro umumnya.

Hal-hal di atas membuktikan bahwa tiap-tiap rezim pemerintahan melaksanakan otonomi yang dihasilkan dari Perjanjian Tripoli 1976 dan Perjanjian Damai 1996 yang berbeda sebagai penyelesaian konflik GRP dan kelompok sepearatis. Mereka menterjemahkan otonomi dalam nuansa politik yang berbeda-beda, yang hasilnya tidak memuaskan kelompok separatis, terlebih-lebih masyarakat Moro secara umum. Manifestasi dari perjanjian damai dan pelaksanaan otonomi yang tidak sungguh-sungguh inilah yang menjadi sumber perpecahan di kalangan elit-elit pemberontak Moro yang tergabung dalam MNLF, dan melahirkan kelompok-kelompok separatisme baru, seperti MILF, dan Abu Sayyaf.

Marcos melaksanakan Perjanjian Tripoli melalui plebisit (referendum) yang menghasilkan 10 provinsi yang kemudian terbagi ke dalam dua wilayah otonomi (wilayah 9 dan 12). Plebisit yang dilakukan Aquino berkurang lagi menjadi 4 propinsi sebagai bagian dari ARMM (Autonomous Region for Muslim Mindanao). Ramos meneruskan ARMM dengan melantik Nur Misuari sebagai gubernur dan pelaksana SPCPD dan ZOPAD. Namun kelompok separatis lain (MILF) menganggap ARMM dan pengangkatan Nur Misuari

menjadi gubernur ARMM sebagai kooptasi dari perjuangan Bangsa Moro, tidak mendukung aspirasi keIslaman Moro, serta gagal menciptakan peningkatan kesejahteraan bagi Bangsa Moro secara umum. Di masa Estrada, kekerasan berkembang lagi dengan dilancarkannya all-out-war terhadap MILF pimpinan Hashim Salamat – yang merupakan pecahan MNLF. All-out-war mengundang kecaman dari OIC, dan makin memperumit masalah. Setidaknya GRP kini bukan hanya berhadapan dengan MNLF tetapi juga faksi lain dalam MNLF, yakni MILF dalam internasionalsiasi konflik ini.

Di masa kepresidenan Arroyo konflik Mindanao semakin bertambah kompleks lagi dan penyelesaiannya makin menjadi tidak mudah. Ini bukan hanya dikarenakan kelompok separatisme sudah berkembang menjadi 3 (MNLF, MILF, dan Abu Sayyaf), tetapi juga sehubungan dengan tuduhan-tuduhan yang dilancarkan Arroyo yang didukung Amerika. Bahwa MILF berada di balik aksi-aksi terorisme, seperti serentetan aksi pengeboman dan pembunuhan yang terjadi di Cotabato. Gloria Macapagal Arroyo pun secara terang-terangan menyatakan tidak mau berunding dengan MILF kecuali mereka menyerahkan senjata. Dia juga tetap memberlakukan surat penangkapan atas Hashim Salamat berdasarkan tuduhan-tuduhan di atas. Sikap ini makin mempersulit negosiasi, sehingga penyelesaian Moro sampai detik ini masih terkatung-katung.

Keengganan pemerintah Arroyo yang sekarang untuk mencari penyelesaian damai juga dihambat oleh serangkaian tuduhannya bahwa kelompok Abu Sayyaf berada di balik rangkaian aksi-aksi teror. Beberapa pengamat memberikan dugaan bahwa keengganan Arroyo untuk tidak segera menyelesaikan konflik di Mindanao karena tekanan dari militer Filipina. Dengan banyaknya aksi teror yang dilakukan khususnya oleh kelompok separatisme garis keras, seperti Abu Sayyaf, yang sebetulnya juga merupakan faksi MNLF, pemerintah Filipina memiliki justifikasi untuk menyelesaikan separatisme di dalam agenda perang melawan terorisme. Meski di satu sisi GRP dan AFP banyak diuntungkan dengan mengalirnya bantuan dari Amerika guna memerangi terorisme, di sisi lain kenyataan ini makin mengundang intervensi militer Amerika dan makin sulit mencapai perdamaian di Mindanao.

Permasalahan makin bertambah kompleks dengan hadirnya Amerika. Intervensi militer Amerika di Basilan justru dapat meningkatkan militansi dan radikalisme Moro. Amerika telah menggoreskan sejarah hitam di masa kolonisasi, seperti perang di Jolo yang menelan sampai 500 jiwa Muslim di Mindanao, dan pendirian pangkalan militer Amerika (*Clark and Subic bays*) di masa pasca kemerdekaan Filipina yang sudah berakhir lebih dari satu

dasawarsa yang lalu. Kehadiran Amerika dapat mempertebal *image* tentang *the American's neo-colonialism or imperialism* (hadirnya kembali kolonialisme dan imperialisme Amerika di Filipina).

Harapan tampaknya disandarkan pada Malaysia dan Indonesia untuk dapat menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik GRP dengan kelompok pemberontak Moro. Ini mengingat di samping keduanya adalah anggota aktif OIC, Malaysia dan Indonesia adalah tetangga terdekat Filipina dan sesama anggota ASEAN yang terikat perjanjian untuk membangun dan mempertahankan kerjasama ekonomi, politik, serta memelihara kestabilan dan keamanan regional di kawasan ASEAN.

**Perjanjian Damai 1996 yang ditandatangani oleh
Presiden Fidel V. Ramos dan Nur Misuari (Pimpinan MNLF)**



BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Oleh

Erni Budiwanti dan Cahyo Pamungkas

Negara bangsa Filipina di bangun atas dasar pluralitas etnik, agama, bahasa, dan inkorporasi secara paksa kedaulatan Bangsa Moro ke dalam Filipina. Pluralisme negara bangsa Filipina juga tercermin dari *multi religious ideologies* dari masyarakatnya sendiri, yakni Islam, Kristianiti, Komunisme, dan animisme. Perlu diketahui, di samping Kristen dan Muslim, terdapat golongan non Kristen dan Non Islam yang disebut *Lumad*. *Lumad* adalah kelompok etnik yang masih mempraktekkan agama dan budaya nenek-moyang yang berpusat pada pemujaan roh leluhur (*animist*). Mereka sebagian tinggal di Mindanao, sebagaian di Utara Filipina.

Perkembangan *nation state* Filipina yang didirikan atas dasar pluralisme dan penyatuan Muslim Moro ke dalam teritori Filipina masih merupakan sesuatu yang *politically and heavily contested*. Sepanjang lintasan sejarah banyak ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam memelihara apa yang disebut Ben Anderson "imagined the Phillipines communities". Di samping masalah pemberontakan regional di Mindanao, Filipina juga menghadapi pemberontakan komunis.

Sejarah kolonisasi, penyatuan paksa kelompok Muslim ke dalam bagian integral Filipina, justru menciptakan masalah bagi pembentukan nation-state Filipina yang solid dan bersatu. Penyatuan paksa, melalui gelombang migrasi besar-besaran, yang kemudian diikuti dengan penjarahan tanah nenek moyang Moro untuk membentuk koloni-koloni Christian settlers, dan penjarahan aset-aset kekayaan alam Moro tanpa bagi hasil yang adil, dan pembunuhan massal menjadi pemicu gerakan pemisahan diri Moro dari Filipino.

Pemerintah belum melakukan redefinisi dan rekonstruksi identitas Muslim Moro sebagai Muslim Filipino yang setara dengan Katolik-Filipino. Selama ini Muslim Moro dipaksa hidup berdampingan (bersama) dengan Katolik Filipino dalam nuansa hidup yang sarat diwarnai dengan diskriminasi, dominasi, dan hegemoni mayoritas terhadap minoritas. Mereka dipaksa untuk hidup bersma dalam situasi yang penuh diliputi ketimpangan sosial, ekonomi, politik yang menyulut kebencian dan dendam membara. Deprivasi dan

marginalisasi atas sejumlah aset yang pernah diwariskan nenek moyang Moro tetap berlangsung sampai detik ini, bahkan diperburuk lagi dengan langkanya pemberian akses publik yang lebih besar kepada Bangsa Moro.

Kesadaran kolektif atas hak-hak mereka yang tertindas oleh mayoritas Katolik Filipino makin mengkristal dari waktu ke waktu. Kristalisasi kesadaran inilah yang mewujud dalam berbagai gerakan pembebasan Moro yang sulit dipatahkan. Meskipun sudah diadakan dua kali perjanjian damai yang membuahkan ARMM, termasuk mengkooptasi (*attraction policy*) sebagian pejuang-pejuang Moro dengan rekrutment ke dalam AFP dan kepolisian Filipina, kenyataannya tetap tidak dapat memuaskan Bangsa Moro, dan karenanya mereka tetap bergolak.

Di Filipina realitas sosial yang ada hanyalah pengakuan terhadap pluralisme (kebinekaan), tetapi belum mencapai tahapan multikulturalisme yang idealnya adalah memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dari manapun asal-usulnya untuk menikmati ruang publik (*public sphere*). Dilema minoritas tetap bertahan karena marginalisasi dan diskriminasi terhadap minoritas, dan dominasi mayoritas terhadap ruang publik tetap berlangsung sampai beberapa generasi. Pemerintah Filipina berusaha untuk menterjemahkan multikulturalisme dengan menciptakan ARMM bagi Muslim Moro, namun dalam kenyataannya tidak terlalu serius atau bersungguh-sungguh dalam pelaksanaannya. Dengan kata lain otonomi hanya merupakan sebuah konsep simbolis tanpa realisasi yang memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi Bangsa Moro untuk menjemput ruang publik dalam bentuk membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan publik yang menjamin kepentingan bersama mereka. Segalanya masih diatur dan dikendalikan oleh Pusat (Manila) melalui NEPD (National Economic Policy Development) - suatu badan yang berperan seperti Bappenas. Konsep ARMM yang diikuti dengan pembentukan SCPD dan SZPD tidak berhasil meningkatkan kesejahteraan Muslim Moro. Kedua lembaga ini terbukti tidak cukup efektif dalam menyelesaikan jurang ekonomi yang diwarnai jurang perbedaan pemilikan tanah dan aset-aset industri moderen yang dikembangkan di dalamnya yang lebih banyak dinikmati oleh Christian settlers selama lebih dari 5 generasi.

Kami akhiri pembahasan ini dengan mengutip kembali pendapat Ted Gurr: bahwa “tingginya intensitas dari pelanggaran hak-hak politik, kultural, dan ekonomi yang dilakukan negara terhadap kelompok minoritas lebih merupakan faktor yang

mengakumulasi resistensi dan dorongan separatisme bagi kelompok minoritas. Sebuah gerakan separatis akan menjadi agresif dan ofensif apabila rasa tertindas dan terpojokkan dari hak-hak yang semestinya dapat mereka nikmati semakin besar”.

Rekomendasi

Persoalan separatisme yang berkembang di kalangan Bangsa Moro, Filipina Selatan, mengingatkan kita pada separatisme yang berkembang di Indonesia sendiri, seperti yang terjadi di Aceh dan Papua. Hal yang dapat dipetik sebagai pelajaran yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dari kasus Moro terutama adalah mengenai kebijakan-kebijakan resolusi konflik untuk mengatasi masalah separatisme, dan rekonstruksi makna kebangsaan untuk memperkuat integrasi nasional.

Penggunaan kekerasan untuk mengatasi separatisme akan melahirkan generasi yang penuh dendam. Ketidakadilan, pembunuhan massal (genocide), yang dilakukan khususnya di masa UU darurat militer semasa Marcos, penancangan all-out-war di massa Estrada, tentu menggoreskan luka yang mendalam. Luka hati meski dapat disembuhkan, tetap akan meninggalkan kenangan pahit dan kepedihan (*collective memory*) yang sulit dihapuskan terutama di kalangan mereka yang menjadi korban baik langsung atau tidak langsung atas aksi-aksi pemerintah terhadap Bangsa Moro. Kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Hal ini menandai serentetan *reprisal actions* (*retaliation*) yang selalu berkesinambungan atau berlangsung turun temurun di antara kedua belah pihak yang bertikai. Tidaklah mengherankan separatisme Moro merupakan gerakan yang paling lama bertahan di Asia. *Collective memory* yang sulit dihapuskan inilah yang menjadi sumber militansi, radikalisme, dan senantiasa menyalakan semangat perlawanan Moro yang secara konstan bergaung dari satu generasi ke generasi berikutnya, tak ubahnya Aceh dan Papua. Meskipun satu generasi perlawanan separatist dapat dilumpuhkan, akan bangkit kembali gerakan separatis Moro dari generasi berikutnya guna mewujudkan kemerdekaan Moro. Kemerdekaan Moro sebagai perjuangan lintas generasi, dengan demikian menandai proses *revitalization of collective memory*.

Melihat kasus Moro ini, pemerintah Indonesia direkomendasikan untuk menggeser pendekatan keamanan (kekerasan) dalam resolusi konflik di Aceh dan Papua ke pendekatan yang lebih menekankan dialog, rekonsiliasi, kompromi, dan negosiasi yang membuahkan consensus dan agreement. Dialog disini tidak diartikan sebagai alat untuk memaksakan

gerakan separatis untuk “menyerah” tetapi sebagai alat untuk saling menjajagi dan memahami tujuan-tujuan yang saling bertentangan dari masing-masing pihak yang bertikai. Dialog tidak dilakukan di bawah tekanan senjata, sebagaimana pada kasus Aceh, tetapi idealnya berlangsung dalam suasana yang lebih demokratis, yang bebas tekanan, ancaman, dan rasa takut. Pemerintah Indonesia semestinya bisa membedakan antara gerakan separatist yang memperjuangkan “keadilan” dengan gerakan kriminal. Pihak keamanan RI seyogyanya tidak menerapkan terminologi-terminologi yang bermakna *dubious* dan berfungsi *labeling* yang makin membuat runyam situasi alias memperbesar masalah, seperti tindakan kriminal murni, aksi teror. Pendekatan keamanan lebih patut ditujukan kelompok kriminal

Dialog hendaknya dilakukan dengan melibatkan peranan pihak ketiga sebagai mediator untuk menengahi pihak-pihak yang bertikai. Peran mediator inilah yang sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti stake holders di samping pemerintah, negara tetangga, dan organisasi internasional lainnya. Sebagaimana yang pernah dilakukan pemerintah Filipina, di samping melibatkan OKI, juga Indonesia dan Malaysia dalam Perjanjian Damai 1996. Pemerintah bisa pula memanfaatkan *local wisdom*, dengan mengaktifkan kembali peran dari para pemimpin tradisional, maupun keagamaan yang menjadi pilar-pilar penting dalam sistem kemasyarakatan, di samping kepemimpinan formal.

Mengenai rekonstruksi makna kebangsaan dari kasus Bangsa Moro kita bisa mengambil hikmah bahwa wacana kebangsaan tidak diterjemahkan sebagai sesuatu yang direkonstruksikan dari luar tetapi sebagai sebuah refleksi dari semua komponen bangsa. Dalam proses refleksi diri tersebut semua suku bangsa harus diberi kesempatan untuk memaknai apa yang disebut sebagai bangsa. Dalam konteks Indonesia, makna kebangsaan hendaknya bukan sekedar diterjemahkan dalam penghargaan dan pengakuan terhadap kebhinekaan. Lebih jauh lagi pengakuan ini idealnya juga ditindak lanjuti dengan pembukaan ruang (akses) yang sama kepada suku-suku bangsa untuk hidup dan berkembang dalam kerangka kebangsaan.

Pemberian otonomi khusus kepada Aceh dan Papua untuk mengembangkan potensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya sehingga masyarakat di kedua provinsi ini dapat menjadi tuan di negerinya sendiri hendaknya benar-benar dimanifestasikan dalam perilaku nyata. Hal ini untuk memperbaiki kesan dan pandangan masyarakat bahwa otonomi bukanlah sekedar wacana simbolik yang sarat dengan janji-janji kosong.

Bertolak dari pengalaman Filipina, dimana Presiden Arroyo kerap mengasosiasikan separatisme dengan terorisme. Pemerintah RI dihimbau tidak mengambil langkah yang sama. Pemerintah hendaknya tidak menyelesaikan separatisme dalam agenda perang total melawan terorisme. Pemerintah RI juga diharapkan menolak intervensi asing dalam perang melawan terorisme dalam konteks nasional. Kebijakan penanganan terorisme semestinya diarahkan secara terbatas dan proporsional pada kelompok –kelompok yang mengutamakan dan mendahulukan tindak kekerasan, sehingga tidak mematikan pembangunan demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, Nuaim. 2000. *Independent Bangsamoro State*, book 1, Agency for Youth Affairs of MILF.
- Adriana, Elisabeth 2002. *Politik Luar Negeri Filipina Terhadap Asean*, Seminar Intern P2P LIPI, 15 Oktober.
- Alim, Guiamel, M. 1995. *The Bangsamoro Struggle for Self-Determination*. European Solidarity Conference on the Philippines *Philippine Solidarity 2000: In Search of New Perspectives*. Hoisdorf, Germany, 23-25 Juni.
- Amboy, Ric.*, 2001. "What a Filipina should be!", dalam http://www.pinay.com/cgi-bin/forum_features.cgi?read=28.
- Bentley, G. Carter. 1986. "Indigenous States of Southeast Asia." *Annual Review of Anthropology* 15: 275-305.
- Bertrand, Jacques. 2000. "Peace and Conflict in the Southern Philippines: Why the 1996 Peace Agreement is Fragile", dalam *Pacific Affairs*, Vol.73 No.1. Columbia: University of British Columbia.
- Blair, E.H. & J.A. Robertson (eds).1903-19. *The Philippine Islands*, 1493-1898.55 vols. Cleveland: A.H. Clark.
- Bonner, Raymond. 1987. *Waltzing with a Dictator: The Marcoses and the Making of American Policy*. New York: Times Books.
- Budihardjo, Eko. 2002. "Menangkal Kecenderungan Primordialisme", Kompas, 19 Juli.
- Bureau of Census and Stastitics. 1965. *Facts and Figures about the Philippines 1963*. Manila: Bureau of Census and Statistics, Republic of the Philippines.
- Burley, T.M. 1973. *The Philippines: An Economic and Social Geograpy*. London: G. Bell and Sons.
- Chapman, William. 1987. *Inside the Philippine Revolution*. New York: W.W. Norton.
- Clavel, Leothiny. 1969. *They Are Also Filipinos: Ten Years with the Cultural Minorities*. Manila: Bureau of Printing.
- Combes, Francisco. S.J. 1903-19-. "The Natives of the Southern Islands." In *The Philippine Islands, 1493-1898*. E.H. Blair and J. A. Robertson (eds). 55 vols. Cleveland: A.H. Clark.
- Costantino, Renato. 1975. *The Philippines: A Past Revisited*. Manila: by the author.
- Damaso Elena Jaoquin. 1983. "Magindanon Datuship." In *Filipino Muslims: Their Social Institutions and Cultural Achievements*. F. Landa Jocano (ed.). Quezon City: Asian Center, University of the Philippines.

- De la Costa, Horacio S. J. 1961. *The Jesuits in the Philippines, 1581-1768*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dictionary of Sociology. 1991. New York: Harper.
- Drakulic, Slavenka. 1993. *The Balkan Express: Fragments from the Other Side of War*. New York: W.W. Norton
- Ellen, Roy F. 1983. "Social Theory, Ethnography, and the Understanding of Practical Islam in South-East Asia." In *Islam in South-East Asia*. M.B. Hooker (ed.). Leiden: E.J. Brill.
- Fay, Brian. 1996. *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell.
- Filler, Alfredo. Juli 1995. "Muslim Militancy: A New Threat to Security and Stability, a philippine viewpoint," paper yang tidak diterbitkan untuk Angkatan Bersenjata Filipina .
- Forbes, W. Cameron. 1928. *The Philippine Islands*. 2 Vols. Boston: Houghton-Mifflin.
- Foster, Robert J. 1991. Making National Cultures in the Global Ecumene." *Annual Review of Anthropology*.
- Fox, Richard G. 1990. "Introduction to Nationalist Ideologies and the Production of National Cultures." Richard G. Fox (ed.). *American Ethnological Society Monograph Series. No 2*. Washinton D.C: American Anthropological Association.
- Garsman, John. 2001. *Moros in The Philippines*, dalam www.c-r.org/acc_mon
- Gayo, Iwan. 1991. *Motto Latin*. Jakarta: Upaya Warga Negara.
- George, T.J.S. 1980. *Revolt in Mindanano: The Rise of Islam in Philippine Politics*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Glang, Alunan C.O. 1969. *Muslim Secession or Integration?* Quezon City: Alunan Glang.
- Gowing, Peter G. 1979. *Muslim Filipinos: Heritage and Horizon*. Quezon City: New Day Publisher.
- . 1983. *Mandate in Moroland: the American Government of Muslim Filipinos 1899-1920*. Quezon City: New Day Publishers.
- . April 1988. "The Moro Struggle in the Philippines." *Third World Quarterly*. Vol 10, No 2.
- Gurr, Ted Robert. 1993. *Minorities at Risk: A Global View of Ethno Political Conflicts*. Washington D.C.: United States Institute of Peace.

- Hashim, Shalamat. 2001. *The Bangsamoro People's Struggle Against Oppression and Colonialisation*, Agency for Youth Affairs-MILF, Camp Abu Bakar Ass Shiduque, Mindanaw.
- Isidro, Antonio. 1968. *Muslim-Christian Integration at the Mindanao State University*. Marawi City: Mindanao State University, University Research Center.
- Islam, Syed Serajul. October 1997. "The Rohingyas in Myanmar and the Moros in the Philippines: A Comparative Analysis." *Intellectual Discourse*. Vol 5. No 1
- . 1998. "The Freedom Movement of the "Moros" in the the Philippines: Recent Developments". *Asian Culture Quarterly*. Taipei, Republic of China: Asian-Pacific Cultural Center.
- Kadir W, Che Man. 1990. *Muslim Separatism: the Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand*. Singapore and New York: Oxford University Press.
- Larousse, William. 2001. *Walking Together Seeking Peace. The Local Church of Mindanao-Sulu Journeying in Dialogue with the Muslim Community (1965-2000)*. Quezon City: Claretian Publication Inc.
- Lopez, Salvador P. 1989. "The Foreign Policy of The Republic of The Philipinas", dalam Michael Leifer, *ASEAN and The Security of South East Asia*, London: Routledge
- Magdalena, Federico V. 1997. "The Peace Process in Mindanao: Problems and Prospects." *Southeast Asian Affairs*. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies.
- Majul, Cesar Adib. 1973. *Muslims in the Philippines*. Quezon City: University of the Philippines Press.
- . 1985. *The Contemporary Muslim Movement in the Philippines*. Berkeley: Mizan Press.
- . April 1988. "The Moro Struggle in the Philippines." *Third World Quarterly*. Vol 10, No 2.
- . 1989. *Dinamika Islam Filipina*, terj. Eddy Zainury, Jakarta: LP3ES.
- Makol-Abdul, Pute Rahima. October 1997. "Colonialism and Change: The Case of the Muslims in the Philippines, *Journal of Muslim Minority Affairs*. Vol 17, No 2.
- May, R. J. 1987. "The Philippines Under Aquino: A Perspective From Mindanao". *Journal/Institute of Muslims Affairs*. Vol 8. No 2.
- . 1990. "Ethnic Separatism in Southeast Asia". *Pacific Viewpoint*. Vol 31.
- . July 1991. "The Religious Factor in Three Minority Movements: The Moro of the Philippines, the Malays of Thailand and Indonesia's West Papuans". *Journal Institute of Muslim Minority Affairs*. Vol 12.

- Mc Amis, Robert D.. 1974. "Muslim Filipinos." In G. Gowing & Robert D. McAmis (ed.) *The Muslim Filipinos*. Manila: Solidaridad Publishing House.
- Mednick, Confer Melvin. 1965. *Encampment of the Lake: The Social Organization of the Moslem Philippine (Moro) People*. Chicago: University of Chicago.
- Mednick, Melvin. 1974. "Some Problems of Moro History and Political Organization", dalam Peter G. Gowing dan Robert D. McAmis, *The Muslim Filipinos. Their History, Society, and Contemporary Problems*.
- Molloy, Ivan. 1988. "The Decline of the Moro National Liberation Front in the Southern Philippines." *Journal of Contemporary Asia*. Vol 18. No 1.
- Nathan, Quimpo. 1999. "Dealing with The MILF and Abu Sayyaf". *Chronicle*, Volume 4 No.1-2, Quezon City: Center for Integrative and Developments Studies, University of Philippines.
- Noble, Lela G. Fall 1976. "The Moro National Liberation Front." *Pacific Affairs*. Vol XLIX. No 3.
- Noor, Farish A. October 1996. "Hopefully the End of a Long Crusade". *Impact International*.
- O'Shaughnessy, Thomas J. 1964. "Islamic Law and Non-Mulsim Governments." *Philippine Studies*. No 12.
- Peralta, Jesus T. 2000. *Glimpses Peoples of the Philippines*. Manila: National Commission for Culture and the Art.
- Pute Rahima Makol-Abdul. October 1997. "Colonialism and Change: The Case of the Muslims in the Philippines," *Journal of Muslim Minority Affairs*. Vol 17, No 2.
- Pye, Lucian W. 1985. *Asian Power and Politics*, Cambridge: Harvard University Press.
- Rahman, Ahmad A. October 1996. "On the Way to Peace". *Impact International*.
- Reed, Ishmed (ed.) 1997. *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace*. Pinguin.
- Sjahrir. 22 Maret 2002. "Politik Akal Sehat Memasuki Tahun *Purgatorio*". Pidato Politik Ketua Perhimpunan Indonesia Baru Ulang Tahun I Perhimpunan Indonesia Baru, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, *M menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Dalam www.scripps.ohiou.edu/news/cmddd/#_ftn.
- Suyanto. 2002. "Pentingnya Program Pendidikan Antikekerasan" dalam *KOMPAS*, 14 November.
- Tan, Samuel K. 1977. *The Muslim Armed Struggle in the Philippine, 1900-1972*. Makati: Filipinas Foundation, Inc.

- . 1989. *Decolonization and Filipino Muslim Identity*. Diliman, Quezon City: Department of History, University of the Philippines.
- . 1993. *Internationalization of the Bangsamoro Struggle*. Quezon City: The University of the Philippines Press and Center for Integrative and Development Studies, U.P.
- . 1995. "Islam and Christianity in the Philippines", dalam *Mindanao Studies Report No.3*. Diliman City: The University of the Philippines Press and Center for Integrative and Development Studies, U.P.
- . 1995. "The Economic Dimension of Moro Secessionism", dalam *Mindanao Studies Report 1995/No. 1*. Manila: CIDS.
- Tan, Samuel K. dan Heidi K. Gloria. 2002. *Mindanao and Sulu: History, Peoples, and Institutions*. Southern Philippines Development Authority.
- Tanggol, Sukarno D. 1993. *Muslim Autonomy in the Philippines*. Marawi City: Mindano State University Press.
- Thomas, Confer Ralph B.. 1971. "Muslim but Filipino: The Integration of Philippine Muslims 1917-1946". Ph. D thesis. University of Pennsylvania.
- Timberman, David G.. February 1990. "The Philippines in 1989 A Good Year Turns Sour". *Asian Survey*, Vol 30, No 2.
- Villareal, Ismael. Maret 2000. "Ajourney Towards Lasting Peace," artikel diterbitkan oleh *The Philippine Graphic*.
- Watson, C.W. 2000. *Multiculturalism*, Buckingham-Philadelphia: Open University Press.
- "Peace in His Time". 1996. *Far Eastern Economic Review*. September 5.
- "UNIVERSAL DECLARATION ON THE HUMAN GENOME AND HUMAN RIGHTS", UNESCO, June 1992.
- www.asiasource.org.
- www.eecs.berkeley.edu/tito/philip.html
- www.student.gwhs.org
- www.ualberta.ca/vmitchel
- www.worldrover.com/history/philippines_history.html
- www.wikipwdia.org/wiki/history_of_the_philippines
- http://www.geocities.com/arham_s/fgu_arkib2000/gu20000603moro.htm
- <http://www.ukdw.ac.id/lpip/pspp/philbi.html>
- <http://www.geocities.com/PicketFence/3131/moro.htm>

EXECUTIVE SUMMARY

INTRODUCTION

The Philippines is a heterogeneous society, consisting of various ethno-linguistic groups. The total population figures in this country in 2000 shows that there are around 76,498,735 people who are divided into 151 ethno-linguistic groups. Language is one of the main criteria to mark an identity of an ethnic group, besides religion, custom, tradition, and other cultural elements. Based on the religious affiliations, the Philippines can generally be divided into the majority and the minority ethnic groups. The majority comprises of the Roman Catholic followers who, by their vernaculars, can be further divided into the Tagalog, Sugbuhanon (Cebuano), Hoko (Hocano), Hiligaynon (Hongo), Waray (Samar-Leyte), and Kampapangan (Pampango). They mostly live in northern island of Philippines i.e. Luzon.

The minority groups cover smaller ethnic groups, which can also divided further into religion, language, and cultural backgrounds. They are the Muslims, the Protestants, and the natives who belong to none of the above religious groupings, locally called the Lumads.

The dichotomy between the majority and minority in the Philippines, to some extent, is a product of long history of western colonization. During the Spanish colonization, started from 1521 until 1898, the Spanish missionaries had been so successful in converting a great number of people living in the lowland (north and central Philippines) into Roman Catholics. In 1898 the Spanish ceded the Philippines to America up to 1942. The Philippines were occupied by Japan for a short period of time (1942 up to 1945), which, after Japan was defeated in the Second World War, was returned and controlled under the American colonial rule. In 1946 Philippines gained their independence from America, and was ruled by President Manuel Roxas.

Those who were converted to Roman Catholics and absorbed the western culture are mostly Filipinos living in the northern island. They make up the majority of the Philippines. Smaller number of groups who maintain their religions and indigenous culture of origin, such as the Muslims and the *Lumads*, are the minorities.

Minority problem is ubiquitous. It always presents almost everywhere in this world. In Southeast Asian countries, like in the Philippines for instance, this problem occurs in line

with the migration policy set p by the American colonizers especially after they successfully gained full control over the southern Philippines region. Forced assimilation and integration of southern island (Mindanao and Sulu) into northern island of the Philippines to form a unified colonial territory, had brought together people with different language, religion, custom and tradition. This certainly had created political, economic, social, and cultural impacts.

Prior to Spanish and American colonization, the native Moro living in Mindanao and Sulu islands were independent communities ruled under the Muslim Sultanates. Spanish attempted to subjugate the sovereignty of the Sultanates located in those two islands, but failed to gain full control over them. When the American defeated the Spaniards, the former ceded all of their colonial territory to the former. In the Paris Treaty signed by both sides, the Spaniards handed over the Mindanao and Sulu, although they never gained control over this region, to the Americans. The Americans' expansion had successfully and forcefully incorporated them into the Philippines. However, subjugating Moro's heart and mind does not seem to be as easy as subjugating their land territory. The forced full inclusion of Moro's territorial land into northern Philippines during colonial rule had made people from Mindanao and Sulu became the minority in their own land. This was because the incorporation had encouraged the Christian Filipinos to migrate to the Moro's land on the south. Extensive migration was facilitated and legitimized by the provision of the Moro's native land. After sometime, the land confiscation had deprived the Moro from their own political, economic, social, and cultural resources.

After Americans controlled all over Mindanao, they declared that this territory was a public land and they started to encourage the Filipinos from Luzon and Visayas islands to migrate to Mindanao. The migration was followed by public land acts that enabled the Catholic Filipinos to possess the land of local inhabitants up to 24 acres, while the non-Catholics were only permitted to have not more than 10 acres. This was intended to assimilate the Moro into the Filipinos' culture. However, since the Filipino migrants outnumbered the Moro, after sometime, the migration had caused the marginalisation and deprivation of the Moro from their own native land. The Moro become the minority in their own land.

The history also marks that the incorporation of Mindanao has finally invited and created even greater problems, such as local rebellions and separatist movements, which up to now remains unsolved. It has had even escalated and turned into harsh military struggles

leading to open arm clashes between the AFP (Armed Forces of the Philippines) and those struggling for an independent Moro nation. Along the history of Spanish and American annexations up to the Philippines independence and post independence eras, the Moro remain to be restlessly and enthusiastically putting most of their energies for an independence over their territory claimed as belonging to their ancestral land.

The Muslim groups of Mindanao and Sulu have never been fully colonized by the Spaniards. This gives the reason why they have managed to maintain many of their traditional beliefs and practices, including the adherence to Islam and the existence of Sultanate and chieftainships. Although they, too, have succumbed to American colonialism just like their northern Filipino counterparts, the efforts to integrate them into the broader Philippines nation-state has not been completely successful.

This is the reason why there is persistence among some Muslim Filipinos to insist that they are not Filipinos but a separate "Moro nation" (*Bangsa Moro*) who claim to regain their sovereignty back.

Those living in Sulu and Mindanao islands identify themselves as the Moro. As their spirit of independence increases they tend to call themselves as *Bangsa Moro*¹. The identification of *Bangsa Moro* clearly symbolizes their main purpose for liberating themselves from the control and the rule of *Bangsa Filipino*. Even though the *Bangsa Moro* is also ethnically divided², it is magnified as an imagined (unified) community trying to liberate themselves from the Filipinos. The use of *Bangsa Moro* as collective name thus strengthens Smith's³ argument on the formation of ethnic consciousness through collective name and a shared feeling to claim specific territory i.e. the Moro land.

¹ In Malay word *bangsa* means nation.

² Bangsa Moro from Southern Philippines comprises 13 ethno linguistic groups. They are the *Tausug*, *Sama* (*Samal*), and *Bajao* living in Sulu (including Tawi-Tawi), coastal area Zamboanga, South Palawan, and Davao, *Jama Mapun* settling in Cagayan de Tawi-Tawi and South Palawan, *Palawanon* (*Palawani* and *Molbog*) residing in southern Palawan, *Yakan* in Basilan island, *Kalibugan* living in Zamboanga, *Marano* in the province of Marano, *Ilanun* (*Iranun*) living along the coastal area of Cotabato, Lanao del Sur, and Zamboanga del Sur, *Maguindanao* in Cotabato, *Sangil* in Southern Cotabato and Davao del Sur, and *Kalagan* in Davao. Recently the Moro have even spread further to other parts of the Philippines, including the Metro Manila.

³ Anthony D. Smith. 1981. *The Ethnic Revival*. New York: Cambridge University Press.

There are three main problems assumed underlying the spirit of independence among the Moro. The first one as mentioned above derives from the history of colonial expansion. The Moro never acknowledge external forces to gain control and rule over their territory. Giving up their territory to outsiders is interpreted as surrendering their own sovereignty and freedom to the outside power. Secondly, forced cultural and territorial integrations with the Philippines who are very different in terms of language, religion, and cultural habits, have set them apart and deprived themselves from their own natural, political, economic, and cultural resources. The Moro conceived the Filipinos as grabbing their ancestral land through the support of colonial policy. In Moro's understanding, this is viewed as violation of democracy and human rights.

Thirdly, many industrial projects built by the central government through a joint cooperation with both of domestic and foreign investors in Mindanao, such as agriculture, fishing, lodging, factories, and mining industries have benefited more to Filipinos migrants- as they are the main labor resources - rather than the local Moro. The local Moro get very little share in return, and most of them still depended their livings on subsistent agriculture.

The land grabbing and the low living standard of the Moro, added by the mass massacre in Jabidah in 1968, were some of the major reasons leading to the establishment of MIM-Mindanao Independent Movement. This group was organized by a Maranao *datu* (chief-tain). The group sent about ninety youths for military training in Sabah for armed warfare in the southern Philippines. From this group sprung the leaders of the Moro National Liberation Front (MNLF). The leadership of MNLF represents three major ethnic groups in Mindanao: the Maranao, the Maguindanao, and the Tausug. Led by youths, the MNLF finally repudiated traditional Islamic leaders. It pursued for the establishment of a Bangsa Moro Republic and organized the BMA (Bangsa Moro Army) launching military operations against the Philippines government. The establishment of BMA then marked the armed conflict and hostilities between the AFP and the MNLF during the period of 1974-1976. It caused thousands of people killed, injuries, and had to flee from their home villages.

With the support of the OIC (Organization of Islamic Conference), as the third party mediating the conflict, the GRP (Government of the Philippines) and the MNLF finally reach a peace agreement, marked by the signing of the Tripoli Agreement in 1976. The signing of Tripoli Agreement between the MNLF and the Philippines government marked

the peace negotiation and the end of the war. This agreement called for the establishment of an autonomous region for thirteen provinces in Mindanao, Sulu, and Palawan by the Philippines government. In exchange, the MNLF and the BMA agreed to surrender its arms. The Marcos government, however, reneged on its promise to give the Muslims a self-rule in Mindanao. Consequently, many of the MNLF fighters went back to conduct guerrilla warfare, but some of them also decided to live peacefully and thus surrendered their arms.

In 1991, the government of President Aquino conducted a plebiscite in Mindanao leading to the establishment of the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM). The plebiscite was conducted since Muslims were no longer the majority inhabitants of those provinces included in the Tripoli Agreement. The result of the plebiscite identifies that only 4 provinces agreed being incorporated in the ARMM. These are Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, and Lanao del Sur.

During the Ramos presidential time, he attempted to continue the peace dialogue with the MNLF after long cessation of negotiation due to disagreement upon the details of fulfilling the autonomy between Aquino government and the MNLF. The negotiation was marked by the signing of 1996 Peace Agreement, which was then followed by a cease-fire agreement between the Ramos administration and Nur Misuari as the chairman of the MNLF, and the establishment of SCPD (Southern Council for Peace and Development).

MNLF chairman, Nur Misuari, eventually became the Governor of ARMM. Some of the MNLF fighters have finally also been incorporated to the AFP and the Philippines government has undertaken financial projects for Muslim communities. Due to severe corruption, the SCPD - holding various development projects controlled by Nur Misuari and his circles - failed to satisfy both the local Moro as well as the central government.

There was also no continuation of peace process after Ramos. His successor - President Estrada -overturned it into a policy of all out war. Instead of continuing peaceful negotiation and reconciliation, Estrada preferred military operation to crush the separatist movements, either they were the MNLF or MILF. An effort toward peace and reconciliation in the negotiating table had been tampered during President Estrada whom preferred an all out war to crush the separatist movements. It later proves that military solution seems to be an ineffective solution. It even produces backlashes, as well as resilience and militancy

among the separatists. This is not to calculate the death tolls and casualties from both sides involved in the heavy gunfights, as well as from the civilians. It also increases military expenses that the Philippines government has to endure under severe economic condition. An all out war also creates various greater problems among those who have to run away from their home villages to seek refuge in safe places. The war forces them to live in refugee camps with poor sanitation, no jobs, and no education for their children. They all have to live in extremely low living standard, and have to endure less attention from the government. This is because the government has to concentrate more on how to win the war to tackle down the separatists' arm struggle, with all the extravagant military expenditure, instead of removing the roots of the problem.

Hypothesis*

Gurr⁴ depicts in his book (*Minorities at Risk*), that separatists or freedom movements normally occurs due to "relative deprivation, or determination of an ethnic group to retain control of their own culture, language, and territory, or manipulation of ethnic sentiment by ethnic minority elites for promoting their own career and status, or could be due to the combination of all factors". Syed Serajul Islam⁵ strengthens Gurr's argument, stating that whatever the historical, political, or social circumstances of the movements, their success depend on the following conditions: i) the severity of the separatist groups relative deprivation, ii) the application of sustained force by the regime against the separatist group, iii) the cohesiveness of the group, and iv) international support.

The Moro's struggle for independence meets with Ted Gurr's theory that the group's unity based on religious identity may not necessarily developed into a movement unless that group is affected by social, economic, and political deprivations. The lack of democratic institutions, which could pave the way for Moro's participation in the political system, and the need of the Moro for autonomy have led to the establishment of MNLF. Local, regional, and international supports, such as from the OIC, enable the Moro to realize some of their goals. The pressure of the OIC led to the Tripoli Agreement of 1996 and the Mindanao problem was settled, although only partially, through that agreement.

⁴ Ted Robert Gurr. 1993. *Minorities at Risk: A Global View of Ethno Political Conflicts*. Washington D.C.: United States Institute of Peace. Pp 123-138.

⁵ Syed Serajul Islam. 1998. *The Freedom Movement of the "Moros" in the Philippines: Recent Developments*. Asian Culture Quarterly. Taipei, Republic of China: Asian-Pacific Cultural Center. pp 69-77.

Research Problems

From the above problem, some basic questions that are raised in this research are

- i) To what extent do the Spaniards and American colonialisms contribute to the ethnic divisions between the Christian Filipinos and Moro Muslims in Southern Philippines?
- ii) How far does the forced assimilation imposed in the colonial and postcolonial eras lead to the imbalance of ethnic composition especially in Southern Philippines?
- iii) How does the government play its role either in increasing or reducing the conflict between the Christian Filipinos and the Moro Muslims in Mindanao?
- iv) How does the Separatist movement spring? What are the underlying or the main factors leading to the establishment of separatist movements in Southern Philippines?
- v) What are the specific characteristics underlying differences among separatist groups? What are the major factors causing internal split within the separatist organization?
- vi) How does the identity of “Bangsa Moro” come up? What are the specific contexts and circumstances underlying the formation of Bangsa Moro identity, and how does it persist?
- vii) How does the Philippines government (from President Marcos up to President Arroyo) solve the problem of separatism in southern Philippines?
- viii) To what extent the international communities and world organizations, such as the OIC, in giving their support over the conflict between the Philippines government and the separatist movements?

Research Objectives

In general this research attempts to:

- i) Grasp deep understandings on the influence of colonial rules to the present ethno-political divisions, as well the present economic and cultural gap in the Philippines.
- ii) Gain analytical view on the underlying factors leading to the conflict between the Philippines government and the Moro Muslims living in Southern Philippines?
- iii) Obtain considerate analysis on those playing major role in managing separatism and ethnic conflicts in the Philippines

More specifically this research attempts to:

- i) Give comparative analytical views on the extent of conflict caused by regional disparity between northern and southern islands of Philippines, as well as armed conflict between the Philippines government and the separatist movements in southern Philippines?
- ii) Explain pattern and characteristics of conflicts between the GRP and the separatist groups, as well as their solutions.
- iii) Give comparative analysis on the forms and models of state hegemony in the Philippines in pre-independence and post-independence times.
- iv) Analyze the correlation between state hegemony and the growth of separatism.
- v) Elucidate the majority and minority problems within the framework of state and civil society relations.
- vi) Disclose the roles of the state and other stakeholders in the management of conflict especially in coping with the Moro's struggle for independence.

The Significance of the Research

This research will certainly contribute to the findings of ethnic diversity and conflicts generated by forced assimilation. It will also contribute to the analysis of the determining role of colonial policies in the early formation of the Philippines' nation-state. This research also establishes a general assumption that it proves difficult to integrate groups of people belonging to different cultural, economic, political, territorial and historical backgrounds. It is even more difficult if their relationship is characterized by deprivation, discrimination, and domination of one group over the other that leads toward socio-economic and political gap between them.

The above research also lead us to the understanding that the development of Philippines' nation states is always contested by ethno-political, economic, and cultural cleavages between ethnic groups leading to continuous regional disparities that eventually generates to the seeds of local rebellions for independence. Furthermore, this research discovers the typology and dynamic of ethno-political conflicts and the minority movements, the reconciliation and peace progress in dealing with them, as well as the dialectics of state

control vis a vis civil liberations.

Finally, the lesson that we can learn from the Bangsa Moro is that long arduous and persistent actions of liberating the Moro from state's control symbolize their very basic needs for gaining back their freedom and self-dignity.

Research Work

The research was mainly conducted through a library research study and through interview activities with those who are concerned with the fate of the *Bangsa Moro*. The library studies were conducted in Indonesia and in the Philippines, whereas the interviews were done during a short visit, from 24 June and 5 July 2003 at the University of the Philippines (UP). The interviews were limited around the academics, the NGO people working on peace and development in Mindanao, and some Moro student activists who, while studying at the UP, were engaging themselves on the peace settlement for the Moro. The unstable condition in Mindanao had given the reason why this research was undertaken among limited circles residing in Manila only. Due to this lack, this research might produce unsatisfactory explanation upon the research problems and goals mentioned above. For this reason, a further research work upon the Moro problem is highly recommended.

Organization of the Chapters

The research report is divided into 5 chapters:

The first chapter describes the problems, propose, and the significance of the research. It also mentions important theoretical and conceptual frameworks used as the main tool of analyzing the facts and problems of Mindanao.

Chapter two explains in general about the geography and demography of the Philippines' nation state. It identifies the history of state formation of the Philippines, the plurality of its people, the economy, the main administrative system, and the politics in general. The history covers the fact that colonization always brings conversion of the occupied people into the religion of the colonizers. This chapter describes the spread of Christianity among the northern islanders, and the influence of Islam in the local system of the southern islanders. It also describes the continuation of forced integration of southern region into

the northern part of the Philippines prior and after independence. The history also gives basic elements that shape and build the identities of the Moro. It also depicts the Moro's struggle against the western colonization as well as Christianization, which later also inspires their struggle against external expansion for self-determination.

Chapter three mainly discusses the main seeds or roots as well as the growth and development of separatist movements, the basic characteristics and ideologies underlying those movements, and the ways they deal with the government in putting their demands.

Chapter four in general analyses the negotiation and peace agreement that has ever been achieved or signed between the GRP and the separatist group. More specifically it explains the reason why both parties (GRP and MNLF) undertake the peace negotiation, the role of international organization, especially the OIC (organization of Islamic conference) in mediating the negotiation. It also identifies that the implementation of peace agreement is varied from one administrative government to another. Different policies taking by each government in dealing with the separatists, such as the MNLF, the MILF and the Abu Sayyaf is also discussed briefly in this chapter.

Chapter 5 concludes all the issues upon the Moro. The main assumption drawn from the conclusion is that the social, economic, and political deprivations are the main factors leading to separatism, apart from religious and cultural differences. The Indonesian can learn precious lesson from the ways the Philippines governments coping with the separatists. Certain government policies upon the conflict resolution in Mindanao sometimes could even lead to actions that would further endangering the nation building of the Philippines, especially when they involve intervention of another country such as the US.

DEMOGRAPHY AND THE HISTORY OF COLONIZATION IN THE PHILIPPINES

Philippines are an archipelago, which constitutes of approximately 7,107 islands. It is bordered to western and eastern sides by the South China Sea and the Pacific Ocean. To the south, it borders on Sulu and Celebes seas, whereas to the north it borders on Bashi channel. This state comprises of around 301,000 square kilometers of land area with three major islands i.e. the Luzon (75,710 square kilometers), the Mindanao 59,418 square kilometers), and the Palawan (9,170 square kilometers)

Topographically, the Philippines is divided into three main islands ranging from the north to the south. They are the Luzon and the Visayas located on the north and central Philippines, and the Mindanao located on the South Philippines. The Philippines is also a mountainous region by nature. Its volcanic ranges on bigger islands. The highest one is Mount Apo (2,909 meters) situated in the Mindanao, whereas the more famous one is Mount Mayon. It is well known and reputed to be the greatest cone. Mindanao is also the largest river in the Philippines, whereas the Cagaya is the longest one.

Philippines has two seasons: the dry and the rainy one. The cool dry season lasts from December to February, and then followed by the hot dry season starting from March until May. The rainy season begins in June up to November. The mean annual rainfall varies from less than 40 inches up to more than 120 inches.

Administratively, the Philippines is divided into 12 regions (R.): Ilocos (R. I), Cagayan Valley (R.II), Central Luzon (R.III), Southern Tagalog (R.IV), Bicol (R.V), Western Visayas (R.VI), Central Visayas (R.VII), Eastern Visayas (R.VIII), Western Mindanao (R.IX), Northern Mindanao (R. X), Southern Mindanao (R.XI), and Central Mindanao (R.XII). There are also 4 other specific regions, namely: ARMM (Autonomous Region for Muslim Mindanao), NCR (National Capital Region), CAR (Cordillera Administrative Region), and Caraga Region.

Philippines is also divided further into 77 provinces, 1,524 municipalities, and 41,940 barangays. Among the 77 provinces, 37 of them are located in Luzon, 16 in Visayas, and

24 others are located in Mindanao.

Philippines is inhabited by more than 75 ethnicities, most of which are Malay descendants (95%). The Malay decent group can be divided further into two religious groupings: the Malay Christians (91%) and the Malay Muslims (4%). The other groups are the Chinese (1,5%), and the Lumads (non Christians and non Muslims) who practise animism and constitute around 3% out of the Philippines' total population. The indigenous people of the Philippines have been settling this territory since over thousands years ago. They are the Negrito (Aeta), the Malays, the Igorot, and the Ifugao. According to the 2000 population census, there is an increase of the Philippines population number around 11.5%, from 68,614,162 in 1995 to 76,498,735 people in 2000. The population density in the Philippines is around 77 per square kilometers.

Philippines is a multi-religious society, some of the people attach to the world religions i.e. Islam and Christianity. Along the history of Philippines, religious differences has affected to the social, political, and economic lives of the people. By religious groupings, the Philippines consists of 83% Catholics, 9% Protestants, 5% Muslims, Buddha and others around 3%. The Muslims are concentrated mostly in Mindanao, Palawan, Sulu, and Tawi-Tawi. They are divided further into 13 ethno-linguistic groups. The three largest ones among them are the Maguindanao, the Maranao, and the Tausug. The Maguindanao or people of the flooded plains mostly live in the Cotabato province that covers Maguindanao, Sultan Kudarat, north and south Cotabato areas. The Maranao or people of the lake come from the provinces of Lanao del Sur and Lanao del Norte. The Tausug or people of the current live in Sulu island.

Muslims in the South Philippines call themselves "Bangsa Moro" and maintain a separate identity vis a vis the majority of Christian Filipinos. This identity came into existence around 1970 along side with the rising independent movement led by Nur Misuari. Bangsa Moro became a political identity to unite all of those in Mindanao living under the Philippines' oppression. For the sake of denying their political existence, the GRP kept on calling them the Mindanaoan - a collective name to identify people living in the South.

It is not easy to unite all of those Muslims in the South into one solid identity, since they are varied in language and cultural practices. The Maguindanao are the largest ethnic group among the Muslims working mainly in agriculture, whereas the Maranao are known

as traders since many of them concentrate in commercial activities, and the Tausug are well known as warriors. The relationship among ethnic Muslims in Mindanao is characterized by competition and jealousy. They are also in a dilemmatic position for they are very difficult to move neither to the North (Luzon and Visayas) nor to the South (Sabah, Malaysia).

Islam has spread to South Philippines since 13th century ago. The grave stone of Tuan Mashalika, a prominent religious leader, found in Bud Daru marked by the inscription of the *Hijra* (Islamic) year of 710 (1310 A.D) is one of the evidences of Islamic influences here. In 15th century Islam continued to proliferate to Sulu and other parts of Mindanao. Islam was also assumed to infiltrate until in the island of Luzon.

When the Spaniards arrived for the first time in the Philippines in 16th century, they found that the majority of Malays here were Muslims and Islam had taken deep root in the Southern Philippines' social, political, and cultural systems. There were sultanates that had already embraced Islam such as the sultan of Sulu, Mindanao, and Buayan. The Sultan centralized power in his own hand supported by his local officials. The Philippines was governed under Spanish colonial rule when King Philip II appointed Miguel Lopez de Legazpi to be the first Governor General in this colony in 1565. Legazpi chose Manila as the capital of the state in 1571. The Spaniards' colonization had hampered the proliferation of Islamic teachings to the North. Their unsuccessful effort to conquer all the Sultanates' territory in Mindanao marked the Moro Muslims' hard struggle against their subjugation

The Treaty of Paris signed on 10 December 1898 marked the end of Spaniards colonial rule in the Philippines. In this treaty, Spain handed over all their colonial territory in the Philippines including the Mindanao to the Americans, although they never had a full control over this Moro's region. The Moro conceived that the Moro land was ceded illegally to the American colonizers whose eager to gain control over this territory for its abundant oil deposit. The Spain failed to consolidate their power over the Southern Philippines, although they had subjugated the Northern part for over 3 centuries. The American only took a decade to gain control over Mindanao and established colonial government here. Their success was achieved through pacification, Philippinisation, and forced integration.

The Americans' subjugation over the Mindanao territory had made all the sultanates and

the local chieftains (*datu*) lost their political and economic power, as well as their high social status and prestige among the Moro. The colonial rule had made the Christian Filipinos been accorded with a higher status than the non-Christians. The colonial structure positioned the colonizers on the top rank, followed consecutively by the Christian Filipinos, the Moro Muslims, and the Lumads. In other words, the Muslims had been relegated to a secondary position in the society.

Some rebellions did occurred under the Americans colony. The American troops had to face the Moro's attacks in the area of Lanao Lake in 1902. To cope with local rebellions, the Americans then turned their policy from indirect to direct rule marked by the formation of the Moro province comprising five districts i.e.: Cotabato, Sulu, Zamboanga, Lanao, and Davao. Under the direct control of American colonial administration, slavery was prohibited. Many of traditional rules and laws embedded in local system were also banned. Consequently, there were growing resentments and resistances toward American domination. The resistances were marked by two major battles in Jolo led by the nobles i.e. the Bud Bajo occurred in March 1906 and the Bagsak in 1913, which had taken around 500 death tolls among the Moro.

When the Philippines became a commonwealth country (1935-1946), the Moro Muslims nobles had already lost most of their power and strength to uphold the Islamic laws and traditions within their vicinity. The decreasing power of the Moro was also because of land confiscation programs that facilitated the Christian Filipinos from the north to move and build settlement in the South. From the beginning of Americans occupation, the Americans government had issued land acts to accommodate Christian migrants to build settlements and colonies in the south. These Acts were maintained up to 1939 which enabled the Christians settlers to own land from 16 up to 144 hectares. These Acts, consequently, had deprived the Moro from their ancestral legacies as well as turned them into a minority position.

In 1946 the Philippines gained independence from the Americans, and Manuel Roxas from the Liberal party was elected to be the first President. Aside from the Philippines independence, the Moro kept on identifying themselves as separate entity, and denying their incorporation with the Filipinos to form one nation state of the Philippines. The marginalisation of the Moro initiated by the American colonial government, continued up to the independence era, had created tensions and resentment among the Moro, which

eventually generated the seeds of liberation movements for self-determination. The struggle to form an independent Moro state got stronger during the Philippines post independence era especially after Nur Misuari had successfully stirred up the Moro's nationalism and unification under the MNLF. Long struggle for independence had pushed the government to sit together with their opponents on the negotiating table under the mediation of OIC. The negotiation produced two agreements signed in 1976 and 1999. However, the establishment of the ARMM as the product of these agreements in reality do not meet with the demands of the MNLF, and other factional groups of the MNLF (the MILF and the Abu Sayyaf), as well as the Moro in general. Some of the MNLF's factions, either they are in the MILF or in Abu Sayyaf continued their armed struggle against the GRP to put their demands for an independent Islamic state.

THE DEVELOPMENT OF BANGSA MORO SEPARATIST MOVEMENTS

It is very essential identifying the main factors leading to the Bangsa Moro separatist movements before discussing the on going development. There are four factors assumed contributing to the birth of separatist movements. These are: i) immoral and illegal annexation of the Moro's homeland during the Spanish and American occupations, ii) repression of social and cultural identities, iii) migration and unfair distribution of economic resources, iv) and ethnic cleansing upon the Moro.

Immoral and illegal annexation. Prior to the beginning of the Spaniard colonization, most of the inhabitants living in the Philippines archipelago were Muslims. They owned traditional ruling system called the *datu* (local chieftains) and the sultanate government. The Spaniard came for the first time in 1521 and, after a certain period of time, they started to build a colony in the Philippines territory. Their arrival had brought tremendous social, political, economic, and cultural impacts to the Filipino's living environment, particularly among those living in the islands of Luzon and Visayas. Their main goal was establishing a colonial government as well as Christianize the Filipinos. Through violence and persuasion, the Spaniards finally were successful in consolidating their power and influence around the Philippines archipelago, except in Mindanao, Palawan, and Sulu, which remained under the control of the Sulu, the Maguindanao, and the Buayan sultanates.

When The Americans defeated the Spaniards, the later was forced to hand over their entire colonial territory in the Philippines. In the Treaty of Paris, signed on 10th December 1898, the Spaniards claimed that the Mindanao was part of their colonial territory and was sold for 20 million Mexican dollars. The Moro claimed that the incorporation of Mindanao as the Spaniards colonial territory was immoral and illegal since the Spaniard failed to gain a full control over this island. They had no right at all to cede the Mindanao to Americans for their influences never reach Mindanao.

When the Americans had successful in gaining control all over Mindanao territory, they begun to establish the Moro province on 1st June 1903, as a separate government from the

Philippines. To withdraw the Moro's sympathy, the Americans preferred to use attraction policy rather than military operation. Nevertheless, in 1914 the US had forcefully abolished the Moro's province and integrated it into the Philippines. The assimilation of the Moro into the Filipinos to form one nation had created great social tensions and rebellions.

When the American made the Philippines into a Commonwealth country in 1935, they abolished the traditional rulers (the sultanates and the *datu*), and subjugated them to modern political system. This, in the Moro's views, marked the termination of Islam as well as local values practiced over centuries, and generated hatred and resentment.

In the era of Philippines independence struggle, the majority of Moro's leaders refused the plan to incorporate the Mindanao with the Philippines. They wanted their homeland remained to be excluded from the Philippines, and preferred under the American's direct control. The appearance of separatist movement in Mindanao resulted from this process. They conceived the Philippines was an alien government, locally termed *gubirno na saruwang a taw*.

Repression of Social and Cultural Identities. Islam is the main criterion of identity, which cannot be separated from tradition or local culture. The strong relationship between the two is expressed: "tradition is based on the Islamic laws (*syari'ah*), and the Islamic laws take the source of the holy Quran". The debasement of Moro's identity had occurred since the Spaniards colonization. They were so successful in converting the Filipino people to Christians, and arouse anti-Islamic feelings among them. This made they perceived themselves good and praiseworthy, whereas the Moro Muslims are wicked and treacherous.

When the Philippines commonwealth system was set up in 1935, important government officials proposed to solve inter-religious differences and conflicts between Christian Filipinos and Moro Muslims. They thought that the Moro Muslims would be able to assimilate themselves into the Filipinos through indoctrination and westernization. The President of Commonwealth, Manuel Quezon, then announced that there was no more place for either the sultanates or the *datu* in the Philippines. He also mentioned that the national laws are for both the Christians and Muslims. The Moro Muslims responded to this policy with resentment and disgrace. This marked an ideological war between Islam and secular values imposed by the government. The GRP (Government Republic of the Philippines)

even demolished mosques and Islamic schools in the name of development in Mindanao, and grew more churches in line with the increasing number of Christian colonies in Mindanao. The extermination of Muslims was more apparent when the AFP (Armed Forces of the Philippines) attacked them in Cotabato while they were conducting the *Idhul Adha* prayer in February 2003, causing high number of deaths and casualties. Besides all of these mass killings, some of the Filipinos remained holding bad stereotypes and stigmas on the Muslims, that they are lazy, poor, violent, and criminals. However, in nowadays some Filipinos, especially those working in the NGOs and the academics teaching at the university of the Philippines, are also very much concerned with the fate of the Moro, and trying to find a just solution for them.

Unfair Distribution of Local Resources. After Americans controlled all over Mindanao, they declared that this territory was a public land and thus every body was welcome to inhabit it. The Americans started to encourage the Filipinos from Luzon and Visayas islands to migrate to Mindanao. Extensive migration was facilitated by the provision of the native land. The American colonial government allowed the Moro possessing land not more than 16 hectares. When the commonwealth government replaced the colonial government, it even reduced the maximum land possession up to 4 hectares. On the other hand, since the American colonial rule up to the Philippines commonwealth government, the Filipino migrants were permitted to own land from 16 hectares up to 100 hectares. The government limited the land ownership for Moro Muslims but give more freedom to Christian settlers. The following table describes the land acts issued from 1903 up to 1927 for Christian settlers

Development of Acts and Land Ownership for Settlers in Mindanao

No.	Date	Acts	Land that licensed for individual
1.	7 October 1903	926	16 Ha
2.	29 November 1919	2874	16 up to 24 Ha and bought maximum for 100 Ha
3.	12 January 1924	3164	Allow individual to have more 1 patent
4.	19 January 1925	3219	Allow land buying up to 144 Ha
5.	10 February 1927	3346	Facilitated land for 1 homestead

Sources: Samuel K Tan, *The Economic Dimension of Moro Secessionism, Mindanao Studies Report 1995/No. 1, CIDS, Manila, 1995*

The government's discriminative policy on land ownership had made the Moro were deprived from their native lands, and turned their position into a minority in their own homeland, whereas the Christian settlers made up the majority group in Mindanao. The table below shows the increasing number among the Christians and the decreasing population numbers among the Muslims and the Lumads (non-Christians and non-Muslims) after the Moro's land confiscation

Population Number in Mindanao, 1918-1980

No.	Ethnics	1918	%	1970	%	1980	%
1.	Kristen	159.132	22	6.119.026	75	7.131351	65
2.	Muslim	358.968	49	1.583.043	19	2.504.232	23
3.	Lumads	205.555	29	1.269.660	5	1.269.660	12
	Total	723.625	100	8.146.652	100	10.905.243	100

Sources: Samuel K Tan, *The Economic Dimension of Moro Secessionism, Mindanao Studies Report 1995/No. 1, CIDS, Manila, 1995*

The change of land ownership led to the unequal distribution of wealth and prosperity between the Muslims and the Christian settlers. Many of the communal lands originally belonged to the Moro were transformed to individual ones. The land confiscation was substantially contributed to the increase of poverty and impoverishment among the Moro. The ARMM (Autonomous Region for Muslim Mindanao) that covers 4 provinces where the Moro mostly live in were included among the 10 poorest provinces in the Philippines. They are Sulu (1st), Tawi-Tawi (3rd), Maguindanao (6th), Lanao del Sur (7th)

The list of 10 Poorest Provinces in the Philippines in 2000

Provinces	Proportion of the poor 1997 (%)	Proportion of the poor 2000 (%)	Ranking 1997	Ranking 2000
Sulu*	67	63	1	1
Masbate	61	63	2	2
Tawi-Tawi*	35	57	40	3
Ifugao	58	56	4	4
Romblon	53	55	8	5
Maguindanao*	42	55	27	6
Lanao del Sur*	56	55	7	7
Sultan Kudarat	37	54	38	8
Camiguin	32	53	49	9
Camarines Norte	50	53	10	10
National	28	28		

Sources: 1997 and 2000 Provincial Poverty Statistics, NSCB

* = Provinces in ARMM.

The policy of migration had paved the way to the unequal distribution of land resources as well as prosperity and wealth absorbed from those resources between the Muslims and Christian settlers. Better infrastructure, living standard, as well as economic development among the colonies of Christian settlers marked social disparity that finally also created greater jealousy and hatred amidst the Moro Muslims. At the end these feelings turned the Moro to organize and mobilize themselves for the sake of maintaining justice and equality.

Ethnic cleansing. The ethnic cleansing appeared in several incidents. One among them was the massacre occurred in the Manili mosque, Carmen, North Corabato. On 9 June 1971 the Christian leaders invited the Moro Muslims for peace negotiation. Both sides agreed that the Manili mosque would be their meeting place to have peace talks. Instead of having a peace dialogue, the Moro Muslims who had been waiting in the mosque were ambushed by the ILLAGA, the Christian militia. Cesar Adib Majul (1989) described that 70 Muslims, mostly woman and children, died in that incident.

Illegal and immoral annexation, repression to the social identity, unfair distribution of local resources, and ethnic cleansing led to the birth of the Bangsa Moro separatist move-

ment. This reality is well expressed by Ted Robert Gurr (1998) as follows: “unfair treatments to minority by majority ethnic, competition with other ethnics to get power access in new state, state pattern policy transform communal power into protest and minority ethnic rebellion”.

In the interview on July 2003, Zulkifli Wadi, a lecturer of Islamic Institute Studies in the University of the Philippines, stated that the protest movements against the integration of Moro with the Filipinos had been taking place since in the early of the Philippines independence. Nevertheless, the movements were still sporadic, local, and unorganized as he said:

“In 1946 the Moro rebelled against the Philippines but their movement was unorganized and localized. It was nothing to do with the increasing spirit of Moro’s nationalism. The root of such rebellion was more to be personal ones. Sulu and Mindanao undertook uprisings and rebellions in 1946. There were also over 50 times of other rebellions. Land and income taxation as well as the imprisonment of the local people imposed strong opposition from the Muslims against the government.

Meanwhile, Ismael Z Villareal (2000) said that the conflict between the Moro Muslims and the Christian Filipinos was triggered by their displacement of the former from their ancestral homeland. The clashes between the two occurred in Mindanao mainly around 1950. Daru Haji Kamlan was a revolutionary leader in Sulu for some years.

The end of 1969 marked the strengthening consciousness of the Bangsa Moro separatist movements manifested by the establishing of the MIM (Moro Independent Movement) by Utdog Matalam, the former governor of Cotabato. Its main goal was to achieve an Islamic independent state in Mindanao. The government’s success in coopting the MIM, and the intensification of conflicts between Bangsa Moro and Filipino made Nur Misuari established new liberation movement called the MNLF (Moro National Liberation Front). He used the ‘Bangsa Moro’ to raise the sense of nationalism and unification to all ethnics living in Mindanao including the Christians and the Lumads. The collective identity was needed since there is no one political community that can unite all of the ethnics. The “Moro” has created collective consciousness to unite and fight against the Philippines. In the eye of the Filipinos, the MNLF had turned the Moro to something bloody, rebellious, and filled with armed struggle.

On 18 March 1974 MNLF proclaimed a manifesto for self-determination and struggle for the establishment of the Bangsa Moro Republic. This manifesto was signed by the Bangsa Moro elite figures. The demand for liberating themselves from the oppression of the Philippines was clearly expressed as follows:

“We, the oppressed Bangsa Moro people, wishing to free ourselves from the terror, oppression and tyranny of Filipino colonialism which has caused us untold suffering and misery by criminally usurping our land, by threatening Islam through whole destruction and desecration of its places of worship and its Holy Book, and murdering our innocent brothers, sisters, and old folks in a genocidal worship and its Holy Book, and murdering our innocent brothers, sisters, and old folks in a genocidal campaign of a terrifying magnitude.”

Nur Misuari, an alumni of the Department of Political Science of the University of Philippines, led the MNLF to set guerilla warfare with the Armed Forces of the Philippines (AFP) since 1970. Misuari's lobby to the OIC members, especially with Lybia, had brought significant political supports to the MNLF. Through the mediating role of the OIC, the GRP and MNLF signed the Tripoli Agreement in 1976.

Different understanding upon how the autonomy should ideally be implemented in Mindanao, as well as the ideological splits up among the high ranks of the MNLF leads to the division of the MNLF in 1979 into the New MNLF, and the BMLO (Bangsa Moro Liberation Organization). Headed by Ustadz Hashim Salamat, alumni of the University of Al-Ahzar, the New MNLF used Islam as the basis of struggle for an independent Moro. This organization became the MILF (Moro Islamic Liberation Front) in 1982. Salipada Pandatun and Domocao Alonto built the BMLO centralized in Riyadh.

The MNLF and the GRP stopped their staging war in 1996 when both sides, under the mediation of the OIC, agreed to sign the Peace agreement. The 1996 Peace Agreement included the formation of ARMM (Autonomous Regional for Moslem Mindanao) covering 5 provinces (Sulu, Basilan, Tawi-Tawi, Maguindanao, and Lanao del Sur). Part of the 1996 Peace Agreement contained the recruitment of 70,000 MNLF personnel into the AFP and the Philippines constabulary. While the MNLF and GRP reached an agreement, the MILF continued their armed struggles to meet with their demand for an independent Islamic state covering Mindanao, Sulu, and Palawan.

The MNLF split into the MNLF (headed by Nur Misuari) and the Reformed MNLF due to the feuds among its elites with regard to severe corruption within the executive bodies running the ARMM. Nur Misuari finally took back an armed struggle against the GRP, but he was defeated and fled to Malay. The Malay arrested him in 2001 under a joint security program with the Philippines.

Some of the MNLF factions formed the Abu Sayyaf, meaning the sword bearer. Prof. Mc. Kenna explained that this organization was established in 1995 and led by Abdurrazak Janjalani, a Moslem scholar from Middle East. After the death of Janjalani in 1998, it was infiltrated by the Philippines Intelligence Forces making the civilians (such as Christian settlers, Christian missionaries, and foreign tourists) as its main target of attacks, besides the AFP. The GRP supported by the USA accused the Abu Sayyaf as terrorist group who had international networking with the Al-Qaeda. The GRP and the USA war toward the Abu Sayyaf were included in the agenda of combating terrorism.

The formation of MILF was more to be the culmination of the Moro students' awareness while they were at the Al Azhar University in Middle East around 1962. They encouraged other youths to unite and took the oath for the struggle of an independent Moro. The first congress of MILF was held on 1978, producing organizational guidelines to achieve self-determination of the Bangsa Moro people. Its basic ideology is the subjugation to the one God. In details the objectives of the MILF are: to acknowledge to the superiority of Allah laws (*syari'ah*), to earn of happiness, to strengthen the relation between God and human being, to strengthen human relations, to achieve independence, to establish a government system based on the *syari'ah*. The organization has 46 military camps spread over Mindanao and Sulu, and 120.000 militias with 80.000 armed soldiers.

The differences among MNLF, MILF and Abu Sayyaf groups can be seen from their ideologies and political orientations, the ethnic backgrounds of their main supporters, and the international networks they make. Based on the ideological orientation, MNLF is a nationalist secular, whereas the MILF and the Abu Sayyaf uses Islam as their ideologies. Nathan Quimpo (1999) said that the MILF and the Abu Sayyaf groups refer to Islamic revivalism and fundamentalism that spread over Southeast Asia.

Te separatist movements are divided along ethnic lines. The elites supporting the MNLF are primarily the Tausug, while those supporting the MILF are the 1,6 million Maguindanaos

and 1,9 million Maranao people. Other supporters of the MILF are the Iranun coming from Northern Cotabato and Basilan. The Abu Sayyaf's main supporters come from Zamboanga, Sulu, and Basilan. Prof Carmencita T Aguillar from the Department of Politics, UP, in the interview conducted in July 3003, said that the Bangsa Moro separatist movements face ethnic divisions characterized by jealousy (ethnic envy) toward one to another. If the government attempts to accommodate the MNLF's demand dominated mainly by the Tausug, the MILF dominated mostly by the Maguindanao will launch a war.

The international supports ranging from diplomacy up to finance, military training and equipments Based on the international networks, MNLF built political ties and gained its main support mainly from Libya. Lybia had facilitated to the 1976 Tripoli agreement in 1996 while Indonesia facilitated to the 1996 Peace Agreement. MILF has strong relationship and gains support primarily from Egypt, Pakistan, and Afghanistan. Many *ulama* (religious leaders) from these states are Hashim Salamat's close friends. They met and studied at the same university i.e. the Al-Ahzar. The Abu Sayyaf is highly suspected getting its main support from the Al-Qaidah and Jama'ah Islamiyah - a terrorist network suspiciously linked with the Al-Qaeda and operated in the South East Asia region.

The GRP shows different ways in dealing with the separatist movements depending who are taking control over the government. The GRP signed two peace agreements with the MNLF, while offering regional autonomy as a peace settlement in Mindanao. On the other way round, the GRP launched a military operation to MILF while also trying to hold a peace talk. During the Estrada presidency, the GRP set up an all out war against the MILF. During the Arroyo's government, the AFP in cooperation with the US army attacked the Abu Sayyaf. The GRP accused that both of the MILF and the Abu Sayyaf are terrorist groups. The MILF denied such accusation giving the reason that its main struggle is for the Bangsa Moro's independence in Mindanao only. It does not have anything to do with the international terrorist organization working either globally or within the Southeast Asia region. Many Muslims in the Philippines suspected that the terrorist activities in Metro-Manila and Southern Philippines were involving the contra intelligent operations to discredit the Bangsa Moro separatist and the Muslims in general. Neither the MILF and the MNLF disagree with the Abu Sayyaf violent activities, however they never launch criticism nor military attacks toward one to another.

In nowadays, MILF is the biggest separatist organization in the Philippines. This organi-

zation owns BIAF (Bangsa Moro Islamic Armed Forces), armed men who scatter all over Mindanao and Sulu. Though its main leader, Hashim Salamat, had just recently died in July 2003 and had been replaced by Al Haj Murad Ebrahim, the MILF never loses its main spirit for the independent Moro. The issue of terrorism has hampered and halted temporarily upon the attempts on building peace negotiation between MILF and the GRP

MORO'S SEPARATIST MOVEMENTS AND PEACE NEGOTIATION

The Moro separatist Movement reflects both of the horizontal and vertical conflicts. American expansion had caused to the forceful integration of the Moro lands into the Filipino's northern island. The two are joined in what so called now the territory of the Philippines. The politics of migration of the Filipinos to Southern islands, and the land acts that enabled the Filipinos to legally possess and inhabit the Moro's land are important factors contributing to the spirit of independence. Moreover the exploitation of Moro's rich natural resources without increasing the local communities' welfare or improving their living standard has also led to the demand for self-determination.

The accumulated collective consciousness of the Moro who were deprived and marginalized from their territorial land was manifested in the formation of MNLF (Moro National Liberation Front). Led by a smart scholar, Nur Misuari, graduated from Political department, University of the Philippine, he was very successful in bringing the future of his people and their conflict with the GRP to the international fore. His success to approach rich Arab countries, most of whom are members of the OIC (Organization of Islamic Conference), was marked by the financial aid and military training received by the MNLF. The OIC also helps the MNLF as the main representative of the Bangsa Moro to settle their dispute with the government. However, in giving its support, the OIC rejected complete separation of the Moro from the Philippines state. This means that the MNLF struggles for self-determination should be placed within the framework of the sovereignty and territorial integration of the Philippines. Autonomy becomes the main alternative to solve the Mindanao problem.

To some extent, the success of the OIC members to push GRP to find a just solution for the Moro was also because of the oil politics. Most of the OIC members are also the OPEC members. The Philippines' indispensable need for oil supply from members of the OPEC has led the GRP to make no other choices, but to accept the autonomy for the Bangsa Moro as the main resolution. Through the mediating role of the OIC, the two sides signed the Tripoli Agreement in 1976. IN this agreement both sides agreed upon the implementation of autonomy for 13 provinces and 9 municipalities in Mindanao. However, Marcos

demanding that a referendum should be conducted prior to the implementation of the autonomy in 13 provinces and 9 municipalities defined in the Tripoli Agreement. The referendum shows only 10 provinces were agreed to be given the autonomy, which was then divided by Marcos into two regions: Region IX (Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur) and Region XII (Lanao del Norte, Lanao del Sur, North Cotabato, Maguindanao, and Sultan Kudarat).

In reality the autonomy did not work in both regions as expected by the MNLF. This was mainly because Marcos attempted to control and limit the power and authority of local governments established in each of those regions. The administrative bodies in Region IX and XII were not allowed to take policies that were ruled and managed by the central government that covered: defense and security, foreign affairs, international trade, currency and finance, trade barter, banking, foreign debts and loans, international aid, air and sea transportation, custom and quarantine, immigration deportation, citizenship and naturalization, national economic plan and meeting, national planning and education. Besides this, the Marcos government kept tight security (military) control over the two autonomous regions. Those Muslims occupying important positions in the bureaucracy and other local politicians in those autonomous regions felt that Marcos implemented autonomy according to his own version. There was no real autonomy; autonomy remained to be an ideal concept of the agreement.

After sometime there was still no economic development in the autonomous regions. Most of the Moros were still living like "refugees" in their own homeland. The autonomy set up in the 1976 Tripoli Agreement, in reality did not facilitate to settle the land conflicts and the economic gap between the native Moro Muslims and the Christian settlers. Thus the Moros remained very poor before and after the autonomy was established in their regions.

The failure of implementing Tripoli Agreement in Mindanao had caused the MNLF to increase their demands. Instead of maintaining autonomy, they want to form an independent (sovereign) state, separated from the Philippines. The OIC had also been dissatisfied by the way Marcos implemented the autonomy and accused that the GRP did not abide with the Tripoli Agreement. For this reason, OIC promised to continue their support to MNLF struggle for the Moros' self-determination. OIC then called all members to impose more pressures toward the GRP to abide with the Tripoli Agreement. Consequently, in November 1980, Saudi Arabia delayed its contract to send 10,000-barrel oil per day to the

Philippines.

The Agreement was continued during the Aquino presidency, when she succeeded Marcos. However, unlike her early predecessor, she attempted to terminate the mediating role of the OIC in settling the conflict with the MNLF. However, the OIC remained critical and warned the GRP to immediately fulfill the Tripoli Agreement. OIC even threatened, if The GRP did not want to implement the autonomy as signed in the Tripoli Agreement, it would alleviate the status of MNLF from observer to full membership. This had forced the government to negotiate with the MNLF using back the mediating role of the MNLF. However, the government argued that it was ready to have a peace dialogue but only with the unified Moro panel consisting of every rebel group. In this case the GRP exploited the split in Moro's high ranks. This promise made the OIC finally delayed the MNLF's full membership in the OIC.

In August 1989 Aquino signed the law for the establishment of Autonomous Region for Muslim Mindanao (ARMM). The referendum held three months after the signing of the ARMM indicated that only 4 provinces (Sulu, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao) voted for ARMM. The ARMM was inaugurated in November 1990.

Unlike Aquino, her successor, President Ramos activated the mediating role of OIC since this organization supported autonomy as the solution for the Moro, not separation. The GRP and MNLF signed a Peace Agreement in 1996, intended to implement the 1976 Tripoli Agreement. In this agreement MNLF was given the opportunity to run the autonomy for a three-year transitional period. There were two governmental bodies to accommodate the MNLF's high ranks members: the SPCPD (Southern Philippines Council for Peace and Development) and the Consultative Assembly. Nur Misuari was appointed to be the chairman of SPCPD and the governor of ARMM. The 1996 Peace Agreement also included the recruitment for 7, 500 MNLF army in the Armed forces of the Philippines (AFP) and the Philippines Police squad. The main task of the SPCPD was to manage and supervise all development programs in the ARMM.

The 1996 Peace Agreement was unsuccessful due to the mismanagement and the corruption in the implementation of ARMM. Nur Misuari and his followers failed to show their leadership competence to operate all the institutions established as the administrative bodies or the bureaucratic chains of the ARMM. Some valued that many projects devel-

oped in the region as a source of employment agency for relatives and constituents.

The 1996 Peace Agreement failed to satisfy both of the Muslims and non-Muslims living in all of those autonomous provinces. It did not include the non-Tausug Muslims as the main supporters of the MILF – a factional group of the MNLF. The two other separatist groups: the MILF and the Abu Sayyaf even conceived that the 1996 Peace Agreement was signed by the secularists by sacrificing Islamic identity. This agreement was also valued unsuccessful to settle land disputes and the widening economic gap between the Christian Filipinos settlers and the native Moro Muslims. The economic disparity between two sides gets wider and remains unsolved up to now. In brief, the autonomy given by the Philippines government during the Ramos time did not really make betterment for the Moro's living standard.

Unlike the Aquino and Ramos, Estrada had wiped out all the peace agreements that had been built by his early predecessors. Instead of building and continuing peace dialogue, Estrada set up an all-out-war against the separatists, especially with the MILF led by Hashim Salamat. The AFP attacked the MILF camps, which surrounded by the community-housing complex of the MILF main supporters. The government troops attacks on the MILF's camps in February 2000 were retaliated by attacking the AFP garrisons, and a town in Lanao del Norte. This retaliation made Estrada declared a total war against the MILF, which finally caused the Camp Abubakar, the main stronghold of MILF, fell in July 2000. Consequently, this attacks invited criticism and pressures from the OIC, and paved the MILF's way for a diplomatic struggle to gain international recognition. In the OIC forum, MILF campaigned for an independent Islamic state, which was rejected by the GRP.

In Arroyo's time, she stated that she was ready for heaving the dialogue with the MILF to make peace settlement unless the MILF surrendered their weapon. When this research She did not remove the warrant for the arrest of MILF leader. All of these policies create a great barrier for the MILF to go to the negotiating table for dialogue. MILF values that all the conditions set up by the Arroyo government are strategies to dismantle the MILF. If the MILF members have to disarm themselves, this means that they will certainly loose their force and power vis a vis the AFP. In other words removing their weapons means surrendering their militia, and the AFP will easily crush their struggles to suspend all their demands. If the warrant is maintained, the MILF leader can be caught anywhere and any

time. There is no guarantee then, in the MILF's mind, that the peace negotiation will be held in a democratic situation with no threat, fear, and worry. For the above conditions, the MILF accuses that the government is not really serious in making peace and dialogue for the settlement upon the Moro problem.

Arroyo's refusal to negotiate further with the separatist groups is also based on her accusation that both the MILF and mainly the Abu Sayyaf are involved in the terrorist activities. Since the Abu Sayyaf members' violent activities often targeted innocent civilians, this had invited government's accusation that they are terrorists who build global links with the Al-Qaeda. The governments' association of the Moro separatist group with the international terrorist organization has invited even greater problem for the continuation of Bangsa Moro identity and their struggle for an independent Islamic state. This association has also justified the USA intervention manifested by joint military operation with the AFP to combat separatist group heavily involved in terrorist activities. The prospect for negotiation is far from becoming true, and the development of ARMM goes nowhere.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

In a culturally diverse country it is not easy to reach an agreement on an ideological base of the nation. Most former colonies had their borders determined by Europeans when they decided to end the European wars. Newly independent countries in Asia and Africa, as a consequence, have borders that separate people who belong together, or join together people who do not belong together. In those countries, people with different territorial, historical and cultural backgrounds are often incorporated by force to form one nation state. The search for bounding ties that functions to give national identities as well ideologies becomes more problematic due to the geographical or territorial divisions. This clearly represents the position of the Bangsa Moro vis a vis the Filipino.

Prior to Spanish and American colonization, the native Moro of the Mindanao and Sulu islands were independent communities ruled under the Muslim Sultanates. Spanish attempted to subjugate the territory of the Sultanates located in those two islands, but failed to gain full control over them. After America defeated Spain, the latter handed up Mindanao to the former. In the Paris Treaty Spain claimed that Mindanao island was colonial territory, and sold this island to Americans for 20 millions Mexican dollars. Americans then united people living in Mindanao with the Christian Filipinos coming from Visayas and Luzon (central and northern part of the Philippine). The Moro had forcefully been integrated to Christian Filipinos under the American colonial rules, a policy, which later changed drastically the demographic, economic, and political pictures of the Mindanao. The forced integration was marked by migration or settlement policy, in which people from northern island were moved and settled to the South. The migration was facilitated by the provision of Moro land to be occupied, as living and working environments. Demographically this had caused a drastic change of land ownership, and the balance of ethnic ratio. The government legitimized the Moro's land confiscation through a set of land acts, which allowed the Christian settlers to purchase the land in Mindanao with low price. Many Moro's lost their native land. Many of their communal land ownership were then turned into private land ownership. The exodus of Christian settlers to the Moro land had made the former outnumbered the latter. Up until now the Moro become the minority depriving from their own land. Meanwhile the Christian settlers make up the majority of the Southern island, and become new landlords on the Moro land. The Moro's native land is their new homeland now.

It seems that the American was quite successful in integrating the southern and northern islands, whose people belong to different historical, cultural and religious backgrounds, to form a Philippine state. However, subjugating the Moro's heart and mind looks to be more difficult than subjugating their land. With all the demographic, economic, cultural, and political impacts that the Moro has to bear after the forced integration, resentment generates among them. It later even turns into violent military struggles leading to open arm clashes between the Armed Forces of the Philippines (AFP) and the separatist groups. Along the history of Spanish and American annexations up to the Philippine independence and post independence eras, the Moro remain to be restlessly and enthusiastically putting most of their energies for an independence over their territory claimed as belonging to their ancestral land.

There are three main factors inspiring the struggle for self-determination. First, as mentioned above, taking the root from the history of Western colonial expansion. The Moro reject external forces to control their sovereignty. Secondly, a forced territorial integration into people with different language, religion, and cultural habits, had taken away most of their precious natural resources. The forced integration initially was intended to assimilate the Moro into the Filipino's culture. However, since the second group outnumbered the first one, it later proved that the migration caused the imbalance of ethnic composition. The native More, up until now, become the minority whose land were grabbed, being marginalized and deprived from their living resources. The Christian settlers, in contrast, make up the majority of the Southern inhabitants and the new landlords out of the Moro's homeland. This was mainly because the migration, followed by public land acts issued by the government, had enabled the Christian Filipinos possessing the land of local inhabitants. Briefly the migration (settlement) of Christian Filipinos had brought both the demographical and economic changes in southern island. Later on it also brings political and cultural impacts.

The exploitation of Moro's rich natural resources without increasing the local communities' welfare was also obvious from many modern industries, which absorb and benefit more to the Christians settlers. Economically, the new settlement projects have created disparity of employment opportunity as well widening gap of living standards between the two groups. This creates further a sense of social jealousy and hostility among the native Moro Muslims toward the Christian settlers. It also generates the needs for self-determination among the first mentioned group.

As their spirit of independence increases they tend to call themselves Bangsa Moro. In Malay word *bangsa* means nation. The identification of Bangsa Moro clearly symbolizes their main purpose for liberating themselves from the rule and control of Bangsa Filipino. The use of Bangsa Moro as collective name includes their demands for having a separate independent state. The low living standard of the Moro added by the mass massacre in Jabaidah in 1968, and in Manili mosque in 1971, besides the economic disparity between native Moro and Christian settlers, leading to the establishment of MIM-Mindanao Independent Movement. The formation of MIM strengthens Gurr's argument that the manifestation of ethnic consciousness and aggressiveness depends substantially on the degree of deprivation and marginalisation that they suffer.

Later on the MIM was split up, due to different views among its elites on pursuing their interests, to form the MNLF-Moro National Liberation Front led by Nur Misuari. The MNLF was split up again to MILM to establish an independent Moro state and using Islam as the basic ideology. The MILM then becomes the MILF. However, the high ranks of the MILF finally also split again to form the Abu Sayyaf. Compared to that of the two previous groups, Abu Sayyaf seems to be the most violent one. It uses any way to meet with their demands, ranging from kidnapping, torturing, and intimidating for ransom, up to killings when their demands are unfulfilled. The Moro independent movements grow and develop according to the interests and political ideologies of the leaders and their main followers.

To a great extent, the government had set up peace reconciliation as one way to cope with separatist problems, besides military operation. The 1976 Tripoli Agreement and the 1996 Peace Agreement were the negotiations signed by the MNLF and the GRP through the mediation of Organization of Islamic Conference (OIC). Though the last agreement is intended for the final implementation of the first one producing the ARMM (Autonomous Region for Muslim Mindanao), none of them works according to the wish of the Moro. There are several factors leading to such failure. Some of them include the mismanagement and corruption among the MNLF's high ranks acting as the main operators of the ARMM. The ARMM receives little support from other groups outside the Tausug - the main supporters of the MNLF. The agreement fails to involve and satisfy other inhabitants i.e. the non-Muslims and non Tausug Muslims who support the MILF. The agreements do not give a just solution for land conflicts between the Moro and Christian settlers, for it does not mention about land reforms. The agreement does not really promote and encour-

age to the increasing Moro's living standard in general. The widening economic gap and the land disputes between the two sides remains unsolved.

All of the dissatisfactions over the resolution of the MNLF-GRP conflicts will even set more lightening spirits for another group to continue the unending independent struggle of the Moro. Though the GRP was successful to accommodate one separatist group, the other (new) one will certainly come up to hold back the struggles to achieve the demands, which are not yet fulfilled by the earlier group. Though the MNLF had dissolved, soon after its leader was caught and now he remains in jail in Metro Manila, the factions of this group revive themselves by maintaining their own factions. The MILF and the Abu Sayyaf are among the groups that attempt to continue the strenuous struggles of the Moro for self-determination.

The conflict resolution in Mindanao is getting harder due to the GRP's accusation and association that the Abu Sayyaf maintains international link with the Al-Qaeda. Such accusation has intensified the degree of the conflict. Nowadays the Philippines government, supported by the US, can justify their military operation to eliminate or crush separatism as part of combating terrorism.

BIBLIOGRAPHY

- Abdul Haq, Nuaim. 2000. *Independent Bangsamoro State*, book 1, Agency for Youth Affairs of MILF.
- Adriana, Elisabeth 2002. *Politik Luar Negeri Filipina Terhadap Asean*, Seminar Intern P2P LIPI, 15 Oktober.
- Alim, Guiamel, M. 1995. *The Bangsamoro Struggle for Self-Determination*. European Solidarity Conference on the Philippines *Philippine Solidarity 2000: In Search of New Perspectives*. Hoisdorf, Germany, 23-25 Juni.
- Amboy, Ric., 2001. "What a Filipina should be!", dalam http://www.pinay.com/cgi-bin/forum_features.cgi?read=28.
- Bentley, G. Carter. 1986. "Indigenous States of Southeast Asia." *Annual Review of Anthropology* 15: 275-305.
- Bertrand, Jacques. 2000. "Peace and Conflict in the Southern Philippines: Why the 1996 Peace Agreement is Fragile", dalam *Pacific Affairs*, Vol.73 No.1. Columbia: University of British Columbia.
- Blair, E.H. & J.A. Robertson (eds). 1903-19. *The Philippine Islands, 1493-1898*. 55 vols. Cleveland: A.H. Clark.
- Bonner, Raymond. 1987. *Waltzing with a Dictator: The Marcoses and the Making of American Policy*. New York: Times Books.
- Budihardjo, Eko. 2002. "Menangkal Kecenderungan Primordialisme", Kompas, 19 Juli.
- Bureau of Census and Stastitics. 1965. *Facts and Figures about the Philippines 1963*. Manila: Bureau of Census and Statistics, Republic of the Philippines.
- Burley, T.M. 1973. *The Philippines: An Economic and Social Geography*. London: G. Bell and Sons.
- Chapman, William. 1987. *Inside the Philippine Revolution*. New York: W.W. Norton.
- Clavel, Leothiny. 1969. *They Are Also Filipinos: Ten Years with the Cultural Minorities*. Manila: Bureau of Printing.
- Combes, Francisco. S.J. 1903-19-. "The Natives of the Southern Islands." In *The Philippine Islands, 1493-1898*. E.H. Blair and J. A. Robertson (eds). 55 vols. Cleveland: A.H. Clark.
- Costantino, Renato. 1975. *The Philippines: A Past Revisited*. Manila: by the author.
- Damaso Elena Jaoquin. 1983. "Magindanon Datuship." In *Filipino Muslims: Their Social Institutions and Cultural Achievements*. F. Landa Jocano (ed.). Quezon City: Asian Center, University of the Philippines.

- De la Costa, Horacio S. J. 1961. *The Jesuits in the Philippines, 1581-1768*. Cambridge: Harvard University Press.
- Dictionary of Sociology. 1991. New York: Harper.
- Drakulic, Slavenka. 1993. *The Balkan Express: Fragments from the Other Side of War*. New York: W.W. Norton
- Ellen, Roy F. 1983. "Social Theory, Ethnography, and the Understanding of Practical Islam in South-East Asia." In *Islam in South-East Asia*. M.B. Hooker (ed.). Leiden: E.J. Brill.
- Fay, Brian. 1996. *Contemporary Philosophy of Social Science: A Multicultural Approach*. Oxford: Blackwell.
- Filler, Alfredo. Juli 1995. "Muslim Militancy: A New Threat to Security and Stability, a philippine view-point," paper yang tidak diterbitkan untuk Angkatan Bersenjata Filipina .
- Forbes, W. Cameron. 1928. *The Philippine Islands*. 2 Vols. Boston: Houghton-Mifflin.
- Foster, Robert J. 1991. Making National Cultures in the Global Ecumene." *Annual Review of Anthropology*.
- Fox, Richard G. 1990. "Introduction to Nationalist Ideologies and the Production of National Cultures." Richard G. Fox (ed.). *American Ethnological Society Monograph Series. No 2*. Washinton D.C: American Anthropological Association.
- Garsman, John. 2001. *Moros in The Philippines*, dalam www.c-r.org/acc_mon
- Gayo, Iwan. 1991. *Motto Latin*. Jakarta: Upaya Warga Negara.
- George, T.J.S. 1980. *Revolt in Mindanano: The Rise of Islam in Philippine Politics*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Glang, Alunan C.O. 1969. *Muslim Secession or Integration?* Quezon City: Alunan Glang.
- Gowing, Peter G. 1979. *Muslim Filipinos: Heritage and Horizon*. Quezon City: New Day Publisher.
- . 1983. *Mandate in Moroland: the American Government of Muslim Filipinos 1899-1920*. Quezon City: New Day Publishers.
- . April 1988. "The Moro Struggle in the Philippines." *Third World Quarterly*. Vol 10, No 2.
- Gurr, Ted Robert. 1993. *Minorities at Risk: A Global View of Ethno Political Conflicts*. Washington D.C.: United States Institute of Peace.
- Hashim, Shalamat. 2001. *The Bangsamoro People's Struggle Against Oppression and Colonialisation*, Agency for

Youth Affirs-MILF, Camp Abu Bakar Ass Shiduque, Mindanaw.

- Isidro, Antonio. 1968. *Muslim-Christian Integration at the Mindanao State University*. Marawi City: Mindanao State University, University Research Center.
- Islam, Syed Serajul. October 1997. "The Rohingyas in Myanmar and the Moros in the Philippines: A Comparative Analysis." *Intellectual Discourse*. Vol 5. No1
- .1998. "The Freedom Movement of the "Moros" in the the Philippines: Recent Developments". *Asian Culture Quarterly*. Taipei, Republic of China: Asian-Pacific Cultural Center.
- Kadir W, Che Man. 1990. *Muslim Separatism: the Moros of Southern Philippines and the Malays of Southern Thailand*. Singapore and New York: Oxford University Press.
- Larousse, William. 2001. *Walking Together Seeking Peace. The Local Church of Mindanao-Sulu Journeying in Dialogue with the Muslim Community (1965-2000)*. Quezon City: Claretian Publication Inc.
- Lopez, Salvador P. 1989. "The Foreign Policy of The Republic of The Philipinas", dalam Michael Leifer, *ASEAN and The Security of South East Asia*, London: Routledge
- Magdalena, Federico V. 1997. "The Peace Process in Mindanao: Problems and Prospects." *Southeast Asian Affairs*. Singapore: Institute for Southeast Asian Studies.
- Majul, Cesar Adib. 1973. *Muslims in the Philippines*. Quezon City: University of the Philippines Press.
- .1985. *The Contemporary Muslim Movement in the Philippines*. Berkeley: Mizan Press.
- . April 1988. "The Moro Struggle in the Philippines." *Third World Quarterly*. Vol 10, No 2.
- . 1989. *Dinamika Islam Filipina*, terj. Eddy Zainury, Jakarta: LP3ES.
- Makol-Abdul, Pute Rahima. October 1997. "Colonialism and Change: The Case of the Muslims in the Philippines, *Journal of Muslim Minority Affairs*. Vol 17, No 2.
- May, R. J. 1987. "The Philippines Under Aquino: A Perspective From Mindanao". *Journal/Institute of Muslims Affairs*. Vol 8. No 2.
- . 1990. "Ethnic Separatism in Southeast Asia". *Pacific Viewpoint*. Vol 31.
- . July 1991. "The Religious Factor in Three Minority Movements: The Moro of the Philippines, the Malays of Thailand and Indonesia's West Papuans". *Journal Institute of Muslim Minority Affairs*. Vol 12.

- Mc Amis, Robert D.. 1974. "Muslim Filipinos." In G. Gowing & Robert D. McAmis (ed.) *The Muslim Filipinos*. Manila: Solidaridad Publishing House.
- Mednick, Confer Melvin. 1965. *Encampment of the Lake: The Social Organization of the Moslem Philippine (Moro) People*. Chicago: University of Chicago.
- Mednick, Melvin. 1974. "Some Problems of Moro History and Political Organization", dalam Peter G. Gowing dan Robert D. McAmis, *The Muslim Filipinos. Their History, Society, and Contemporary Problems*.
- Molloy, Ivan. 1988. "The Decline of the Moro National Liberation Front in the Southern Philippines." *Journal of Contemporary Asia*. Vol 18. No 1.
- Nathan, Quimpo. 1999. 'Dealing with The MILF and Abu Sayyaf". *Chronicle*, Volume 4 No.1-2, Quezon City: Center for Integrative and Developments Studies, University of Philippines.
- Noble, Lela G. Fall 1976. "The Moro National Liberation Front." *Pacific Affairs*. Vol XLIX. No 3.
- Noor, Farish A. October 1996. "Hopefully the End of a Long Crusade". *Impact International*.
- O'Shaughnessy, Thomas J. 1964. "Islamic Law and Non-Mulsim Governments." *Philippine Studies*. No 12.
- Peralta, Jesus T. 2000. *Glimpses Peoples of the Philippines*. Manila: National Commission for Culture and the Art.
- Pute Rahima Makol-Abdul. October 1997. "Colonialism and Change: The Case of the Muslims in the Philippines." *Journal of Muslim Minority Affairs*. Vol 17, No 2.
- Pye, Lucian W. 1985. *Asian Power and Politics*, Cambridge: Harvard University Press.
- Rahman, Ahmad A. October 1996. "On the Way to Peace". *Impact International*.
- Reed, Ishmed (ed.) 1997. *Multi America: Essays on Culture Wars and Peace*. Pinguin.
- Sjahrir. 22 Maret 2002. "Politik Akal Sehat Memasuki Tahun *Purgatorio*". Pidato Politik Ketua Perhimpunan Indonesia Baru Ulang Tahun I Perhimpunan Indonesia Baru, Jakarta.
- Suparlan, Parsudi, *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. Dalam www.scripps.ohiou.edu/news/cmdld/#_ftn.
- Suyanto. 2002. "Pentingnya Program Pendidikan Antikekerasan" dalam *KOMPAS*. 14 November.
- Tan, Samuel K. 1977. *The Muslim Armed Struggle in the Philippine, 1900-1972*. Makati: Filipinas Foundation, Inc.

- . 1989. *Decolonization and Filipino Muslim Identity*. Diliman, Quezon City: Department of History, University of the Philippines.
- . 1993. *Internationalization of the Bangsamoro Struggle*. Quezon City: The University of the Philippines Press and Center for Integrative and Development Studies, U.P.
- . 1995. "Islam and Christianity in the Philippines", dalam *Mindanao Studies Report No.3*. Diliman City: The University of the Philippines Press and Center for Integrative and Development Studies, U.P.
- . 1995. "The Economic Dimension of Moro Secessionism", dalam *Mindanao Studies Report 1995/No. 1*. Manila: CIDS.
- Tan, Samuel K. dan Heidi K. Gloria. 2002. *Mindanao and Sulu: History, Peoples, and Institutions*. Southern Philippines Development Authority.
- Tanggol, Sukarno D. 1993. *Muslim Autonomy in the Philippines*. Marawi City: Mindano State University Press.
- Thomas, Confer Ralph B.. 1971. "Muslim but Filipino: The Integration of Philippine Muslims 1917-1946". Ph. D thesis. University of Pennsylvania.
- Timberman, David G.. February 1990. "The Philippines in 1989 A Good Year Turns Sour". *Asian Survey*, Vol 30, No 2.
- Villareal, Ismael. Maret 2000. "Ajourney Towards Lasting Peace," artikel diterbitkan oleh *The Philippine Graphic*.
- Watson, C.W. 2000. *Multiculturalism*, Buckingham-Philadelphia: Open University Press.
- "Peace in His Time". 1996. *Far Eastern Economic Review*. September 5.
- "UNIVERSAL DECLARATION ON THE HUMAN GENOME AND HUMAN RIGHTS", UNESCO, June 1992.

www.asiasource.org.

www.eecs.berkeley.edu/tito/philip.html

www.student.gwhs.org

www.ualberta.ca/vmitchel

www.worldrover.com/history/philippines_history.html

www.wikipwdia.org/wiki/history_of_the_philippines

http://www.geocities.com/arham_s/fgu_arkib2000/gu20000603moro.htm

<http://www.ukdw.ac.id/lpip/pspp/philbi.html>

<http://www.geocities.com/PicketFence/3131/moro.htm>

